



Review

Edisi III Tahun 2015

Media Informasi LPMP Provinsi Kalimantan Barat



Liputan Utama

52.465 Orang Guru Terdaftar Di 78 Tempat Uji Kompetensi (TUK) Untuk Mengikuti Uji Kompetensi Guru Online Tahun 2015

LPMP Inside

Kegiatan Temu Ilmiah Kepala Sekolah Dan Guru Daerah Perbatasan (Academic Forum For Principals And Teachers Of The Border Region)

Artikel Pendidikan

Kontribusi Guru Honor Dan Solusinya

Pembelajaran Matematika SMA Dan Nilai Sikap Dalam Implementasi Kurikulum 2013

Pemanfaatan Media Pembelajaran Sebagai Upaya Pemenuhan Pengembangan Profesi Guru

Profil

Drs. ABDI TAUHID, MM Kasubbag Umum LPMP Provinsi Kalimantan Barat : Pekerjaan Bukanlah Suatu Beban Melainkan Sebagai Tugas Dan Tanggung Jawab

ISSN 1829-9547



Salam Redaksi

SUSUNAN REDAKSI

Pembina

Dr. Suhartono Arham, M.Si

Penasehat

Drs. Abdi Tauhid, MM
Iwan Kurniawan, S.Si, M.Si
Kurniadi, SE, MM

Pimpinan Umum

Dra. Dwi Karyani, M. Pd

Pimpinan Redaksi

Mujahir, M.Pd

Tim Redaksi

M. Dery Desturi, S.Kom, M.Cs
Sri Rahayu, SE
Helda Rosida, S.Sos
Oktariana Dwi Wulandari, M.Pd
Edi Rasni, S.Si
Lukman, S.Pd

Lay Out & Photographer

Irfan Marindra, SP, S.Kom

Keuangan

Hendrik Jokolestono

Humas dan Distribusi

Mardianto

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT kini Buletin **LPMP Review Tahun 2015** sebagai salah satu media informasi LPMP Provinsi Kalimantan Barat kembali hadir dan tampil setelah terhenti di tahun sebelumnya.

LPMP Review edisi ketiga Tahun 2015 ini akan mengulas mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di LPMP Provinsi Kalbar dan diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi dibidang kependidikan khususnya di Kalimantan Barat.

Liputan Utama LPMP Review mengulas tentang Uji Kompetensi Guru Online yang akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat, LPMP bersama P4TK BMTI dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama untuk menyukseskan pelaksanaan UKG ini.

Di rubrik **LPMP Inside**, terdapat informasi tentang kegiatan Kegiatan Temu Ilmiah Kepala Sekolah Dan Guru Daerah Perbatasan (*Academic Forum For Principals And Teachers Of The Border Region*) tahun 2015. Kegiatan ini merupakan proyek kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang dilaksanakan oleh LPMP Prov. Kalbar bersama Kementerian Pendidikan Malaysia khususnya Sarawak. Bagaimana hasil pelaksanaannya dapat dibaca di halaman 4.

Rubrik **Profil** mewawancarai bapak Drs. Abdi Tauhid, MM yang merupakan Kepala Subbagian Umum LPMP Provinsi Kalimantan Barat. Pak Abdi telah lama berada di posisi dan jabatannya, mengingat cakupan kerja yang luas dan jumlah bawahan yang banyak bagaimana pak Abdi membina dan mengawasinya ? Apa saja kiat beliau ? Baca hasil wawancara LPMP Review pada halaman 5.

Artikel Pendidikan akan memberikan anda banyak informasi seputar dunia pendidikan. Bagaimana peran guru honor dalam dunia pendidikan dan bagaimana kontribusi mereka untuk mencerdaskan bangsa dapat anda baca pada artikel-pada *Kontribusi Guru Honor dan Solusinya* pada halaman 16. Dalam merawat laboratorium kimia banyak hal yang harus diperhatikan, apa saja yang harus anda ketahui ? dapat dibaca pada artikel *Sumber - Sumber Kerusakan Bahan - Bahan Kimia Dan Pencegahannya Di Laboratorium IPA Sekolah* dapat dibaca pada halaman 9. Dan masih banyak artikel dunia pendidikan lainnya yang dapat anda baca.

Akhir kata, selamat membaca dan semoga apa yang kami sajikan ini memberikan manfaat bagi kita semua.. Amin.

Tim Redaksi
LPMP Review

Redaksi **LPMP Review** mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, gambar dan foto yang relevan. Karakteristik isi tulisan antara lain : menarik, relevan dengan pembelajaran di kelas, informatif, inovatif, dan dapat digunakan. Tulisan berkisar 3-5 halaman dengan spasi tunggal atau 5-10 halaman dengan spasi ganda berupa soft copy dalam CD.

Contact Person : **Sri Rahayu** (0852 5240 1340), **Irfan Marindra** (0813 4524 5997)

Alamat Kantor Redaksi

Jl. Abdul Muis Tanjung Hulu, Pontianak
Kalimantan Barat
Telp. (0561) 742110, Fax. (0561) 746618
E-Mail : fansmaniac@gmail.com

Sambutan Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Barat



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat mengabdikan diri kita kepada bangsa dan negara tercinta.

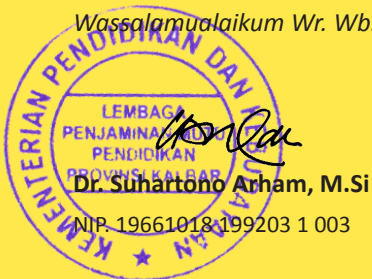
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berusaha melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pemerintah yang dapat memberikan jaminan mutu pendidikan terutama dalam usaha peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya media informasi dan komunikasi kelembagaan untuk menyampaikan program - program kerjanya kepada masyarakat.

Buletin LPMP Review pada tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi salah satu media penyampaian informasi agar dapat mereview kinerja dari LPMP kepada masyarakat umum terutama di bidang pendidikan.

Akhirnya, semoga buletin ini dapat bermanfaat bagi semua para pembaca dan kami juga mengharapkan partisipasi dari semua pihak terutama pemerhati pendidikan untuk dapat ikut memberikan tulisannya sehingga buletin ini dapat semakin lengkap dan lebih baik.

Saya ucapkan selamat membaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



52.465 ORANG GURU TERDAFTAR DI 78 TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) UNTUK MENGIKUTI UJI KOMPETENSI GURU ONLINE TAHUN 2015



Foto : M. Ikhsan

Guru memiliki posisi strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pencanangan guru sebagai profesi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Desember 2004, memperkuat peran guru dalam pelaksanaan pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara eksplisit mengamanatkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru secara berkelanjutan sebagai aktualisasi dari sebuah profesi pendidik. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilaksanakan bagi semua guru, baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat.

Berkaitan dengan program tersebut, pemetaan kompetensi yang secara detail menggambarkan kondisi objektif guru dan merupakan informasi penting bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan materi dan strategi pembinaan yang dibutuhkan oleh guru. Peta guru tersebut dapat diperoleh melalui uji kompetensi guru (UKG). Sasaran program strategi pencapaian target RPJMN tahun 2015–2019 antara lain adalah meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari *Subject Knowledge* dan *Pedagogical Knowledge* yang diharapkan akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa.

Oleh karena itu untuk mengukur capaian RPJMN, maka pada tahun 2015 UKG akan dilaksanakan bagi seluruh guru di Indonesia.

UKG secara rutin telah dilakukan sejak tahun 2012 bagi guru yang akan mengikuti sertifikasi guru. Mulai tahun 2015 ini UKG secara rutin akan dilakukan untuk mengukur profesionalisme guru. Tujuannya untuk mengetahui level kompetensi individu guru dan peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Pelaksanaan UKG difokuskan pada identifikasi kelemahan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional.

UKG tahun 2015 akan diikuti oleh semua guru dalam jabatan baik guru PNS maupun bukan PNS dengan jumlah jenis soal yang akan diujikan adalah 192 mata pelajaran/guru kelas/paket keahlian/BK. Perolehan hasil UKG pada masing-masing guru menjadi bagian dari penilaian kinerja guru, oleh karena itu sesuai dengan prinsip profesional guru akan mengikuti UKG pada mata pelajaran sesuai dengan sertifikat pendidik dan jenjang pendidikan yang diampunya. Disamping itu, hasil UKG juga digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan dalam pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi guru

serta pemberian penghargaan dan apresiasi kepada guru.

LPMP Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan P4TK BMTI dan Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan sebanyak 78 Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan 83 Laboratorium Komputer yang terinstalasi aplikasi e-Xam yang akan digunakan sebagai aplikasi pelaksanaan Uji Kompetensi Guru *Online*. UKG dilaksanakan menggunakan dua sistem untuk Provinsi Kalimantan Barat seluruh TUK menggunakan satu system yaitu: Sistem *online*, dilaksanakan pada daerah yang terjangkau jaringan internet dan memiliki ruangan yang berisi perangkat laboratorium komputer dan terhubung dalam jaringan *intranet*.

Sementara itu menurut Dr. Suhartono Arham, M.Si Kepala LPMP Provinsi Kalbar bahwa berdasarkan data yang ada di aplikasi sebanyak 52.465 guru yang akan di uji kompetensi pada tahun 2015 ini. Beliau juga menghimbau bahwa seluruh guru yang menjadi peserta untuk wajib mengikuti UKG online ini. Menurut beliau “sementara ini informasi dari pusat menyatakan bahwa UKG 2015 ini hanya bersifat pemetaan, namun mungkin di tahun depan akan menjadi salah satu komponen penilaian kinerja guru.”

Secara umum pelaksanaan UKG bertujuan sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi tentang gambaran kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik dan profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Mendapatkan peta kompetensi guru yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan jenis pendidikan dan pelatihan yang harus diikuti oleh guru dalam program pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB).
3. Memperoleh hasil UKG yang merupakan bagian dari penilaian kinerja guru dan akan menjadi bahan pertimbangan penyusunan kebijakan dalam memberikan penghargaan dan apresiasi kepada guru.

Sementara itu persyaratan peserta UKG Online 2015 ini yaitu :

- a. Semua guru baik yang sudah memiliki sertifikat pendidik maupun yang belum memiliki sertifikat pendidik.
- b. Guru PNS dan bukan PNS yang terdaftar di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- c. Memiliki NUPTK atau Peg.Id
- d. Masih aktif mengajar mata pelajaran sesuai dengan bidang studi sertifikasi dan/atau sesuai dengan kualifikasi akademik.

Materi Uji Kompetensi Guru

UKG mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi (subject matter) dan pedagogik dalam domain content. Kom-

petensi bidang studi yang diujikan sesuai dengan bidang studi sertifikasi (bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik) dan sesuai dengan kualifikasi akademik guru (bagi guru yang belum bersertifikat pendidik). Kompetensi pedagogik yang diujikan adalah integrasi konsep pedagogik ke dalam proses pembelajaran bidang studi tersebut dalam kelas.

Pendekatan yang digunakan adalah tes penguasaan substansi bidang studi (subject matter) berdasarkan latar belakang pendidikan, sertifikat pendidik dan jenjang pendidikan tempat guru bertugas. Oleh karena itu instrumen tes untuk guru SD, SMP, SMA dan SMK dibedakan sesuai dengan jenjang pendidikan tempat guru tersebut bertugas. Uji kompetensi pedagogik menggunakan pendekatan inti sel dari varian kompetensi pedagogik dimaksud

Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan UKG 2015 di Provinsi Kalimantan Barat dibagi menjadi 2 angkatan yaitu :

- a. Angkatan 1 pada tanggal 9 – 18 Nopember 2015
- b. Angkatan 2 pada tanggal 19 – 26 Nopember 2015

Dalam 1 hari peserta akan di jadwalkan dalam 2-3 gelombang sehingga pelaksanaannya akan *full time* dari pagi hingga sore hari.

Jumlah peserta UKG pada Tahun 2015 dan tahun sebelumnya (2014)

No	Kab/Kota	Jumlah Peserta per Tahun	
		2014	2015
1	KAB. SAMBAS	240	5571
2	KAB. MEMPAWAH	71	2395
3	KAB. SANGGAU	206	4520
4	KAB. SINTANG	222	4579
5	KAB. KAPUAS HULU	187	3325
6	KAB. KETAPANG	334	6062
7	KAB. KAYONG UTARA	101	1515
8	KAB. BENGKAYANG	201	3027
9	KAB. LANDAK	402	4172
10	KAB. MELAWI	404	2551
11	KAB. SEKADAU	185	2147
12	KAB. KUBU RAYA	195	4912
13	KOTA PONTIANAK	441	5491
14	KOTA SINGKAWANG	96	2198
	TOTAL	3309	52.465

Sumber : Aplikasi AP2SG/TUK Kemendikbud

Harapan kita semoga dengan dilaksanakannya UKG Online ini guru dapat terus kita jaga dan kontrol kualitas mutunya terutama dari segi SDM nya. (Irfan & Dery)

KEGIATAN TEMU ILMIAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU DAERAH PERBATASAN (ACADEMIC FORUM FOR PRINCIPALS AND TEACHERS OF THE BORDER REGION)



Pelaksanaan Kegiatan Temu Ilmiah Kepala Sekolah dan Guru Daerah Perbatasan ini memasuki tahun ke-5 yang telah dimulai sejak tahun 2010 sebagai tindak lanjut dari kerjasama antara LPMP Provinsi Kalimantan Barat dengan Jabatan Pelajaran Sarawak. Untuk tahun 2015 ini peserta adalah dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Temu Ilmiah ini dilaksanakan dari tanggal 28 November s.d. 1 Desember 2015.

Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di darat maupun laut. Indonesia berbatasan langsung di daratan dengan tiga negara yaitu Malaysia (Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan Sarawak dan Sabah), propinsi Papua dengan Papua New Guinea dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Lorosae. Di wilayah laut, berbatasan dengan negara – negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Papua New Guinea, Australia dan Timor Lorosae.

Konsep Pengembangan daerah perbatasan diarahkan untuk membuka, mengembangkan dan mempercepat pembangunan daerah di kawasan tersebut serta menyerasikan laju pertumbuhan daerah perbatasan seperti daerah lainnya yang lebih dahulu berkembang. Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah masing-masing sehingga terwujud pola pembangunan yang merupakan perwujudan wawasan nusantara, sehingga memperoleh dukungan dan kontribusi dari segenap komponen masyarakat dalam keuletan dan ketangguhan di seluruh wilayah perbatasan.

Pengembangan bidang pendidikan juga menjadi salah satu prioritas kerjasama dan pembangunan di daerah perbatasan, mengingat pendidikan merupakan salah satu upaya penciptaan sumber daya pembangunan yang berkualitas sehingga akan mendorong kemajuan bagi daerah di perbatasan. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, maka kemajuan pembangunan di daerah perbatasan akan sulit di capai.

Terkait dengan hal tersebut, maka peran lembaga pendidikan dan sumber daya pendidik yang ada di dalamnya dituntut untuk memiliki kualitas profesional yang memadai, baik dari sisi kemampuan akademik dalam melaksanakan proses pembelajaran, maupun kemampuan profesional lainnya yang mendukung.

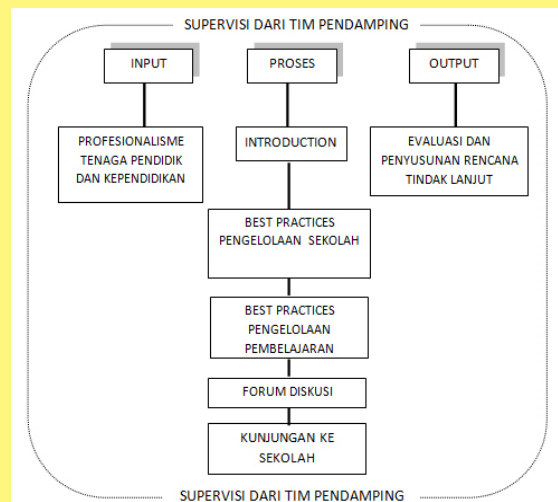
Dalam rangka meningkatkan profesionalitas tenaga kepala sekolah dan guru di daerah perbatasan antara Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia dengan Sarawak, Malaysia, LPMP Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak menyusun program Temu Ilmiah Kepala Sekolah dan Guru Daerah Perbatasan yang telah dimulai pada Tahun 2010. Kegiatan ini diharapkan pula dapat menjadi salah satu upaya awal atau “jembatan” untuk mempererat kerjasama bidang pendidikan baik oleh lembaga pendidikan maupun satuan pendidikan untuk lebih mengembangkan kerjasama di masa yang akan datang. Pada Tahun 2010 s.d. 2011 pesertanya adalah Kepala Sekolah dan Guru untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), untuk tahun 2012 s.d. 2015 pesertanya adalah Kepala Sekolah dan Guru dari jenjang Sekolah Dasar (SD), dan untuk tahun 2015 pesertanya adalah Kepala Sekolah dan Guru untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan Temu Ilmiah Kepala Sekolah dan Guru Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia dan Sarawak, Malaysia ini adalah :

1. Meningkatkan kerjasama dan hubungan yang baik antara kedua belah negara khususnya antara Kepala Sekolah dan Guru di sekolah pada daerah perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia dengan Sarawak – Malaysia.
2. Merupakan wadah saling berbagi pengalaman (Best Practices) dalam bidang pendidikan terutama dalam hal pengelolaan pendidikan, model pembelajaran, media pembelajaran dan lain sebagainya yang selanjutnya dapat diadopsi dan diadaptasi bagi masing-masing negara.
3. Mengembangkan profesionalisme Kepala Sekolah dan Guru yang ada di kedua belah negara sehingga dapat dikembangkan oleh di setiap sekolah dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sasaran dari pelaksanaan Temu Ilmiah Kepala Sekolah dan Guru Daerah Perbatasan ini adalah Kepala Sekolah, Guru Yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dan Sarawak Malaysia dengan jumlah peserta seluruhnya 80 orang dengan rincian 40 orang dari Provinsi Kalimantan Barat , Indonesia dan 40 orang dari Sarawak, Malaysia.

Dari kegiatan Temu Ilmiah Kepala Sekolah dan Guru Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia - Sarawak, Malaysia ini diharapkan dihasilkan Kepala Sekolah dan Guru yang profesional yang dapat melaksanakan tugas secara profesional yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa. (Okta)



Drs. ABDI TAUHID, MM

KASUBBAG UMUM LPMP PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PEKERJAAN BUKANLAH SUATU BEBAN MELAINKAN SEBAGAI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pada edisi kali ini LPMP Review akan mengangkat profil Kasubbag Umum LPMP Provinsi Kalimantan Barat Drs. Abdi Tauhid, MM. Pak Abdi begitu panggilan akrabnya telah cukup lama memimpin sub bagian umum di LPMP Provinsi Kalbar. Subbag Umum memiliki peran dan bagian kerja yang cukup luas sehingga memerlukan pengawasan dan pembinaan yang cukup ekstra. Bagaimana suka duka beliau dalam jabatannya? mari kita simak wawancara dengan pak Abdi berikut ini :

Dapatkah bapak ceritakan pengalaman karir pribadi bapak semasa di LPMP sebelum pada akhirnya menjabat sebagai kasubbag umum ?

Sebelum LPMP terbentuk, Dulunya masih Bernama BPG Yaitu Balai Penataran Guru, dan saya mulai bekerja di BPG tahun 1994 diangkat menjadi CPNS. Kemudian pada tahun 1996 menjadi PNS di sub bagian Tata Usaha BPG Pontianak. Pada tahun 2004 tepatnya pada tgl 19 Maret 2004 dengan pangkat golongan III/c saya dipercayakan dan diangkat menjadi Kasubbag Umum pada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian pada tahun 2007 menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan sekarang. Pengalaman lain sebelumnya saya pernah menjabat sebagai Pimbagpro, pada tahun 2004 s/d 2005. Sebelum masa otonomi daerah saya pernah menjadi ajudan pendidikan dan kebudayaan. Dalam bekerja saya upayakan untuk merasa ikhlas dan mensyukuri atas beban dan tanggung jawab saya sehingga bagi saya baik atau buruk karir kita harus dimulai dari kinerja yang baik dan ikhlas.

Menurut bapak apa kendala yang terberat dalam memimpin subbag umum?

Awal menjabat memang sangat terasa berat karena saat itu staf masih sedikit, sementara wilayah kerja Subbagian Umum sangat luas, mulai dari gedung, sampai halaman harus ditata dan dirawat, tetapi dengan berjalannya waktu, dan adanya penambahan Pegawai, dan pegawai yg masuk mempunyai kompetensi yang lebih baik maka pekerjaan dan tugas sebagai Subbag Umum menjadi terbantu.

Terkadang memang cukup berat bagi saya untuk mengatur bawahan dengan berbagai karakter dan sifatnya masing-masing, apalagi jumlah urusan di subbag umum itu cukup banyak mulai dari rumah tangga, persuratan, perlengkapan, keuangan, perencanaan, hingga kepegawaian jadi total ada 6 sub bagian yang harus saya bina dan awasi.



Pak Abdi di sela-sela waktu kerjanya
Dokumentasi Pribadi Abdi Tauhid

Membina dan mengawasi banyak staff dan urusan di subbag umum merupakan tugas yang cukup rumit, adakah tips dan trik bapak dalam menghadapinya ?

Sebaiknya saat kita berkerja sama staf, jangan kita posisikan staf sebagai bawahan kita, tapi kita tempatkan mereka sebagai mitra kerja kita, dan kita buat dalam suasana kebersamaan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ada 6 sub bagian yang harus saya bina dan awasi sehingga saya perlu tahu secara mendetail apa saja tugas dan tanggung jawab masing-masing staff disana dan bagaimana karakter personal staff didalam nya.

Pada tahun depan (2016) kita sudah mendengar isu rolling (pergantian) pejabat di lingkungan LPMP Provinsi Kalbar, siapakah bapak menghadapi tugas yang baru ?

Kita sebagai PNS atau bawahan harus siap di tempatkan dimana pun juga, apa lagi sewaktu kita melamar untuk menjadi PNS sudah menandatangani surat pernyataan siap di tempatkan dimana saja diseluruh wilayah Indonesia.

Walau pun dalam hati saya berharap, perpindahan itu membawa perubahan yg baik dalam kehidupan kita dan seluruh komponen dilingkungan kerja kita secara khususnya.



Foto : Dokumentasi Pribadi Abdi Tauhid

Di luar lingkungan kantor, apakah yang menjadi hobby dan kegiatan bapak mengisi kekosongan waktu ?

Kegiatan saya diluar kantor lebih banyak berkumpul bersama keluarga, atau mengunjungi orang tua/mertua. Agar badan tetap bugar sekali-kali pada pagi hari minggu saya berolah raga mengayuh sepeda atau berjalan kaki walaupun dalam rute perjalanan yang tidak terlalu jauh asalkan berkeringat dan menyegarkan tubuh kita.

Adakah pesan dari bapak sebagai motivasi bagi pembaca ?

Pesan saya mari kita buat pekerjaan bukanlah suatu beban melainkan sebagai tugas dan tanggung jawab kita serta sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah SWT. Karir yang baik bisa kita raih selama kinerja kita baik dan ikhlas dalam menjalaninya.

Demikian wawancara singkat bersama pak Abdi, pesan yang dapat kita ambil adalah bagaimana kita dapat lebih ikhlas dan tidak menganggap pekerjaan kita merupakan beban akan tetapi merupakan tanggung jawab dan bagian dari ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Irfan)

BIODATA PAK ABDI

Nama Lengkap : Drs. Abdi Tauhid, MM
Tempat Tgl Lahir : Sekura, 30 Nopember 1962
Alamat : Jl. Atot Ahmad 181, Perumnas II
Kecamatan Pontianak Barat

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 10 Pontianak Tahun 1976
2. SMP Negeri 08 Pontianak tahun 1980
3. SMA Mujahidin Pontianak tahun 1983
4. S1 Fisipol Untan Tahun 1990
5. S2 Magister Manajemen 2003

Kursus atau Pelatihan yang pernah diikuti

1. Adum 1999
2. Diklat Pim III 2007
3. Peningkatan Kompetensi Pejabat Struktural.
4. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Manajerial dan Profesional Tenaga Kependidikan.
5. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Negara pada Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah.

Keluarga

Nama Istri : Juliar Dewij, SE
Nama Anak : 1. Ayu Chuntia
2. Zhafira Deswita

KONTRIBUSI GURU HONOR DAN SOLUSINYA

Oleh: Mujahir, M.Pd

Berbicara masalah guru tentunya berbicara tentang pendidikan. Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah adalah guru (UU No.14/2005, Bab I, Pasal 1, Ayat 1). Apalagi jumlah guru di Indonesia sangat banyak = 3.015.315 orang, dengan rincian 1,6 juta guru PNS, 717.315 guru tetap yayasan (GTY), 91.963 Guru Tidak Tetap (GTT). Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk membenahi persoalan guru honor. Guru honor di Indonesia mencapai 1,7 juta jiwa yang hampir sama dengan jumlah guru pegawai negeri sipil (PNS) hal ini disampaikan pada saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang disampaikan Ketua Umum PB PGRI Sulistyio di Jakarta, Sabtu (5/9). <http://www.beritasatu.com/pendidikan/304724-pgri-desak-kemdikbud-benahi-persoalan-guru-honor.html>.

Guru yang berpredikat Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara finansial menerima gaji tetap, dana sertifikasi bagi yang telah menerima, tunjangan lain yang sesuai dengan peraturan. Guru yang belum sertifikasipun dapat hidup layak karena menerima gaji tetap perbulannya. Namun bagi guru honor hanyalah pengabdian belaka yang dibayar antara Rp 200.000 s.d. Rp. 500.000, sangat sedikit sekali guru honor yang menerima gaji diatas Rp.500.000. Secara rasional beban kerja guru honor sama dengan guru yang berpredikat PNS. Hanya ketidakadilan dalam pembayaran insentif guru honor cukup mengejutkan karena guru honor insentifnya dihitung dengan jumlah jam mengajar selama seminggu dibayar perbulan. Sebagai contoh Guru honor mengajar 15 jam perminggu dengan honor perjam misalnya Rp 20.000, maka guru honor tersebut seharusnya menerima Rp.1.200.000 perbulan, namun kenyataannya guru honor tersebut menerima insentif atau honor hanya Rp.300.000,00 perbulan. Kenyataan ini membuat guru honor hidup tak layak dalam suatu perjuangan pada hal guru honor perlu makan, membiayai pendidikan anak-anaknya. Di dunia ini tidak ada orang yang mau bekerja sebulan dibayar insentifnya seminggu, kecuali guru honor. Tampak jelas di media elektronik guru honor masih mengadakan audiensi terbuka untuk memperjuangkan hak-haknya, seperti pengangkatan menjadi PNS serta hak-hak lain yang layak berdasarkan peraturan.

Belum lagi sebaran guru honor di wilayah tertinggal, terluar dan terpencil (3T) dan perkotaan. Mereka (guru honor) mengajar dengan penuh dedikasi dan loyalitas dengan harapan mendapatkan berkah dan secercah harapan. Banyak kemampuan guru honor dalam hal mengajar dan mendidik jauh lebih baik dari guru-guru yang sudah berpredikat sertifikasi dan layak mendidik karena latar belakang pendidikan sudah sarjana. Segala kemampuan dicurahkan oleh guru honor untuk berjuang demi anak bangsa agar pintar jauh dari keterbelakangan serta kebodohan. Mereka mengajar dengan tanpa pamrih berbekal tekad dan pengetahuan demi anak bangsa tercinta. Guru honor di Indonesia yang mencapai 1,7 juta jiwa dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, ada yang berlatarbelakang pendidikan SPG, D2, D3 atau S1 bahkan ada guru yang mengajar bukan dari latar belakang pendidikan. Kekurangan guru di wilayah Indonesia ini

sangat lah besar. Kekurangan guru terjadi karena (1) pemetaan kebutuhan guru yang belum merata, (2) banyak sarjana pendidikan yang tak mau ditempatkan di daerah, (3) mudahnya mutasi guru dari daerah ke perkotaan atau pinggiran kota, (4) adanya mutasi guru menduduki jabatan struktural, (5) banyaknya berdiri unit sekolah baru, (6) jumlah guru yang pensi-



un setiap tahunnya cukup banyak. Semua ini menciptakan guru honor untuk menutupi kekurangan guru. Menurut Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, meski terlihat berlebih secara nasional, tapi Indonesia sejatinya kekurangan guru di tingkat kabupaten, kecamatan, dan sekolah. Menurut Sumarna, pemecahan masalah distribusi guru sudah tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 11 Tahun 2011 yang ditandatangani Mendikbud, Menpan-RB, Menag, Mendagri, dan Menkeu yang mewajibkan pemerintah daerah mendistribusikan guru di wilayah. (<http://www.harnas.co/2015/08/11/indonesia-kelebihan-guru>). UU 23 Tahun 2014 tetap menjadi pedoman pengangkatan guru. Dalam aturan itu, pemma mengajukan kebutuhan guru melalui Kemendikbud, syahdan disampaikan kepada Kemenpan-RB. "Kebijakan ini kami berharap distribusi guru bisa lebih merata di tiap wilayah," ujarnya.

Guru honor ikut andil dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) kiranya dapat diberikan penghargaan berupa insentif yang layak. Hal tersebut diamanatkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, sehingga guru berhak: a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial (UU No.14/2005, Bab IV, Pasal 14, butir 1 ayat a). Hal tersebut berarti guru honor berhak mendapatkan insentif minimal UMR (Upah Minimum Regional) yang berlaku di wilayah / propinsi masing-masing dan berhak mendapatkan tambahan berupa kesejahteraan lainnya. Jadi sangatlah miris jika seseorang yang mencerdaskan anak bangsa agar terbebas dari kebodohan, honor / upah kerjanya lebih rendah dari buruh (buruh perusahaan, pabrik). Pada hal hendak menjadi guru honor harus melalui tahapan pendidikan minimal Sarjana Kependidikan, walaupun kenyataannya masih ada guru honor yang SPG, D2 dan D3 namun tetap memiliki keprofesionalan dalam kependidikan, bukan berarti hanya sekedar mendidik dan mengajar. Maka selayaknya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bukan hanya suatu organisasi yang berlabel perjuangan untuk diangkatnya guru honor menjadi PNS, namun juga memperjuangkan nasib guru honor agar layak hidup karena honorinya lebih rendah dari upah buruh.

Dampak dari kekurangan guru PNS SD sangat luar biasa. Yakni kepala sekolah dengan gampang merekrut guru-guru SD honor. Kondisi ini sangat merugikan negara di kemudian hari. Sebab guru-guru honor ini selalu minta diangkat langsung menjadi CPNS oleh pemerintah karena merasa sudah mengabdikan lama. (<https://www.facebook.com/fhiforum/posts> diakses 5 -1-2016).

Guru honor yang mengajar di sekolah –sekolah dapat



Foto : ayobandung.com

dikurangi yaitu dengan cara (1) Mutasi guru dari sekolah yang gurunya sudah cukup ke sekolah yang kekurangan guru . Mutasi dapat dilaksanakan dengan cara mutasi guru antar sekolah di kecamatan , kabupaten serta propinsi (Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 11 Tahun 2011) , (2) Pelaksanaan Program Mobile Teacher pada tingkat kabupaten atau propinsi , (3) Perjanjian kontrak kerja (MoU) tentang batasan waktu untuk diizinkan mutasi sebagai PNS pada tingkat kabupaten/ kota dan propinsi , (4) Pemberian fasilitas yang memadai selain gaji bagi guru daerah khusus , daerah terpencil , daerah terluar dan daerah terdepan , (5) Program SM3T adalah sarjana mengajar di wilayah 3T , (6) Pemerintah daerah harus berani menarik guru berstatus PNS yang diperbatukan mengajar di sekolah swasta untuk kembali mengabdikan di sekolah negeri . (7) Tidak adanya peralihan PNS (guru) dari sekolah – sekolah menjadi pegawai struktural di dinas-dinas kabupaten , kota dan provinsi. (8) Alih fungsikan pegawai struktural di lembaga / dinas-dinas kabupaten / kota dan propinsi yang berijazah S1(sarjana) kependidikan untuk dijadikan guru . (9) Membuat dan mengelola sekolah yang berwawasan asrama atau sekolah model yang bermutu tanpa mengurahi hak-hak anak untuk belajar dan hak orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Lokasi sekolah berasrama/ model dilengkapi dengan guru , sarana dan prasarana dan letak yang strategis , bukan asal buat sekolah yang menjadi beban berkepanjangan mulai dari guru , perawatan gedung , sarana sampai pada kekurangan siswa . Program SM3T merupakan program pemerintah pusat , namun program ini dapat mengobati kekurangan guru secara instan , karena setelah satu tahun masa kontraknya selesai muncul masalah baru lagi yaitu kekurangan guru . Guru SM3T akan kembali ke Universitasnya , meninggalkan jenjak di daerah magang, akhirnya sekolah magang yang ditinggalkan tetaplah kekurangan guru. Hal tersebut membuat sekolahnya kebingungan mencari guru pengganti sebagai guru honor. Daerah 3 T rentan dengan guru honor karena banyak PNS yang tak mau ditempatkan . Bagaimanakah membuat guru di 3 T itu betah . Adapun caranya sebagai berikut yaitu fasilitas yang memadai sebagai motivasi guru agar betah di wilayah 3 T , fasilitas berupa tunjangan daerah 3T , kredit murah untuk rumah dan kendaraan serta tunjangan kemahalan yang

disesuaikan dengan daerah masing-masing, teori ini yang mungkin membuat guru betah di daerah 3T. Kata 3 T sangat indah (terluar , terdepan , dan terpencil) seperti terluar artinya berbatasan dengan negara lain atau di pantai laut lepas , bayangannya adalah keindahan panorama pantai namun pendidikan terabaikan karena sulitnya transportasi dan komunikasi , terdepan artinya berbatasan dengan negara lain, bayangannya adalah keindahan seperti negara yang disebelah batas dengan tatanan dan bangunan indah.

Semua bayangan itu bagaikan mimpi karena sesungguhnya 3T itu adalah wilayah yang ter (artinya tersulit, terisolir, termarginalkan dan terbelakang bahkan mungkin termiskin). Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulisty di Jakarta kemarin (14/1). Dia mengatakan, bom pensiun guru SD ini bakal terjadi tiga tahun berturut-turut. Yakni pada 2015, 2016, dan 2017 mendatang. “Antisipasinya tentu harus dipikirkan dari sekarang,” katanya. Pada tiga tahun ini, Sulisty memperkirakan guru SD yang pensiun bisa mencapai setengah hingga satu juta jiwa lebih , belum lagi guru SMP , SMA dan SMK . Dalam pernyataannya memang pemerintah menyebutkan formasi guru bebas dari moratorium rekrutmen pegawai baru. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak SD di daerah-daerah yang kekurangan guru PNS SD.

Masa mendatang diharapkan pemerintah serius dalam menata pemenuhan delapan standar pendidikan agar pendidikan menjadi wahana mencerdaskan bangsa yang utama. Guru honor sebaran dan pengangkatnya perlu tertata dengan system operasional prosedur (SOP) agar tertata dengan baik. Selain itu perlu dipikirkan tentang insentif guru honor yang baku , tidak hanya sekedar dibayar yang sesungguhnya tidak cukup untuk hidup sejahtera. Paling miris jika dipikirkan bahwa insentif guru honor lebih rendah dari buruh umumnya, pada hal pembangunan anak bangsa agar cerdas.

**) Penulis adalah Widyaiswara Madya LPMP Prov.Kalimantan Barat*

SUMBER - SUMBER KERUSAKAN BAHAN - BAHAN KIMIA DAN PENCEGAHANNYA DI LABORATORIUM IPA SEKOLAH

Oleh : Amir Riyanto*

PENDAHULUAN

Belajar IPA atau sains pada hakekatnya adalah belajar tentang fenomena alam. Belajar sains tidak sekedar belajar informasi sains tentang fakta, konsep, prinsip, hukum dalam wujud 'pengetahuan deklaratif', akan tetapi belajar sains juga belajar tentang cara memperoleh informasi sains, cara sains dan teknologi bekerja dalam bentuk pengetahuan prosedural, termasuk kebiasaan bekerja ilmiah dengan metode ilmiah dan sikap ilmiah. Pada hakekatnya sains terdiri atas tiga komponen, yaitu produk, proses, dan sikap ilmiah. Jadi tidak hanya terdiri atas kumpulan pengetahuan atau fakta yang dihafal, namun juga merupakan kegiatan atau proses aktif menggunakan pikiran dalam mempelajari rahasia gejala alam melalui serangkaian kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi(eksperimen), menalar/mengasosiasi dan mengomunikasikan untuk tercapainya indikator ketercapaian kompetensi dasar.

Fasilitas laboratorium adalah sarana penunjang yang seharusnya ada di setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran sains/IPA (Permendiknas no 24 tahun 2007). Untuk menyelenggarakan pembelajaran IPA dengan memanfaatkan fasilitas laboratorium maka sesuai dengan Standar dan kompetensi guru mata pelajaran IPA SMP/MTs berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru diperlukan guru yang memiliki kompetensi antara lain yaitu :

- a) Memahami lingkup dan kedalaman IPA sekolah.
- b) Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan IPA.
- c) Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan kerja/belajar di laboratorium IPA sekolah.
- d) Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak komputer untuk meningkatkan pembelajaran IPA di kelas, laboratorium.
- e) Merancang eksperimen IPA untuk keperluan pembelajaran atau penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka seorang guru yang menyelenggarakan pembelajaran di laboratorium dan apalagi yang sekaligus ditugasi menjadi pengelola laboratorium wajib menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan kerja/belajar di laboratorium IPA sekolah. Oleh karena itu pada artikel ini akan dibahas tentang sumber-sumber kerusakan bahan kimia dan pencegahannya di laboratorium IPA sekolah. Pengetahuan tersebut perlu untuk menghindarkan dari terjadinya kecelakaan fatal, dari sakit maupun gangguan kesehatan dan dapat bekerja dengan aman, produktif, dan efisien, bebas dari rasa khawatir akan kecelakaan dan keracunan. Keadaan aman dalam laboratorium dapat diciptakan apabila ada kemauan dari setiap pengguna untuk menjaga dan melindungi diri serta lingkungan.

PEMBAHASAN

Tidak dapat dielakkan semua alat dan bahan lambat laun akan mengalami kerusakan karena dimakan usia, karena lamanya bahan-bahan tersebut, baik lama pemakaian maupun lama disimpan, atau disebabkan oleh keadaan lingkungan. Sumber-sumber kerusakan yang disebabkan keberadaan alat – alat dan bahan-bahan kimia di dalam

lingkungannya dapat digolongkan menjadi tujuh golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Udara

Udara mengandung oksigen dan uap air. Bahan-bahan kimia yang sifatnya higroskopis harus disimpan di dalam botol yang ditutup rapat. Kristal Fe_2SO_4 yang berwarna hijau muda, apabila botol penyimpanannya kurang tertutup rapat akan segera berubah menjadi kristal $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ berwarna coklat muda karena teroksidasi oleh udara.



2. Cairan: air, asam, basa, cairan lainnya

Bahan kimia dan tempat penyimpanannya usahakan selalu kering, karena mudah rusak dalam keadaan basah. Bahan kimia seperti logam Na, K, dan Ca bereaksi dengan air menghasilkan gas H_2 (hidrogen) yang langsung terbakar oleh panas reaksi yang terbentuk. Demikian juga dengan asam sulfat pekat (H_2SO_4), asam klorida (HCl) asam nitrat (HNO_3), logam halideanhidrat, oksida non logam halide harus dijauhkan dari air atau disimpan dalam ruangan yang kering dan bebas kebocoran di waktu hujan. Kebakaran akibat zat-zat di atas tak dapat dipadamkan dengan penyiraman air. Cairan yang bersifat asam mempunyai daya merusak lebih hebat dari air. Asam yang sifatnya gas, misalnya asam klorida lebih ganas lagi. Sebab bersama udara akan mudah berpindah dari tempat asalnya. Cara yang paling baik adalah dengan mengisolir asam itu sendiri, misalnya menempatkan botol asam yang tertutup rapat dan ditempatkan dalam lemari khusus, atau di lemari asam.

3. Mekanik

Bahan-bahan kimia yang harus dihindarkan dari benturan maupun tekanan yang besar adalah bahan kimia yang mudah meledak, seperti ammonium nitrat, nitrogliserin, trinitrotoluene (TNT).

4. Sinar

Sinar, terutama sinar ultra violet (UV) sangat mempengaruhi bahan-bahan kimia. Sebagai contoh larutan kalium permanganat (KMnO_4), apabila terkena sinar UV akan mengalami reduksi, sehingga akan merubah sifat larutan itu. Oleh karena itu untuk menyimpan larutan kalium permanganat dianjurkan menggunakan botol yang berwarna coklat. Kristal perak nitrat juga akan rusak jika terkena sinar UV, oleh sebab itu dalam penyimpanan harus dihindarkan dari pengaruh sinar UV. Alat-alat sebaiknya juga dihindarkan terkena sinar matahari secara langsung, sehingga dianjurkan untuk memasang tirai-tirai pada jendela laboratorium.

5. Api

Api/kebakaran dapat terjadi bila tiga komponen berada bersamaan pada suatu saat, dikenal dengan "segitiga api". Ketiga komponen itu ialah:

- a. Adanya bahan bakar (bahan yang dapat dibakar)
- b. Adanya panas yang cukup tinggi, yang dapat mengubah bahan bakar menjadi uap yang dapat terbakar (mencapai titik bakarnya)
- c. Adanya oksigen (di udara, di sekitar kita)

Maka pada saat yang demikian itulah, oksigen yang mudah bereaksi



Foto : bisakimia.com

dengan bahan bakar yang berupa uap yang sudah mencapai titik bakarnya akan menghasilkan api. Api inilah yang selanjutnya dapat mengakibatkan kebakaran. Maka untuk menghindari terjadinya kebakaran haruslah salah satu dari komponen segitiga api tersebut harus ditiadakan. Cara termudah ialah menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang dingin (lemari es), sehingga tidak mudah naik temperaturnya dan tidak mudah berubah menjadi uap yang mencapai titik bakarnya.

6. Sifat bahan kimia itu sendiri

Bahan-bahan kimia mempunyai sifat khasnya masing-masing. Misalnya asam sangat mudah bereaksi dengan basa. Reaksi-reaksi kimia dapat berjalan dari yang sangat lambat hingga ke yang spontan. Reaksi yang spontan biasanya menimbulkan panas yang tinggi dan api. Ledakan dapat terjadi bila reaksi terjadi pada ruang yang tertutup. Contoh reaksi spontan: asam sulfat pekat yang ditetaskan pada campuran kalium klorat padat dan gula pasir seketika akan terjadi api. Demikian juga kalau kristal kalium permanganate ditetesi dengan gliserin. Oleh karena itu penyimpanan asam kuat, seperti asam sulfat pekat (disimpan di lemari asam) harus dijauhkan dari zat bersifat oksidator seperti Kristal kalium permanganate.

Berdasarkan uraian di atas sangat penting pengetahuan dan pemahaman tentang sifat-sifat bahan kimia, proses-proses dan perlengkapan atau peralatan laboratorium IPA, karena kecelakaan di laboratorium IPA biasanya karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman guru terhadap masalah tersebut di atas dan kurangnya bimbingan terhadap siswa yang sedang bekerja di laboratorium. Selain itu tidak tersedianya perlengkapan keamanan dan pelindung untuk kegiatan, tidak mengikuti petunjuk atau aturan yang seharusnya ditaati, tidak menggunakan perlengkapan pelindung atau menggunakan peralatan/bahan tidak sesuai dan tidak berhati-hati dalam kegiatan dapat pula menjadi sumber kecelakaan.

Pada laboratorium IPA yang terdapat di sekolah guru sebagai pengelola maupun sebagai guru mata pelajaran IPA bertanggung jawab atas keselamatan kerja siswa di laboratorium. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan di laboratorium. Upaya-upaya preventif tersebut

antara lain dengan sosialisasi serta menyediakan:

1. Alat pemadam api
2. alat untuk menghindarkan terjadinya kebocoran gas
3. kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

PENUTUP

Laboratorium adalah sumber pembelajaran yang penting bagi siswa untuk mengembangkan sikap kritis dan kreatifnya. Di dalam laboratorium tersimpan bahan-bahan kimia dan peralatan yang berpotensi menjadi penyebab kecelakaan apabila disimpan dan digunakan dengan tidak benar, oleh karena itu guru sebagai pengelola dan guru mata pelajaran IPA wajib memahami sifat-sifat bahan kimia dan peralatannya serta melakukan upaya-upaya preventif baik berupa sosialisasi terhadap perlunya berhati-hati dan menerapkan standar operasional yang baku untuk beraktivitas di dalam laboratorium. Serta juga menerapkan disiplin dan menerapkan aturan yang ketat bagi siapa saja yang akan melaksanakan praktikum di laboratorium.

DAFTAR PUSTAKA

-(2007), Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; Biro Hukum Kemdiknas: Jakarta
-(2007), Permendiknas No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs. dan SMA/MA; Biro Hukum Kemdiknas: Jakarta
-(2008), Permendiknas No. 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Pengelola Laboratorium Sekolah/Madrasah; Biro Hukum Kemdiknas: Jakarta
- Made Alit, dkk. 2011. Prosedur Pengelolaan Laboratorium IPA di Sekolah; P4TK IPA: Bandung.
- Merck (2009), MSDS (Material Data Sheets); <http://www.ccohs.ca/products/msds/>; diakses tanggal 3 Agustus 2015.

s adalah Widyaaiswara Muda LPMP Provinsi Kalimantan Barat.

PEMBELAJARAN MATEMATIKA SMA DAN NILAI SIKAP DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

Oleh :
Sri Sukwantini, S.Pd*

A. Pendahuluan

Kualitas pembelajaran di Indonesia yang masih sangat rendah dan sangat kompleks yang dapat dilihat dari salah satunya rerata ujian nasional (UN) tingkat SMA/SMK/MA tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014. Jika tahun lalu rerata nilai UN 7,7 maka tahun ini hanya mencapai 6,35. Demikian juga untuk rerata hasil UN matematika SMA/SMK/MA juga masih menunjukkan belum begitu memuaskan.

Hal ini menunjukkan bahwa minat siswa dalam belajar masih belum memuaskan. Demikian juga minat belajar siswa tentang matematika juga masih belum memuaskan, sebab masih ada 36,5 % tingkat permasalahan dalam pembelajaran. Ini sebagai fakta yang terjadi selama ini dalam sistem pembelajaran yang kering kerontang tidak menjadikan siswa senang dan menantang. Juga anggapan masyarakat pembelajaran matematika sebagai ilmu yang menakutkan, banyak rumus dan menghitung, menegangkan, harus serius, dan sebagainya. Fakta tersebut menggambarkan kualitas matematika di Indonesia yang perlu mendapat perhatian lebih.

Selama ini terdapat pemahaman yang keliru tentang pembelajaran matematika sekolah. Hasil penelitian Yuwono (2006) dan Steinmark & Bush (2003) menyebutkan bahwa hampir semua siswa dan sebagian besar guru menganggap bahwa: (a) matematika adalah perhitungan saja, (b) soal matematika harus diselesaikan dengan menggunakan rumus dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, (c) tujuan mengerjakan soal adalah mendapatkan jawaban benar, (d) peran siswa dalam belajar matematika adalah menerima penjelasan guru, kemudian menjelaskan kembali saat ujian, dan (e) semua soal dapat diselesaikan dengan rumus, algoritma, yang ada di buku teks atau telah dijelaskan guru. Hal ini terkesan pembelajaran matematika terutama untuk di SMA, siswa menerima penjelasan teori, contoh soal, dan latihan soal. Pesan nilai seperti ini kurang dan lebih fokus pada penanaman kognitif.

Dalam pembelajaran matematika SMA kecenderungannya adalah mengesampingkan kemampuan kognitif yang dikembangkan dalam bentuk pemecahan problematika matematika atau trik-trik penyelesaian setiap persoalan atau soal-soal matematika. Akan tetapi nilai sikap seperti: kejujuran, bekerjasama, teliti, dan tanggung jawab seperti ini belum menjadi fokus penilaian. Manfaat kejujuran, bekerjasama, teliti, dan tanggung jawab dalam pembelajaran matematika SMA dalam kehidupan siswa sehari-hari terkesan tidak ada korelasinya. Padahal dalam kehidupan siswa sehari-hari baik di saat kegiatan pembelajaran maupun di luar kelas, sikap-sikap dalam pembelajaran matematika seperti kejujuran, bekerjasama, teliti, dan tanggung jawab mestinya menjadi tindakan nyata.

Fokus penilaian sikap tersebut yang terjadi ditingkatkan dalam perencanaan pembelajaran. Persoalan bagaimana mengembangkan atau melaksanakan nilai sikap tersebut belum semestinya seperti dalam perencanaan pembelajaran tersebut. Sebagai contoh dalam kehidupan pembelajaran matematika SMA dikelas dan di luar kelas, seperti sikap-sikap kejujuran, bekerjasama, teliti, dan tanggung jawab yang sudah menjadi komitmen dan terintegrasi dalam perencanaan pembelajaran belum terlaksana. Dimana guru mengalami kesulitan secara kongkrit tentang pelaksanaan penilaian sikap. Guru dalam pelaksanaan penilaian cenderung terpisah antara proses pembelajaran dengan pelaksanaan sikap. Guru kecenderungannya menilai sikap siswa yang muncul dalam kegiatan pembelajaran seperti: saat belajar siswa sambil ngomong, saat belajar siswa berkunjung atau berjalan ke kelompok lain, saat belajar siswa mengacau temannya, saat belajar siswa mengantuk, dan lainnya. Sikap-sikap ini semua dikategorikan siswa nakal atau tidak baik.

Karena persoalan nilai sikap setiap siswa akan terjadi sebagai dampak aktifitas seperti pembelajaran matematika sehari-hari. Nilai-nilai sikap ini selalu dilakukan dengan pembiasaan atau pembudayaan. Nilai-nilai sikap yang dibangun dalam pembelajaran matematika mestinya sejalan dengan pembelajaran mata pelajaran di satuan pendidikan tersebut yang sudah menjadi komitmen bersama.

Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh BPSDMP dan PMP terhadap pelaksanaan KTSP 2013 terbatas pada tahun 2004, menunjukkan adanya kendala yang bersifat konseptual dan teknis. Kendala yang bersifat konseptual, diantaranya adalah masih rendahnya pemahaman peserta terhadap KTSP 2013, seperti: rasional, landasan, pendekatan dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran dan penilaian hasil belajar khususnya pengembangan instrumen penilaian hasil belajar, dan mengolah nilai hingga memasukan pada rapor.

Kendala yang bersifat teknis mengarah pada bagaimana mengaktualisasikan KTSP 2013 ke dalam kegiatan pembelajaran. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi hasil belajar belum dilaksanakan sesuai dengan

pedoman pelaksanaan sebagaimana diatur di dalam Permendikbud nomor 81a tahun 2013. Beberapa faktor penyebabnya, selain yang bersifat konseptual dan teknis juga dikarenakan tidak cukupnya waktu (jam pelajaran) yang tersedia, sarana dan prasarana yang belum memadai, guru dan siswa yang belum siap dalam menerima dan melaksanakan pembelajaran menggunakan kurikulum baru.

Masalah buku siswa dan buku guru yaitu pada pengadaan dan pendistribusian buku. Dimana buku-buku kurikulum baru belum terdistribusi ke sejumlah daerah bahkan sampai dengan bulan September 2014 belum ada titik terang sampainya buku di tiap satuan pendidikan.

Sampai dengan bulan September 2014 minggu pertama yang banyak menyita perhatian publik adalah masalah belum tuntasnya pelatihan guru. Jika penuntasan pelatihan guru di lakukan mulai awal bulan Agustus 2014 maka persiapan guru hasil Diklat untuk menjadikan ke dokumen pembelajaran efektif di sekolah terlalu mepet. "Padahal banyak dokumen-dokumen administrasi yang harus dibuat guru dan diseragamkan." Seperti dokumen rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) serta panduan kegiatan belajar siswa lainnya

Dalam pembelajaran matematika di SMA, mestinya penilaian sikap yang seperti yang diharapkan oleh Kurikulum 2013 sesuai kompetensi inti 1 dan 2 yang menjadi komitmen sekolah dan guru mata pelajaran direncanakan dalam perencanaan pembelajaran dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Penilaian sikap dalam pembelajaran dilakukan rutin dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup secara terus menerus. Penilaian sikap ini dilakukan dalam bentuk pembiasaan atau pembudayaan sehingga aktivitas pembelajaran berkarakter.

Sebagai pemecahan permasalahan pembelajaran yang kecenderungannya menekankan pengetahuan semata, maka mengimplementasikan Kurikulum 2013 dengan semestinya. Disamping itu agar selama proses pembelajaran seperti contoh pada mata pelajaran matematika di SMA, agar menghasilkan siswa berkarakter baik selama proses pembelajaran dan dalam kehidupan disekolah maupun diluar sekolah, maka dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, dan tindak lanjutnya mesti bermakna bagi setiap siswa. Dari uraian latar belakang permasalahan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran matematika di SMA, bagaimana mestinya mengembangkannya? Bagaimana cara melaksanakan penilaian sikap dalam pembelajaran matematika di SMA dalam Kurikulum 2013?

B. Pembelajaran Matematika dan Nilai Sikap dalam Implementasi Kurikulum 2013

Pemahaman pembelajaran matematika terutama di SMA yang keliru selama ini, dimana siswa ditanamkan pengetahuan dengan terampil menyelesaikan berbagai soal-soal dengan berbagai trik-trik. Pemahaman tersebut dapat diperoleh dari berbagai kegiatan diluar sekolah seperti melalui bimbingan belajar. Pemahaman konsep pembelajaran yang seperti tersebut dapat dibenahi melalui implementasi Kurikulum 2013, yang lebih mengedepankan dimensi sikap/karakter dalam pembelajaran. Dimana pembelajaran matematika di SMA mestinya lebih mengembangkan nilai-nilai sikap siswa baik selama proses dan diluar pembelajaran sehingga menjadi bagian kehidupan siswa sehari-hari.

Usaha untuk menerapkan nilai-nilai sikap yang menjadikan siswa berkarakter dalam tingkah laku kehidupannya baik dalam proses pembelajaran matematika dan di luar kelas yang bermakna, sebenarnya telah dibenamkan dalam Kurikulum 2013 yang seharusnya diimplementasikan oleh guru. Dalam Permendikbud No.54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, diantaranya menyatakan bahwa dalam dimensi sikap, lulusan SMA/MA/SMK harus: "Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia".

Jabaran Kurikulum 2013 dalam pelaksanaan di kelas, dirumuskan dalam Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan bahwa dalam proses pembelajaran prinsip yang digunakan adalah: (1) dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu; (2) dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar; (3) dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah; (4) dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi; (5) dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu; (6) dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; (7) dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif; (8) peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik (hardskills) dan keterampilan mental (softskills); (9) pembelajaran yang men-

utamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat; (10) pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan member keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani); (11) pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat; (12) pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas; (13) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan (14) pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Dengan demikian penjelasan (eksplanasi) guru yang bersifat dogmatis, mencontohi, atau menggurui, harus diminimalkan. Guru di kelas hanya sebagai fasilitator kegiatan belajar siswa, sehingga siswa belajar secara bermakna.

Di lapangan, guru-guru matematika terutama di SMA kecenderungannya belum melaksanakan esensi peraturan di atas. Sebagian besar guru belum memperhatikan kemampuan berpikir siswa atau tidak mengajar secara bermakna. Terjadi kecenderungan pengajaran matematika ke arah penekanan pada kemampuan prosedural, aspek hitung menghitung, hafalan rumus, hanya mementingkan langkah-langkah prosedural (algoritmis), dan memberikan perhatian yang rendah pada proses pemerolehan konsep prosedur, atau rumus. Itu mungkin disebabkan adanya tuntutan kurikulum (UN), yang harus dihabiskan pada suatu satuan waktu tertentu. Sebagai akibatnya, siswa tidak mengalami proses pembelajaran matematika secara bermakna.

Proses pembelajaran dalam Kurikulum 2013, mengedepankan eksplorasi, pemecahan masalah, selalu menanyakan “mengapa” rumusnya begini, melacak darimana datangnya rumus, atau prosedur, merupakan pengejawantahan salah satu pendidikan karakter. Karakter yang dimaksud, diantaranya ulet, tekun, gigih, rasional, kritis, beraktivitas sesuai aturan, dan tidak suka menerabas/potong kompas (tidak mau antri, ingin kaya mendadak, melalui korupsi). Saat menjadi warga masyarakat, orang harus menghargai kerja keras, berpikir rasional, selalu mempertimbangkan kemasukakalan kejadian atau tawaran yang kelihatannya menarik, namun sebenarnya penuh tipuan dan muslihat.

Dalam pembelajaran matematika siswa perlu dihadapkan pada masalah terbuka dengan solusi tidak tunggal, dan masalah dengan berbagai cara penyelesaian. Contoh masalah demikian, misalnya: carilah dua bilangan yang jumlahnya 10, carilah bilangan asli yang faktornya tepat ada 3, apa perbedaan segitiga dengan persegi?, dan sebagainya. Dengan sering mendapatkan masalah yang jawabannya tidak harus seragam, siswa terbiasa berbeda pendapat dan menghargai pendapat kawannya. Hal itu merupakan pengejawantahan salah satu karakter manusia dalam menghargai perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus menghargai perbedaan. Mungkin perbedaan pemikiran, perbedaan agama atau keyakinan atau mazhab di antara warga masyarakat yang pluralis. Hal tersebut mendidik siswa untuk bersikap demokratis dan legawa menerima keberagaman dan perbedaan.

Pengenalan masalah yang berawal dari lingkungan siswa dimaksudkan agar awalan pembelajaran matematika menjadi mudah dan menarik bagi siswa. Saat awal pembelajaran siswa sudah mulai tertarik, bahwa masalah yang akan dikaji ada disekitar mereka, membumi, tidak di awang-awang. Mempelajari matematika harus dapat menjadi aktivitas yang mengasyikkan bagi siswa. Hal itu selaras dengan salah satu tujuan pembelajaran matematika yakni: memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Sikap ulet dan percaya diri merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki siswa untuk bertahan hidup di masa depan yang penuh dengan kompetisi dan atau persaingan hidup.

Struktur matematika dibangun secara aksiomatik, dimulai dari “teorema” yang tidak didefinisikan, diikuti definisi, aksioma atau postulat yang diterima kebenarannya secara otomatis dan berpijak pada nalar. Berdasarkan aksioma lalu diturunkan sifat atau teorema atau algoritma. Hirarkis dalam struktur matematika tersebut mendidik siswa untuk taat azas, konsisten, dan patuh pada aturan/hukum yang telah ditetapkan. Taat pada aturan/hukum atau Prosedur Operasional Standar (POS) merupakan salah satu aspek dalam pembentukan karakter bangsa yang selama ini sering diabaikan oleh pihak yang seharusnya mengawal aturan atau hukum atau POS tersebut.

Aspek lain dari bangunan matematika yang aksiomatik adalah kebenaran untuk menerima kesepakatan atau konsekuensi, walaupun konsekuensi tersebut rasa-rasanya bertentangan dengan anggapan kita. Sebagai contoh kita menganggap seharusnya $20 = 0$, dan $0! = 0$, namun menurut struktur matematika tidak demikian, yakni $20 = 1$, dan $0! = 1$. Hal itu mencerminkan keharusan kita untuk konsisten, menerima hal yang telah disepakati, bersikap jujur, disiplin, legawa, mengakui kekurangan, dan menepati janji. Karakter demikian, secara kasat mata mulai luntur dari kehidupan berbangsa kita.

Sistem atau struktur dalam matematika harus dibangun dengan memperhatikan semesta pembicaraan. Kebenaran matematis adalah kebenaran yang berlaku dalam semestanya. Dalam semesta bilangan bulat dan operasinya, perkalian bilangan yang menghasilkan nol, maka minimal satu dari dua bilangan tersebut haruslah nol. Hal tersebut tidak berlaku dalam sistem bilangan modulo-6

(bilangan jam 6-an) bersama operasi kali, karena ada dua bilangan yang tak nol, yakni 2 dan 3, yang bila dikalikan menghasilkan nol. Aspek karakter yang seharusnya muncul dari kesemestaan ini adalah orang hidup harus mengikuti sistem, nilai/adat atau kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut.

Dari uraian pembelajaran matematika dan nilai-nilai sikap atau karakter tersebut diatas, maka setiap guru mestinya menyiapkan sumber daya yang semestinya dalam melaksanakan kurikulum 2013 secara rinci dapat di lihat sebagai berikut :

1. Kesiapan psikis

Kesiapan secara psikis dalam melaksanakan kurikulum 2013 merupakan kesiapan secara mental dalam menghadapi perubahan dan siap berubah terhadap yang terjadi terkait untuk kesuksesan pelaksanaan kurikulum. Kesiapan psikis ini terutama kesiapan psikis pemerintah daerah dengan dinas pendidikan, kesiapan sekolah, guru, dan siswa itu sendiri dan dukungan masyarakat. Kesiapan psikis dalam hal ini adalah kesiapan secara teknis bukan kesiapan politis. Kesiapan teknis ini mencakup sumber daya pendukung kegiatan pembelajaran yang berkualitas di sekolah. Sumber daya pendukung ini adalah penciptaan kondisi sosial kegiatan pembelajaran yang berenergi di dukung oleh berbagai pihak penuh dengan kepedulian. Termasuk kesiapan kualitas manajemen sekolah, kesiapan guru yang profesional dalam pelayanan pembelajaran dan kepedulian masyarakat menjadi tumpuhan dalam kualitas capaian ujian.

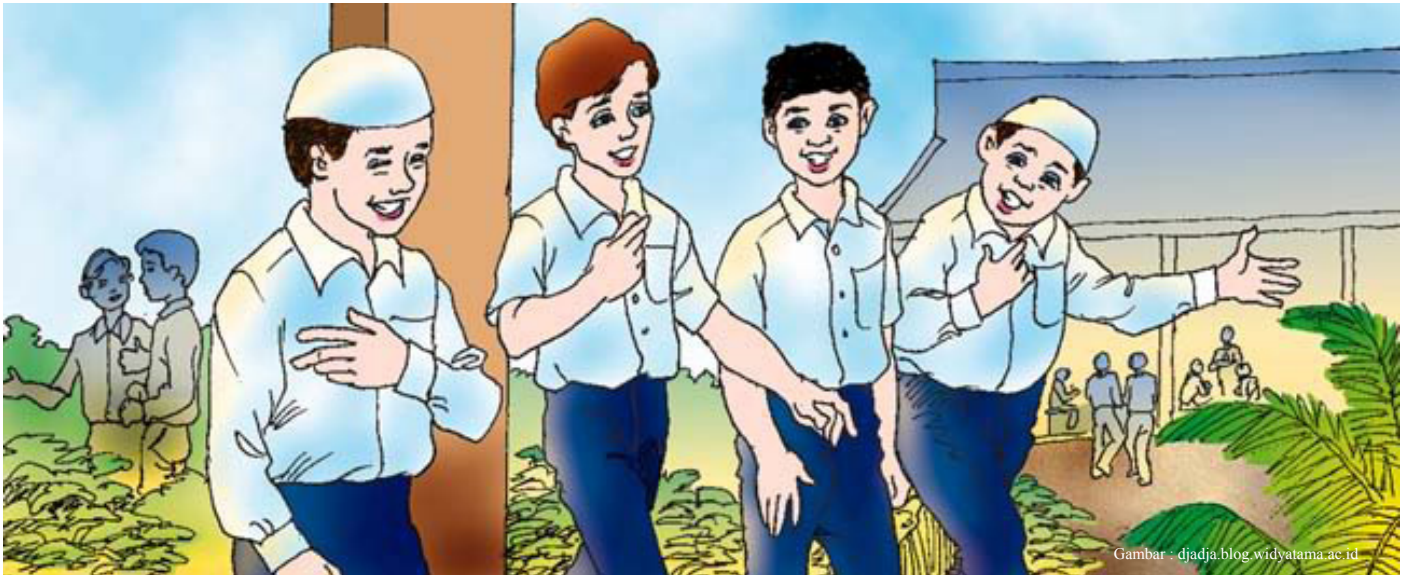
Sejalan capaian hasil pembelajaran siswa dalam mata pelajaran matematika yang masih memprihatinkan maka peran guru mesti lebih di kuatkan. Peran guru tersebut tidak boleh berubah di dalam fungsinya sebagai transformer ilmu dan pamong bagi para siswa. Terlebih guru matematika terutama untuk jenjang SMA, terkesan guru-guru dalam mengajarkan kompetensi dasar matematika dengan prosedur menjelaskan, contoh, latihan, dan membahasnya. Kegiatan ini terkesan sebagai sesuatu rutinitas dan baku. Juga terkesan guru-guru matematika menakutkan dan garang. Pendekatan pembelajaran seperti ini tidak bisa di terima setiap siswa karena gaya belajar tiap siswa pasti berbeda. Bagi siswa yang gaya belajarnya cocok maka pembelajarannya akan pesat dan sebaliknya untuk siswa yang tidak cocok akan fatal akibatnya. Oleh karena itu bagi siswa yang tidak cocok dengan pendekatan pembelajaran seperti itu akan menjadi petaka dan akan menjadikan pembelajaran matematika bisa jadi mengerikan atau menakutkan. Peran guru dalam hal ini mestinya dapat memfasilitasi setiap kebutuhan belajar setiap siswa dalam mengembangkan potensinya secara optimal.

Terkait dengan pelaksanaan kurikulum 2013 akan datang maka perlu di pertanyakan apakah guru sudah siap dalam menghadapi perubahan dan pelaksanaan kurikulum tersebut ?. Jangan sampai kurikulumnya berubah tetapi mindset guru tidak berubah. Sama saja antara kurikulum yang sebelumnya dengan kurikulum yang baru. Karena menyangkut perubahan mindset guru, maka tentunya harus disiapkan secara memadai tentang kesiapan guru ini.

Selain itu juga contoh di dalam kehidupan masyarakat, guru dimana-mana tetap menjadi panutan masyarakat, walaupun ada beberapa oknum guru yang melakukan tindakan tidak terpuji. Namun guru sebagai transformer ilmu pengetahuan maka di dalam dirinya harus ada mindset untuk melakukan yang terbaik bagi profesinya sebagai guru dan sebagai pamong maka dia akan membimbing megarahkan siswanya di dalam proses pencarian kebenaran yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Demikian pula guru adalah contoh atau teladan bagi para siswa di dalam pembentukan karakter dan tindakan. Di dalam konteks Jawa, guru disebut kependekan dari kata digugu lan ditiru atau yang diikuti kata-katanya dan diikuti tindakannya.

Guru merupakan garda terdepan dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Gurulah yang akan menentukan apakah pendidikan Indonesia berhasil atau tidak. Sebagai garda terdepan, sesungguhnya para guru telah memperoleh penghargaan sebagai guru profesional, yaitu guru yang telah memperoleh pengakuan sebagai pekerja profesional, sebagaimana dokter, ahli teknik, ahli hukum dan sebagainya. Sebagai pekerja profesional yang diakui oleh undang-undang, maka status guru tentu sangat dihormati. Tidak hanya dari segi pendapatannya, akan tetapi juga dari sisi penghargaan yang layak. Jika dulu para guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa disebabkan oleh kurangnya penghargaan terhadapnya, maka sekarang tentu tidak bisa lagi disebut dengan sebutan tersebut.

Sejalan keberadaan guru tersebut maka peran guru sangat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan kurikulum 2013. Juga bagaimana baiknya kurikulum tersebut tapi peran guru sangat penting. Oleh karena itu perubahan mindset para guru tentu menjadi sangat penting sebagai prasyarat keberhasilan implementasi kurikulum 2013. Dengan demikian, keberhasilan penerapan kurikulum 2013 juga sangat tergantung kepada perubahan mindset para guru di dalam mendidik para siswa. Guru dalam mencernak kurikulum matematika SMA yang sementara ini kurang waktu dan padat materi juga dengan tingkat kesulitan cukup tinggi terutama untuk jurusan IPA, seperti dimensi tiga, trigonometri, turunan, dan intergra. Dengan kurikulum 2013 adanya penambahan waktu jam pelajaran maka peran guru dalam menjawab permasalahan kurang waktu,



Gambar : djadia.blog.widyatama.ac.id

tingkat kesulitan, dan kepadatan materi matematika SMA juga dengan diskusi-diskusi dan diklat maka akan terjawab dengan baik.

Kurikulum sebagai dokumen adalah variabel instrumen keberhasilan pendidikan. Akan tetapi yang menjadi variabel substansialnya adalah para guru. Instrumen musik adalah kumpulan bunyi-bunyian yang akan bisa dinikmati dengan menyenangkan jika dimainkan oleh para pemain musik profesional. Jadi pemain musik yang ahli lah yang akan menentukan apakah sebuah sajian instrumen musik bisa dinikmati atau tidak. Demikian pula guru yang berkualitas lah yang akan menentukan apakah pendidikan akan bisa menjadi wahana bagi pengembangan kapasitas manusia atau tidak.

Dengan demikian, pelatihan intensif, sistimatis, dan berkesinambungan yang dikemas dalam mengembangkan profesionalitas guru menjadi jalan terbaik agar kurikulum 2013 dapat mengantarkan anak Indonesia ke depan lebih berkualitas. Jadi, fungsi guru di dalam diskusi apapun tentang peningkatan pendidikan tetaplah menempati posisi yang sangat penting. Tanpa guru yang baik dan berkualitas rasanya jangan pernah bermimpi bahwa pendidikan Indonesia akan naik peringkat di dalam ranking kualitas pendidikan di dunia.

Dengan guru telah terlatih sebagaimana mestinya, maka guru akan dapat menetapkan dan menggunakan strategi pembelajaran dengan tepat. Oleh karena itu dalam mengimplementasikan kurikulum akan disertai dengan spirit pendidikan yang selalu menggelora pada setiap guru atau pendidik dan peserta didik, maka proses pendidikan itu sendiri tidak terlepas dari rohnyanya. Dalam mengimplementasikan kurikulum, yang jauh lebih penting adalah guru sebagai ujung tombak bahkan bisa menjadi ujung tombok serta garda terdepan dalam melaksanakan kurikulum. Oleh karena itu betapa pentingnya kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum itu selain kompetensi, komitmen dan tanggung jawabnya serta kesejahteraannya yang harus terjaga. Kompetensi guru bukan saja menguasai apa yang harus dibelajarkan (content) tapi bagaimana mengkondisikan belajar bagaimana belajar (learn how to learn) yang menjadikan proses pembelajaran yang menantang, menyenangkan, memotivasi, menginspirasi dan memberi ruang kepada siswa untuk melakukan keterampilan proses yaitu mengobservasi, bertanya, mencari tahu, merefleksi sebagaimana dinyatakan filosof Bertrand Russel "More important than the curriculum is the question of the methods of teaching and the spirit in which the teaching is given". Kurikulum penting, tetapi yang tak kalah pentingnya juga adalah bagaimana strategi membelajarkan dan spiritnya.

Betapapun baiknya kurikulum yang telah dikembangkan, buku pelajaran dan media pembelajaran disediakan serta dilaksanakan Diklat terhadap baik Kepala Sekolah, Pengawas, Guru Inti, Guru Pelatih maupun Diklat guru secara massal pada akhirnya berpulang kepada ada tidaknya kemauan untuk berubah (*willingness to change*) dari para pemangku kepentingan utama pendidikan tersebut.

2. Kesiapan fisik

Kesiapan fisik dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini merupakan kesiapan secara teknis operasional di setiap satuan pendidikan dan bukan dalam arti politis. Kesiapan teknis ini mencakup sumber daya pendukung kegiatan pembelajaran yang berkualitas di sekolah. Sumber daya pendukung ini adalah guru, pelaksana manajemen di setiap satuan pendidikan/kepala sekolah, sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran, pembimbing setiap satuan pendidikan/pengawas sekolah, masyarakat pengguna pendidikan, siswa, dan pemerintah daerah dan dinas pendidikan.

Terutama kesiapan guru matematika di SMA terhadap perubahan dan pelaksanaan kurikulum 2013 ini terutama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sesuai dengan yang di sebutkan dalam Permenegpan dan RB No.16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya pada pasal 1 ayat 2, yaitu : Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dimana pada ayat 3, yaitu : Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik.

Kesiapan guru matematika SMA tersebut dalam melaksanakan tupoksinya adalah kesiapan dalam melaksanakan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi, dan perbaikan dengan pengayaan (*dikjarbing rahtihnelev perbayan*) dengan jumlah jam pelajaran menjadi lebih banyak di banding kurikulum sebelum 2013. Kesiapan guru yang di maksud secara garis besar terdiri dari kesiapan dalam hal :

a. Perencanaan proses belajar mengajar,

Dalam perencanaan pembelajaran guru di kurikulum 2013 sekarang mesti mengikuti perubahan aturan yang membingkai kurikulum tersebut terutama pada perubahan Standar Proses. Dimana guru wajib merancang pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran dari awal hingga penutup agar sesuai tuntutan kurikulum. Dalam standar proses yang semula terfokus pada Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi (EEK) dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta (7M). Juga belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dimana guru bukan satu-satunya sumber belajar dan sikap tidak hanya diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan.

Dengan demikian perencanaan pembelajaran mesti di sesuaikan paradigma kurikulum tersebut. Dimana perencanaan pembelajaran secara garis besar terdiri dari pembuatan : 1) rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 2) lembar kerja siswa (LKS), 3) media pembelajaran dan alat peraga, 4) penataan lingkungan belajar baik lingkungan fisik (kelas) maupun lingkungan sosial, dan 5) kelengkapan lain yang mendukung pelaksanaan pembelajaran dapat optimal dan berkualitas.

Perencanaan pembelajaran ini dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban merencanakan pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

b. Pelaksanaan proses belajar mengajar,

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran dari perencanaan yang telah di siapkan ti mesti mengacu dari perubahan dari standar proses dari EEK dengan 7M nya, belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat, guru bukan satu-satunya sumber belajar, melainkan sumber belajar adalah banyak dengan di kondisikan di bimbing oleh guru.

Guru dalam pembelajaran bukan hanya mengajar tapi juga mendidik dengan

mengembangkan ing ngarsa sung tulada ing madya mangun karsa tut wuri handayani untuk mewujudkan sikap yang di tekankan tidak hanya diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan.

Guru juga memfasilitasi peserta didik menciptakan belajar bagaimana belajar (*learn how to learn*) untuk mewujudkan tuntutan standar proses yaitu EEK dengan 7M dalam mempelajari untuk tahu suatu kompetensi (*learning to know*), dengan belajar melakukan sesuatu perbuatan (*learning to do*), sehingga proses pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Belajar berlangsung dengan kondusif dan berenergi semua apa yang ada di kelas berbicara secara aktif. Peserta didik dapat belajar berkelompok untuk mengembangkan belajar hidup bersama dengan sesama (*learning to live together*) dan di akhir pembelajaran selalu peserta didik di ajar melakukan refleksi terkait belajar untuk memahami dirinya kemampuan apa yang sudah dimiliki dan belum di miliki (*learning to be*) terkait dari kemampuan yang telah di pelajari. Dengan demikian akan terbentuk sikap-sikap yang menjadikan tiap siswa tahu akan kelebihan dan kelemahannya. Hal ini menjadikan tiap peserta didik sadar akan keberadaan dirinya maka perlu belajar untuk selalu melengkapi kekurangannya dan mengembangkan kemampuannya yang ada agar menjadikan dirinya eksis di jaman yang di lalui. Karena kurikulum ini untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa depan melalui pengetahuan, keterampilan, sikap dan keahlian untuk beradaptasi serta bisa bertahan hidup dalam lingkungan yang senantiasa berubah. Disamping itu kurikulum kita ini untuk menyiapkan generasi emas memasuki perkembangan global yang semakin kompetitif dan berorientasi pada keunggulan.

c. Perencanaan dan pelaksanaan penilaian pembelajaran peserta didik

Sebagai bagian penting dalam rangkaian desain kurikulum, dimana standar penilaian juga mengalami perubahan dengan penguatan pelaksanaan agar lebih kongkrit dan berkualitas. Dimanapun penilaian yang mengukur hanya hasil pencapaian kompetensi dan bergeser menjadi penilaian otentik yang mengukur kompetensi sikap, keterampilan, serta pengetahuan berdasarkan hasil dan proses.

Perencanaan penilaian pembelajaran peserta didik di lakukan mengacu silabus dan RPP yang telah di buat. Perencanaan penilaian terdiri dari : penilaian kognitif, psikomotor, dan afektif. Perencanaan penilaian diawali dengan analisis indikator dan kompetensi dasar esensial, pembuatan kisi-kisi penilaian, serta instrumen penilaian. Jenis penilaian tersebut di gunakan untuk penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Penilaian di lakukan pada saat ulangan harian, tugas peserta didik, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Kegiatan penilaian ini sekaligus untuk melihat tingkat ketercapaian kompetensi juga untuk memperbaiki proses pembelajaran.

d. Perencanaan dan pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan peserta didik

Untuk meniadakan ulangan tiap peserta didik, maka perbaikan dan pengayaan. Untuk melakukan perbaikan dan pengayaan maka di perlukan pembuatan perencanaan baik untuk perbaikan dan pengayaan. Hasil ulangan tiap peserta didik setelah di analisis dan di bandingkan dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM), maka akan terlihat peserta didik yang tuntas dan tidak tuntas. Bagi peserta didik yang nilai ulangan sudah mencapai dan melampaui KKM maka di tindaklanjuti pemberian pengayaan. Dengan kegiatan pengayaan maka tiap peserta didik akan dapat mengembangkan kemampuannya hingga optimal. Bagi peserta didik yang nilai ulangan belum mencapai KKM maka akan di berikan perbaikan hingga mencapai KKM. Dengan kegiatan ini tiap peserta didik akan terlayani belajar sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Oleh karena itu dalam hal ini tidak ada istilah siswa mengalami kesulitan belajar

Dari uraian diatas maka dalam menghadapi masalah pendidikan yang paling banyak disorot, baik oleh mereka yang berasal dari lapangan pendidikan, para pengamat pendidikan, maupun masyarakat pada umumnya, adalah masalah rendahnya kualitas proses dan hasil pembelajaran. Maka dengan persiapan sumber daya yang mumpuni maka jawaban mutu pendidikan untuk proses dan hasil yang rendah akan terwujud. Wujud terjadi jika pelaksanaan nyata yang membumi secara berkelanjutan dengan dukungan dari berbagai pihak. Dengan demikian cita-cita pembelajaran matematika bermutu terutama di SMA dan bernilai karakter akan terwujud seperti yang diidamkan.

C. Penutup

Pembelajaran matematika terutama di SMA yang selama ini, cenderung siswa ditanamkan pengetahuan untuk terampil menyelesaikan berbagai soal-soal dengan berbagai trik-trik. Pemahaman tersebut ternyata sejalan dengan kegiatan siswa yang dapat diperoleh dari berbagai kegiatan diluar sekolah seperti melalui bimbingan belajar. Ternyata pemahaman konsep pembelajaran tersebut dalam

situasi global yang mengutamakan membangun manusia kreatif dan inovatif sudah tidak tepat. Situasi pembelajaran tersebut dapat dibenahi melalui implementasi Kurikulum 2013, yang lebih mengedepankan dimensi sikap/karakter dalam pembelajaran. Dimana dalam pembelajaran matematika di SMA akan lebih mengembangkan nilai-nilai sikap siswa baik selama proses dan diluar pembelajaran sehingga menjadi bagian kehidupan siswa sehari-hari.

Dimana pada akhirnya setelah proses pembelajaran setiap siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Dalam proses pembelajaran prinsip yang digunakan adalah: (1) dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu; (2) dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar; (3) dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah; (4) dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi; (5) dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu; (6) dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; (7) dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif; (8) peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik (hardskills) dan keterampilan mental (softskills); (9) pembelajaran yang mengutamakan penguasaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat; (10) pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan member keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ing madyo mangun karso*), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*); (11) pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat; (12) pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas; (13) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan (14) pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Dengan demikian penjelasan (eksplanasi) guru yang bersifat dogmatis, mencontohi, atau menggurui, harus diminimalkan. Guru di kelas hanya sebagai fasilitator kegiatan belajar siswa, sehingga siswa belajar secara bermakna.

Pembentukan karakter dalam implementasi Kurikulum 2013 memerlukan adanya: (1) keteladanan dari orang tua, guru, birokrat pendidikan dan para pemimpin; (2) intervensi melalui proses pembiasaan secara terus-menerus dalam jangka panjang yang dilakukan secara konsisten, agar sikap/perilaku berkarakter terinternalisasi dalam diri siswa; (3) pemberian nasehat dan informasi verbal (sesuai dengan perkembangan nalar siswa); (4) pemberian ganjaran dan atau hukuman/sanksi (*positive & negative reinforcement*); (5) pengkondisian, yakni menjadikan lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat sebagai laboratorium pengamalan nilai-nilai moral dan akhlak mulia yang mendorong dan memudahkan peserta didik mengamalkan nilai-nilai moral dan akhlak mulia.

Dimana agar hal tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik maka proses pengintegrasian dan pelaksanaan nilai-nilai sikap dalam pembelajaran mesti diwujudkan melalui persiapan. Persiapan tersebut meliputi persiapan psikis dan fisik. Persiapan psikis, fokusnya bagaimana mindset guru terhadap aktivitas pembelajaran dan tindaklanjutnya baik mengkondisikan iklim lingkungan sosial dan fisik termasuk respon sikap. Persiapan fisik lingkupnya pada tugas pokok dan fungsi guru pada kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, mengevaluasi, perbaikan dan pengayaan hasil pembelajaran. Fokus dari persiapan fisik guru terhadap pembelajaran terdiri dari perencanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan proses belajar mengajar, perencanaan dan pelaksanaan penilaian pembelajaran peserta didik, dan perencanaan dengan pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan peserta didik

DAFTAR PUSTAKA

- Ipung Yuwono. 2014, Pendidikan Matematika Dan Pendidikan Karakter Dalam Implementasi Kurikulum 2013. Bandung: STKIP Siliwangi
Kusmoro. 2014, Problematika Implementasi Kurikulum 2013 Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014. Pontianak: Makalah diseminarkan pada Forum Ilmiah Guru di Kab.Sintang
Kemendikbud.2013, Permendikbud No.54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta : Biro Hukum dan Organisasi
_____. 2013, Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta : Biro Hukum dan Organisasi
_____. 2014, Hasil monitoring dan Evaluasi pelaksanaan KTSP 2013 terbatas pada tahun 2004. Jakarta: BPSDMP dan PMP
Sri Sukwantini. 2013, Kesiapan Guru Matematika Sma Dalam Menyongsong Pelaksanaan Kurikulum 2013. Pontianak: Buletin Review Edisi 1 Tahun 2013 LPMP Prov. Kalimantan Barat

*Penulis adalah Guru Matematika dari SMAN 1 Pontianak

ANALISIS PENINGKATAN PENGETAHUAN PADA DIKLAT PKB KS/M KOTA SINGKAWANG

Oleh : Suprpti, M.Pd *)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan, besarnya peningkatan pengetahuan dan perbedaan peningkatan pengetahuan antara peserta laki-laki dan peserta perempuan pada Diklat PKB KS/M Kota Singkawang. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan Model Evaluasi Kirkpatrick level 2 (learning). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan alat pengumpul data dengan menggunakan soal pre test dan post test. Data dianalisis menggunakan t-test dan effect size. Hasil t-test (p-value) adalah 0,00058226 yang berarti $\leq 0,05$, menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pengetahuan pada peserta diklat PKB KS/M Kota Singkawang, sedangkan hasil effect size sebesar 0,98294778, yang berarti bahwa peningkatan pengetahuan dalam kategori besar ($\geq 0,8$), serta ada perbedaan yang cukup signifikan peningkatan pengetahuan antara peserta laki-laki dan peserta perempuan, hasil t-test peserta laki-laki (0,0090032) lebih tinggi dibandingkan dengan peserta perempuan (0,03620449).

Kata Kunci : Kirkpatrick, learning, t-test, effect size, PKB .

A. Pendahuluan

Kepala sekolah memiliki posisi strategis yang sangat penting dalam paradigma peningkatan kualitas pendidikan, terutama berkaitan dengan upaya pengembangan sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Hal tersebut menjadi lebih penting sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala sekolah, yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien, untuk itu diperlukan kepala sekolah yang memiliki kompeten.

Usaha peningkatan kompetensi kepala sekolah telah menjadi komitmen pemerintah yang dituangkan dalam Permendiknas nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Kepala Sekolah. Untuk mewujudkan ketercapaian Permendiknas tersebut, pemerintah melakukan kemitraan di bidang pendidikan dengan pemerintah Australia. Salah satu program kemitraan tersebut adalah Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan (*Professional Development for Educational Personnel/ProDEP*). Tujuan dari ProDEP adalah mengembangkan sebuah sistem nasional pengembangan keprofesian tenaga kependidikan, sistem nasional pengembangan keprofesian tersebut dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja kepala sekolah/madrasah. Program pengembangan keprofesian yang dinaungi oleh ProDEP salah satunya adalah program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Sekolah/Madrasah (PKB KS/M). Program PKB KS/M dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan pendekatan *in service learning 1 – on the job learning – in service learning 2*. Diklat PKB KS/M tahun 2014 dilaksanakan melalui modalitas LPMP. Setiap kegiatan diklat akan diukur keberhasilannya, untuk itu perlu dilakukan evaluasi. Metode evaluasi yang digunakan dalam Diklat PKB KS/M adalah model evaluasi Kirkpatrick. Model evaluasi Kirkpatrick adalah suatu model evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang terdiri dari empat level, yaitu reaksi (*reaction*), pembelajaran (*learning*), perilaku (*behavior*), dan hasil (*result*). Alasan menggunakan model evaluasi Kirkpatrick adalah karena Kirkpatrick memiliki beberapa kelebihan, yaitu : sederhana, mudah dipahami, programnya sudah tersedia, banyak digunakan, hasilnya dapat menjelaskan dengan lengkap, dan fleksibel.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

kan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peningkatan pengetahuan pada peserta Diklat PKB KS/M Kota Singkawang?
2. Berapa besar peningkatan pengetahuan pada peserta Diklat PKB KS/M Kota Singkawang?
3. Apakah ada perbedaan peningkatan pengetahuan antara peserta perempuan dengan peserta laki-laki pada Diklat PKB KS/M Kota Singkawang?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Memperoleh gambaran tentang peningkatan pengetahuan pada peserta Diklat PKB KS/M Kota Singkawang.
2. Memperoleh gambaran besarnya peningkatan pengetahuan pada peserta Diklat PKB KS/M Kota Singkawang.
3. Memperoleh gambaran perbedaan peningkatan pengetahuan antara peserta perempuan dan peserta laki-laki pada Diklat PKB KS/M Kota Singkawang.

D. Kajian Teori

1. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Sekolah/Madrasah (PKB KS/M).

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Sekolah/Madrasah (PKB/KS/M) adalah proses dan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap profesional kepala sekolah/madrasah sehingga mampu memperbaiki kualitas manajemen dan kepemimpinan sekolah/madrasah. PKB Kepala Sekolah/Madrasah merupakan salah satu komponen dalam sistem penjaminan dan peningkatan mutu kepala sekolah, dimana PKB dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif.

Secara umum, PKB kepala sekolah/madrasah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kinerja profesional kepala sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didiknya.

PKB kepala sekolah merupakan kegiatan yang berjalan terus-menerus sepanjang karir kepala sekolah. Kepala sekolah/madrasah harus menjadi orang yang terus menerus belajar (*continuous learner*), untuk itu PKB KS/M harus merupakan bagian dari keseluruhan at dengan sistem peningkatan mutu kepala sekolah/madrasah dan mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Setiap upaya yang dilakukan melalui PKB, kepala sekolah/madrasah harus memiliki keterkaitan yang erat dengan kebutuhan akan peningkatan keberhasilan belajar peserta didik. Dengan kata lain, keefektifan PKB KS/M harus diukur dari dampaknya terhadap kinerja kepala sekolah/madrasah dalam konteks peningkatan keberhasilan peserta didik dalam belajar.

PKB KS/M hendaknya tidak dipisahkan dari kegiatan dan tanggungjawab kepala sekolah sehari-hari. PKB KS/M harus melekat pada proses manajemen dan kepemimpinan sekolah sehari-hari, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi semua aktivitas manajemen. PKB KS/M hendaknya dijadikan sebagai proses yang berlangsung alamiah dan terjadi secara rutin.

2. Model Evaluasi Kirkpatrick

Salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pelatihan adalah melalui program pembelajaran, dan evaluasi merupakan salah satu faktor penting program pembelajaran. Untuk meningkatkan kualitas pelatihan tersebut, pelaksanaan evaluasi harus menjadi bagian penting dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Di samping evaluasi berguna bagi lembaga sebagai upaya untuk memotret sistem pelatihan yang menjadi tanggung-jawabnya, evaluasi juga dapat menumbuhkan minat dan motivasi peserta pelatihan untuk belajar lebih giat lagi, dan juga untuk mendorong pelatih agar lebih meningkatkan kinerja dalam berkarya sebagai pelatih profesional. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya terfokus pada penilaian hasil pelatihan semata, melainkan pula perlu didasarkan pada penilaian terhadap input maupun proses pembelajaran itu sendiri. Dalam konsep ini, optimalisasi sistem evaluasi mempunyai dua makna, yakni sistem evaluasi yang memberikan informasi yang optimal, dan manfaat yang dicapai dari evaluasi tersebut. Manfaat utama dari pelaksanaan evaluasi pelatihan adalah meningkatkan kualitas pelatihan. Oleh karena itu, dilaksanakannya evaluasi terhadap program pelatihan diharapkan akan meningkatkan kualitas proses pelatihan berikutnya yang tentunya akan meningkatkan kualitas pelatihan pada umumnya.

Dalam konteks program pelatihan di suatu instansi khususnya di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), evaluasi pada program pelatihan membutuhkan data tentang pelaksanaan pelatihan dan tingkat ketercapaian tujuannya. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, dalam rangka mengevaluasi sejauh mana tujuan yang sudah ditetapkan sudah tercapai atau terlaksana di dalam proses pelaksanaan pelatihan. Ada beberapa model evaluasi yang dapat digunakan dalam melaksanakan evaluasi, namun dalam penelitian ini akan difokuskan pada model evaluasi Kirkpatrick karena dianggap paling tepat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pelatihan. Model evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick ini dikenal dengan Evaluating Training Programs : *The Four Levels* atau *Kirkpatrick Evaluation Model*. Menurut Kirkpatrick, evaluasi terhadap program pelatihan mencakup empat level evaluasi, yaitu reaksi (*reaction*), pembelajaran (*learning*), perilaku (*behavior*), dan hasil (*result*).

Dari empat level evaluasi di atas, dalam penelitian ini hanya akan fokus pada level dua yaitu *learning*, dimana pada level ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana daya serap peserta pada materi yang telah diberikan dalam diklat PKB KS/M Kota Singkawang. Menurut Kirkpatrick, bahwa evaluasi pembelajaran ini untuk mengetahui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh dari materi pelatihan. Oleh karena itu diperlukan tes guna mengetahui kesungguhan apakah para peserta mengikuti dan memperhatikan materi pelatihan yang diberikan. Data evaluasi pembelajaran diperoleh dengan membandingkan hasil dari pengukuran sebelum pelatihan atau tes awal (*pre test*) dan sesudah pelatihan atau tes akhir (*post test*) dari setiap peserta. Pertanyaan-pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga mencakup semua isi materi dari pelatihan. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui signifikansi dihitung dengan menggunakan rumus t-test, sedangkan untuk mengetahui besarnya pembelajaran dihitung dengan menggunakan rumus *effect size*.

3. Uji T (T-Test)

Uji t (*t-test*) merupakan uji komparatif untuk menilai perbedaan antara nilai tertentu dengan rata-rata kelompok populasi. t-test disebut juga dengan istilah one sample t-test atau uji t satu sampel. Karena t-test dalam penelitian ini hanya menggunakan satu sampel yaitu kelas 'C' pada Diklat PKB KS/M Kota Singkawang. Data yang digunakan untuk menghitung t-test adalah nilai pre test dan nilai post test. Nilai pre test bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta sebelum mengikuti Diklat PKB KS/M, sedangkan post test dilakukan untuk mengetahui hasil belajar peserta setelah mengikuti diklat PKB KS/M. Kemudian hasil pre test dan post test di analisis untuk mengetahui besarnya pembelajaran. Dalam meng-

hitung t-test menggunakan *probability value* (*p-value*) atau tingkat signifikansi. Secara umum p-value diambil 5%, artinya bahwa toleransi kesalahan dari hasil suatu perlakuan hanya 5%. Jika p-value dari hasil t-test diperoleh $\leq 0,05$ maka dinyatakan bahwa telah terjadi peningkatan belajar pada peserta diklat dengan keyakinan 95%, dan apabila p-value dari hasil t-test diperoleh $\geq 0,05$ maka dinyatakan bahwa tidak terjadi peningkatan belajar pada peserta dengan keyakinan 95%. Adapun penghitungan t-test dalam penelitian ini menggunakan fasilitas *microsoft office excel* dengan cara sebagai berikut :

- Entry data nilai *pre test* dan *post test* pada kolom yang berbeda
- Pilih menu *fx* pada menu bar, pilih kategori statistical, pilih *t-test*, kemudian klik OK
- Letakkan kursor di array 1, kemudian blok data nilai *pre test*
- Letakkan kursor di array 2, kemudian blok data nilai *post test*
- Ketik 2 pada kolom tails, dan ketik 1 pada kolom type, kemudian klik OK

4. Effect Size

Effect size (ukuran efek) adalah besarnya efek atau pengaruh yang ditimbulkan oleh parameter yang diuji. *Effect size* tergantung kepada jenis parameter yang diuji. Dalam penelitian ini, *effect size* dihitung untuk mengetahui besarnya peningkatan belajar peserta setelah mengikuti diklat PKB KS/M Kota Singkawang. Dimana dalam menghitung *effect size* peneliti menggunakan *effect size* menurut Cohen, yaitu dengan menghitung selisih rerata yang dinyatakan dalam satuan simpangan baku atau standar deviasi. Penghitungan *effect size* dilakukan apabila hasil penghitungan t-test (*p-value*) $\leq 0,05$ Adapun rumus *effect size* menurut Cohen sebagai berikut :

$$\text{Effect Size (ES)} = \frac{\bar{Y}_e - \bar{Y}_c}{S_c}$$

Keterangan :

\bar{Y}_e = Rerata *Post Test*

\bar{Y}_c = Rerata *Pre Test*

S_c = Standar Deviasi *Pre Test*

Apabila $ES < 0,2$ maka pengaruh/efektivitas tergolong rendah/kecil. Jika $0,2 < ES < 0,8$ maka pengaruh/efektivitas tergolong sedang, dan jika $ES > 0,8$ maka pengaruh/efektivitas tergolong tinggi/besar.

F. Metode Penelitian

Peserta Diklat PKB KS/M Kota Singkawang sebanyak 29 orang kepala sekolah/madrasah, yang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Kegiatan diklat dilaksanakan pada tanggal 13 s/d. 17 Oktober 2014, bertempat di Hotel Gajah Mada Pontianak. Penelitian ini menggunakan model evaluasi Kirkpatrick level 2 (*learning*), dengan metode penelitian kuantitatif. Model evaluasi Kirkpatrick level 2 (*learning*) bertujuan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan peserta diklat. Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan peserta dalam mengikuti diklat, ada dua instrumen yang dapat digunakan yaitu pre test dan post test. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil analisis dari pre test dan post test yang telah dilakukan oleh peserta diklat PKB KS/M Kota Singkawang.

F. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil dan Pembahasan Peningkatan Pengetahuan (Penghitungan t-test)

Berdasarkan penghitungan peningkatan pengetahuan peserta diklat PKB KS/M Kota Singkawang dengan t-test diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1 : Hasil Penghitungan *t-test*

No.	Penghitungan	Hasil <i>t-test</i>
1.	<i>t-test</i> Kelas	0,00058226
2.	<i>t-test Male</i> / Laki-Laki	0,0090032
3.	<i>t-test Female</i> / Perempuan	0,03620449

(Sumber : Data LPMP Provinsi Kalbar, Tahun 2014)



Foto : Rostini

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa p -value dari hasil t -test diperoleh $\leq 0,05$, yaitu 0,00058226 dengan taraf keyakinan 95%. Hasil tersebut dapat dimaknai bahwa secara klasikal (kelas) telah terjadi peningkatan pengetahuan yang cukup signifikan pada peserta Diklat PKB KS/M kota Singkawang. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan peserta diklat 95% dikarenakan faktor kegiatan dalam proses pembelajaran selama diklat dan yang 5% disebabkan karena faktor-faktor lain.

Hasil penghitungan t -test untuk peserta laki-laki adalah 0,0090032, sedangkan hasil penghitungan t -test untuk peserta perempuan adalah 0,03620449. Karena hasil t -test (p -value) $\leq 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa telah terjadi peningkatan pengetahuan baik pada peserta laki-laki maupun pada peserta perempuan, meskipun peserta laki-laki peningkatan pengetahuannya lebih tinggi dibandingkan dengan peserta perempuan. Dimana peningkatan pengetahuan peserta diklat 95% dikarenakan faktor kegiatan dalam proses pembelajaran selama diklat dan yang 5% disebabkan karena faktor-faktor lain.

Karena hasil t -test $\leq 0,05$ yang berarti terjadi peningkatan pengetahuan, maka bisa dilanjutkan dengan menghitung besarnya peningkatan pengetahuan dengan menggunakan *Effect Size*.

2. Hasil dan Pembahasan Besarnya Peningkatan Pengetahuan (Penghitungan *Effect Size*)

Berdasarkan penghitungan besarnya peningkatan pengetahuan peserta diklat PKB KS/M Kota Singkawang dengan menggunakan *Effect Size* diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2 : Hasil Penghitungan *Effect Size*

No.	Penghitungan	Hasil <i>Effect Size</i>
1.	<i>Effect Size Kelas</i>	0,98294778
2.	<i>Effect Size Male / Laki-Laki</i>	0,84361202
3.	<i>Effect Size Female / Perempuan</i>	1,1469E-15

(Sumber : Data LPMP Provinsi Kalbar, Tahun 2014)

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa hasil *effect size* kelas pada diklat PKB KS/M Kota Singkawang adalah 0,98294778, yang berarti bahwa hasil *effect size* kelas $\geq 0,8$ termasuk kategori besar. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pengetahuan yang besar pada peserta setelah mengikuti pembelajaran secara tatap muka pada diklat.

Namun ada perbedaan yang cukup signifikan antara peserta laki-laki dengan peserta perempuan, dimana peserta laki-laki ada peningkatan dengan kategori besar (0,84361202), sedangkan pada peserta perempuan hanya terjadi peningkatan pengetahuan dengan kategori rendah/kecil (1,1469E-15).

G. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penghitungan dengan t -test dan *effect size* di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Telah terjadi peningkatan pengetahuan pada peserta Diklat PKB KS/M Kota Singkawang, dengan hasil t -test (p -value) adalah 0,00058226.
- Ada peningkatan pengetahuan yang besar pada peserta Diklat PKB KS/M Kota Singkawang setelah mengikuti kegiatan diklat, dengan hasil *effect size* sebesar 0,98294778 (kategori besar).
- Ada perbedaan yang cukup signifikan peningkatan pengetahuan antara peserta laki-laki dan peserta perempuan, hasil t -test peserta laki-laki (0,0090032) lebih tinggi dibandingkan dengan peserta perempuan (0,03620449).

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan peserta pada pelatihan selanjutnya, yaitu :

- Bagi Instansi (LPMP Provinsi Kalimantan Barat), perlu mempertimbangkan kegiatan-kegiatan pendampingan yang lain, khususnya untuk kepala sekolah.
- Bagi pengawas sekolah pendamping, hendaknya memberikan pembimbingan dan pendampingan secara maksimal kepada kepala sekolah dalam pelaksanaan OJL PKB KS/M.
- Bagi peserta diklat (Kepala Sekolah), perlu meningkatkan frekuensi belajar secara mandiri maupun kelompok untuk lebih memahaminya BPU yang menjadi pilihan/prioritasnya.

H. Bahan Referensi

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.
- Kirkpatrick, D., 1998, Evaluating Training Programs : The Four Levels (2nd ed), San Fransisco : Berrett-Koehler Publisher, Inc.
- Depdiknas, 2010, PERMENDIKNAS Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Jakarta:Depdiknas
- Kemendikbud, 2014, Modul Pelatihan : Program Pendampingan Kepala Sekolah Oleh Pengawas Sekolah, Jakarta: Pusbangtendik, BPSDMPK dan PMP.
- Kemdikbud, 2014, Pelaksanaan Pelaksanaan : Program PKB Kepala Sekolah/Madrasah, Jakarta : Pusbangtendik, Kemdikbud

*) Penulis adalah Widayaiswara LPMP Provinsi Kalbar

PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU

Oleh : Etty Lestari
(Widyaiswara LPMP Prov. Kalbar)

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hal utama dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, sangat penting bagi seorang guru yang bertugas mendidik, melayani peserta didik, dan membimbing dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum bisa menjadi bisa, bahkan diharapkan mampu mengubah perilaku yang tidak baik menjadi baik. Dalam perkembangan pendidikan, zaman yang telah berubah, manusia di dunia ini telah mengalami perubahan dan mengikuti zaman. Demikian juga seorang guru haruslah melakukan perubahan dan perbaikan demi pelaksanaan pembelajaran, sehingga peserta didik mampu dan berhasil dalam memperoleh hasil belajar dengan baik. Usaha guru dalam melaksanakan pembelajaran dapat dilakukan dengan mempersiapkan diri baik dari perangkat pembelajarannya maupun media yang harus digunakan tentulah yang sesuai dengan materi dan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didiknya. Jadi, memilih dan menerapkan media harus yang tepat agar media yang digunakan membantu pemahaman materi yang harus diperoleh oleh peserta didik.

Kenyataan di lapangan, bahwa guru mengajar tanpa memperhatikan persiapan mengajarnya, bahkan sebagian guru hanya memanfaatkan buku sebagai pegangan dalam melaksanakan pembelajaran. Persiapan pembelajaran untuk penilaian angka kredit guru dalam rangka pengembangan profesi guru. Namun, guru belum mampu dikarenakan banyak guru yang pangkatnya masih terhenti di golongan IV/a. Selain itu, guru belum memiliki kemampuan untuk membuat media pembelajaran yang tepat untuk membantu proses pembelajaran agar mempermudah pemahaman materi pembelajarannya di kelas, sedangkan guru yang sudah berusaha mengirim media pembelajaran untuk angka kreditnya pada umumnya ditolak karena tidak memenuhi syarat ketentuan penilaian kinerja guru.

Hal ini sesuai dengan Peraturan antara lain; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Selain itu, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor: 0433/P/1993, Nomor: 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Oleh karena itu, guru perlu mempersiapkan diri untuk membuat/merancang media yang tepat sesuai persyaratan penilaian agar dapat dimanfaatkan sebagai upaya pengembangan profesi guru dan yang utama adalah membantu pemahaman materi pembelajaran.

B. PERMASALAHAN

Usaha untuk meningkatkan perbaikan dalam bidang pendidikan terus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini terwujud dengan adanya pelatihan-pelatihan yang sering dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi maupun di tingkat daerah. Bahkan sekolah-sekolah melalui program peningkatan mutu gurunya, kepala sekolah berusaha menyusun program peningkatan mutu guru agar meningkat kompetensi profesionalnya sebagai guru dan pada akhirnya mampu menghasilkan peserta didik yang berprestasi. Namun, hal ini tidak diikuti oleh semua kepala sekolah maupun pihak-pihak berwenang yang memiliki kebijakan dalam meningkatkan mutu guru. Masih banyak guru-guru di sekolah-sekolah di daerah yang belum mengikuti pelatihan maupun bimbingan dalam

meningkatkan kompetensi keprofesionalannya baik sebagai guru mata pelajaran maupun sebagai guru kelas.

Guru-guru di sekolah masih kesulitan dalam mengembangkan dirinya dalam meningkatkan kompetensi profesional maupun pedagogik. Guru-guru pangkatnya terhenti karena tidak lagi mampu mengembangkan dirinya dan memenuhi aturan dalam kenaikan pangkat dan jabatannya. Banyak guru-guru yang terhenti pada pangkat dan golongan VI a, karena belum mampu melengkapi syarat yang harus dipenuhinya. Demikian juga halnya petugas yang sebagai Tim penilai kinerja guru belum mampu melaksanakan tugasnya sebagai penilai kinerja guru maupun kepala sekolah sehingga guru dan kepala sekolah yang mengajukan pangkat belum dapat terpenuhi. Banyak guru dan kepala sekolah yang mengajukan karya tulis selalu mendapat penolakan karena tidak memenuhi standar penilaian karya tulis. Selain itu, guru-guru belum mampu mengembangkan dirinya dalam membuat alat peraga ataupun media yang dapat mempermudah pemahaman materi pelajaran. Padahal apabila hal ini dapat dilakukan oleh guru, hal ini dapat digunakan sebagai bahan untuk penilaian kinerja guru. Baik dalam hasil pembuatan alat atau media pembelajaran maupun hasil laporan penggunaan alat atau media tersebut. Hal ini semua yang menyebabkan guru belum mampu meningkatkan kompetensi maupun naik dalam keangkatannya karena terhenti pada golongan IV a. Diharapkan guru-guru mampu membuat dan memanfaatkan media pembelajaran sebagai upaya pengembangan profesi pendidik.

II. KAJIAN LITERATUR DAN PEMBAHASAN

Untuk meningkatkan kompetensi guru agar mampu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah yaitu menghasilkan peserta didik yang mampu menjadi generasi muda sebagai pengganti generasi sebelumnya. Guru berperan penting dalam menyiapkan generasi penerus bangsa ini. Oleh karena itu, sebagai seorang guru perlu meningkatkan kompetensinya agar mampu meningkatkan hasil belajar peserta didiknya pula. Dengan demikian, dapat pula mendapatkan penilaian kinerjanya dalam jabatan dan angka kreditnya agar tidak lagi terhenti pada pangkat dan golongan IV/a. Namun, dapat meningkatkan kompetensinya dalam membuat media ataupun alat peraga yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran di kelas dan dapat digunakan untuk mengajukan hasilnya sebagai hasil penilaian kinerja untuk angka kredit guru.

Jadi, media yang dimaksud adalah media pembelajaran. Hal ini penting bagi guru untuk membantu kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Seperti pendapat Briggs (1977) *media pembelajaran* adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti: buku, film, video dan sebagainya. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau keterampilan pebelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran / pelatihan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran ataupun bagi guru itu sendiri untuk keperluan angka kreditnya, perlu dipikirkan dan diwujudkan oleh seorang guru agar semua ini dapat tercapai. Agar lebih jelasnya hal ini akan diuraikan di bawah ini.

1. Alat pelajaran/alat peraga dan alat bimbingan

Alat pelajaran/peraga adalah alat yang digunakan untuk memperagakan atau membantu pembelajaran sehingga lebih memperjelas fakta, konsep, prinsip atau prosedur tertentu agar tampak lebih nyata. Alat peraga yang sesuai kriteria:

- 1) Poster/gambar: gambar system, benda atau makhluk, sudah dimodifikasi, belum ada di tempat tugas, dilapis laminating, dan dibingkai.

- 2) Alat permainan: sudah dimodifikasi atau belum ada di daerah guru bertugas, memiliki bentuk atau ditulis dengan rapih.
- 3) Model benda/barang atau alat tertentu: sudah dimodifikasi atau belum ada di daerah guru bertugas, dicat.
- 4) Benda potongan (cutaway): sudah dimodifikasi, atau ada di daerah guru bertugas, menunjukkan bagian benda secara jelas, dicat.
- 5) Film/video: sudah dimodifikasi atau belum ada di daerah guru bertugas, memiliki tulisan atau narasi (dengan software Movie Maker dll, kreasi baru/terdapat inovasi).

Dalam membuat alat peraga ini juga harus memperhatikan syaratnya yaitu:

- 1) Bersifat permanen (dapat digunakan secara berulang).
- 2) Bila berupa alat, menunjukkan asli kreasi sedangkan pembuatan dapat dibantu orang lain (tetapi boleh semua buat orang lain).

Keuntungan membuat alat peraga atau karya teknologi tepat guna dalam rangka pengembangan profesi guru.

- 1) Alat peraga/karya teknologi tepat guna dapat memiliki nilai/angka kredit tersendiri.
- 2) Alat peraga/karya teknologi tepat guna dapat digunakan sebagai alat action/intervensi pada penelitian tindakan kelas atau penelitian eksperimen, dan laporan penelitian tersebut tetap dapat memperoleh nilai/angka kredit tersendiri.
- 3) Format laporannya tidak rumit.

Contoh format laporan pembuatan alat peraga dan penemuan teknologi tepat guna

- Halaman judul, yaitu memuat judul karya, nama penemu, NIP dan nama sekolah/lokas
- Halaman pengesahan, yaitu memuat identitas penemu dan pejabat yang mengesahkan.
- Halaman pernyataan dari penemu/pembuat bahwa karya teknologi tepat guna/alat peraga ini benar-benar asli hasil karyanya.
- Daftar isi
- Daftar gambar.

Contoh Kerangka Laporan:

- A. Nama Karya
- B. Tujuan
- C. Manfaat
- D. Rancangan/desain alat peraga/karya teknologi tepat guna (dilengkapi dengan gambar rancangan atau diagram alir dan daftar alat dan bahan yang digunakan).
- E. Prosedur pembuatan alat peraga/karya teknologi tepat guna (dilengkapi dengan foto pembuatan).
- F. Prosedur pembuatan alat peraga/karya teknologi tepat guna di sekolah (dilengkapi dengan foto penggunaan).
- G. Lampiran (bila belum ada di dalam narasi, maka lampirkan foto pembuatan dan foto penggunaan, pengakuan masyarakat /pejabat, dan hal lain yang mendukung).

2. Alat Bimbingan

Alat bimbingan yaitu alat yang digunakan untuk membantu pembimbingan sehingga proses bimbingan lebih mudah, efektif, dan efisien.

3. Contoh Alat Peraga berupa Program Aplikasi Komputer:

- a. Berupa program aplikasi untuk memperjelas/memperagakan pokok bahasan/standar kompetensi/beberapa kompetensi dasar, dengan menggunakan Power Point+film, Micromedia Flash, Visual basic atau program lain (untuk 4 X pertemuan/4 minggu).
- b. Memiliki inovasi (terdapat hal baru yang berbeda dengan yang ada sebelumnya).

4. Contoh Program video dapat diselipkan gambar foto + tulisan penjelasan:

- a. Siapkan foto yang akan diberi penjelasan.
- b. Bukalah program power point.
- c. Copy foto ke Slide
- d. Beri narasi teks.
- e. Masukkan ke Movie Maker.

5. Contoh Media sederhana (bahan bekas dari kardus)

- a. Siapkan kardus bekas, lalu gunting dengan ukuran 7 X 7 cm
- b. Tulislah huruf sesuai urutan abjad tiap potongan dengan spidol warna agar menarik.
- c. Manfaatkanlah pada kegiatan calistung pada kelas satu atau kelas dua, caranya:
 - a) Siapkan potongan kardus yang masih lebar untuk peserta didik,
 - b) Siapkan gunting, spidol, kardus (tempat untuk potongan kardus),
 - c) Ajaklah peserta didik untuk membuat keterampilan memotong/menggunting kardus dengan ukuran 7 X 7 cm,
 - d) Berilah kesempatan untuk berkelompok 4 s.d 5 orang
 - e) Ajaklah peserta didik menulis huruf di udara dengan gerakan tangan,
 - f) Tunjukkan contoh kartu huruf tadi pada peserta didik,
 - g) Guru memberikan contoh gerakan menulis di papan tulis,
 - h) Mulailah menulis huruf [a] masing-masing peserta didik, (keterampilan menulis)
 - i) Setiap peserta didik diminta mengangkat menunjukkan hasilnya/tunjukkan pada kawan di dekatnya/di kelompok lainnya, (keterampilan membaca)
 - j) Masing-masing kelompok menghitung ada berapa hasil tulisan yang telah berhasil mereka tulis (keterampilan berhitung). Demikian seterusnya pada kegiatan menulis huruf-huruf yang lainnya,
 - k) Pada pertemuan berikutnya apabila sudah terkumpul beberapa jenis huruf baik huruf vocal maupun konsonan, maka guru dapat mengajak peserta didik untuk belajar menata huruf menjadi suku kata, dan selanjutnya menjadi kata. Lakukan hal ini selama masa pembelajaran. Kegiatan keseluruhan dapat dilakukan selama ± 2 minggu, maka peserta didik akan dapat menulis, membaca dan berhitung sesuai kompetensi yang akan dicapai.

6. Karya Teknologi Tepat Guna

Karya ini dapat dibuat oleh guru-guru baik di kota besar maupun yang ada di daerah.

Pengertian Teknologi Tepat Guna

Teknologi Tepat guna adalah sebuah teknologi yang ditemukan atau diciptakan dengan tujuan untuk semakin meningkatkan atau membuat pekerjaan manusia semakin lancar. Hal ini kemudian bisa meningkatkan nilai ekonomi juga. Teknologi tersebut tidak hanya asal dibuat namun dibuat dengan tepat sesuai dengan kebutuhan manusia. Begitu pula bidang pendidikan. Pendidikan hanya dikenal dengan proses pengajaran di dalam kelas menggunakan papan tulis dan kapur tulis yang berdebu. Kemudian menggunakan papan tulis dengan spidol belakangan menggunakan laptop dan proyektor, pembelajaran melalui video, internet dan sebagainya. Oleh karena itu, guru juga dapat membuat teknologi tepat guna yang tepat dan berhasil guna dalam pembelajaran atau di bidang pendidikan lainnya. Berdasarkan Permendikbud Nomor 25/O/1995, Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang menggunakan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi/ada secara berdayaguna dan berhasilguna atau untuk melaksanakan tugas sehari-hari menjadi lebih mudah, murah, dan sederhana. Jadi, dalam lingkup pendidikan, guru dapat membuat media sesuai dengan kondisi dan situasi serta materi yang akan dibahas dalam pembelajaran di sekolah. Untuk hal ini dapat memperhatikan beberapa kriteria yaitu:

- a. Berupa teknologi tepat guna dalam proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling.
- b. Teknologi tersebut bersifat lebih memudahkan pelaksanaan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling dengan hasil yang lebih baik atau lebih optimal.
- c. Bukti fisiknya untuk pemanfaatan nilai angka kredit yaitu uraian tertulis tentang cara pembuatan dan penggunaan yang dilengkapi dengan gambar dan lain-lainnya yang dianggap perlu.
- d. Untuk tim penilai angka kredit yaitu harus memperhatikan perangkat keras yang sesuai dengan criteria antara lain:
 - a) Merupakan penemuan baru, belum ada sebelumnya.
 - b) Pernah ada tetapi memiliki tingkat modifikasi yang tinggi (70%).
 - c) Pernah ada tetapi memiliki system yang berbeda, lebih baik, lebih



efektif, atau lebih efisien.

e. Berupa perangkat keras:

- a) Memiliki konstruksi yang sistematis, memiliki rangkaian systruktur tertentu (jadi tidak terlalu sederhana, misalnya: hanya terdiri dari satu batang atau satu bahan).
- b) Menggunakan bahan yang ada di sekitarnya, tetapi tidak mesti dari tumbuhan atau barang bekas. Jadi yang penting bahannya yang mudah ditemukan di sekitarnya.

f. Berupa perangkat lunak:

- a) Memiliki alur kerja yang sistematis, memiliki rangkaian struktur tertentu (jadi tidak terlalu sederhana, misalnya: hanya terdiri dari satu atau dua langkah).
- b) Menggunakan software yang ada di sekitarnya.
- c) Untuk kategori bidang pendidikan: dapat digunakan di kelas dalam proses pembelajaran.
- d) Untuk kategori bidang umum: dapat bermanfaat untuk masyarakat atau dapat digunakan untuk pendidikan.
- e) Bersifat permanen (dapat digunakan secara berulang).
- f) Jika berupa alat, menunjukkan kerapihan pembuatan (tidak asal jadi), rancangan harus asli temuan sendiri sedangkan pembuatan dapat dibantu orang lain (tetapi tidak boleh semuanya dibuatkan orang lain).

g. Manfaat Media Pembelajaran:

- a) Memperlancar proses interaksi
- b) Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan
- c) Proses pembelajaran menjadi menarik
- d) Proses pembelajaran menjadi interaktif
- e) Jumlah waktu pembelajaran dapat dikurangi
- f) Kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan
- g) Proses belajar dapat terjadi dimana dan kapan saja
- h) Meningkatkan sikap positif siswa
- i) Peran guru lebih positif dan produktif
- j) Mengatasi keterbatasan ruang
- k) Menimbulkan pengalaman sama

III. PENUTUP

1. Simpulan

Pemanfaatan media pembelajaran sangat penting bagi guru dalam melaksanakan kegiatan mengajar di kelas. Hal ini penting karena dengan guru menggunakan media peserta didik akan lebih mudah dan terbantu dalam memahami materi pelajaran. Seperti yang diuraikan oleh Briggs (1977) media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti : buku, film, video dan sebagainya. Tentulah dalam memanfaatkan media haruslah sesuai dengan materi dan pembahasannya, sehingga peserta didik memperoleh manfaatnya juga dalam memahami materi. Media pembelajaran ada berbagai jenis, oleh karena itu guru dapat memilih media yang tepat sesuai dengan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik.

Untuk mempermudah pemahaman, guru juga dapat mem-

buat media sendiri baik yang bentuk alat peraga ataupun media lainnya. Selain itu, media yang dibuat dan pemanfaatannya dalam pembelajaran dibuat laporan, maka guru akan mendapat keuntungan dalam memperoleh penilaian kinerjanya yang dapat dipergunakan untuk kenaikan pangkat/golongan. Selain itu, guru juga dapat membuat media lain yang berupa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dengan mudah dan sederhana serta pembuatannya dapat menggunakan bahan yang ada di lingkungan guru. Hal ini sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam mengumpulkan angka kredit guru untuk kenaikan pangkat tersebut sebagai pengembangan profesi guru.

2. Saran

Berdasarkan uraian di atas, disarankan pada:

- a. Guru agar menjadi guru yang profesional, mempersiapkan diri dalam persiapan pembelajaran baik dari perangkat administrasi maupun media dan alat penilaian yang akan digunakan saat proses pembelajaran. Selain itu, guru dapat memanfaatkan media yang ada di lingkungan sekolah bahkan dapat membuat sendiri dengan alat yang sederhana sesuai dengan materi atau pokok pembelajaran/KD yang akan dicapai agar pembelajaran menarik dan materi pembelajaran mudah dipahami peserta didik. Selain itu, media hasil karya sendiri dapat digunakan sebagai hasil untuk penilaian angka kredit guru.
- b. Bagi kepala sekolah hendaknya memberikan motivasi pada guru agar memanfaatkan media yang ada di sekolah. Demikian juga bagi pengawas hendaknya mampu membina guru-guru di sekolah bi-naannya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.

DAFTAR REFERENSI

- <https://herminegari.wordpress.com/../> Fungsi-dan-manfaat media pembelajaran. di akses 1 Oktober 2015
- Kemendikbud. 1993. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor: 0433/P/1993. Nomor: 25 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Jakarta: Demendikbud.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Sanjaya, Wina. 2007. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Prenada Media.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

PENTINGKAH PKB KS/M DALAM MENGEMBANGKAN KEPROFESIAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh : Dr.Herlina,SE,M.Pd (Widyaiswara LPMP)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepala sekolah memiliki posisi strategis yang sangat penting dalam paradigma peningkatan kualitas pendidikan terutama berkaitan dengan upaya pengembangan sekolah. Permendiknas 13 Tahun 2007 mengenai Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah menggariskan lima kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah dalam menjalankan tupoksinya. Penjabaran mengenai kompetensi kepala sekolah diperkuat dengan lahirnya Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Dalam permendiknas tersebut secara eksplisit dijelaskan bahwa seorang kepala sekolah harus senantiasa melakukan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan melalui program yang disebut Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) kepala sekolah/madrasah.

Begitu pentingnya peran kepala sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah, sehingga dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya kegiatan di sekolah sebagian besar sangat ditentukan oleh kualitas kepala sekolahnya. Untuk itu, sangat diperlukan peningkatan kompetensi seorang kepala sekolah yang salah satunya dilakukan melalui kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKB) Kepala Sekolah/Madrasah.

Mulai tahun 2014 ini, Pemerintah Australia melalui program kemitraan pendidikan dengan Pemerintah Indonesia (*Australia's Education Partnership with Indonesia/AEPI*) memberikan dana hibah untuk melakukan beberapa kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan. Ada empat program kegiatan yang dilaksanakan dengan dana hibah tersebut yakni, Program Pengembangan Kapasitas Pendidikan Pemerintah Daerah (PPKPPD) di Kabupaten/Kota dan Provinsi, Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS), Program Pendampingan Kepala Sekolah oleh Pengawas Sekolah (PPKSPS) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Sekolah (PKBKS/M). Keempat program tersebut dikemas dalam suatu program pengembangan keprofesian kependidikan yang disebut ProDEP (*Profesional Development for Educational Personnel*).

Di tahun 2014 Kegiatan PKBKS/M dilingkungan LPMP Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan 3 (tiga) angkatan untuk 9 (sembilan) Kabupaten/Kota sasaran ProDEP yakni Kabupaten Melawi, Sintang, Sanggau, Kubu Raya, Kayong Utara, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya dan Sambas, dengan jumlah peserta semuanya berjumlah 72 pengawas sekolah/madrasah dan 360 kepala sekolah/madrasah jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Namun di Tahun 2015 kegiatan PKB KS/M yang dilaksanakan oleh LPMP Prov.Kalbar terhenti sementara, dan dilanjutkan oleh PPPPTK TK dan PLB.

Sebelum program PKB KS/M dimulai, terlebih dahulu dilaksanakan program pendampingan kepala sekolah oleh pengawas sekolah/madrasah (PPKSPS/M) bagi pengawas sekolah di 9 kabupaten/kota sasaran tersebut dalam rangka mempersiapkan kompetensi pengawas sekolah/madrasah agar mampu mendampingi pelaksanaan PKB KS/M binaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan kami kepada beberapa pengawas dan kepala sekolah Kabupaten Melawi pada saat pelatihan PKB KS/M maupun pada saat monitoring dan pendampingan OJL PKB KS/M salah satu kesulitan ataupun kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah/madrasah adalah kesulitan dalam memenuhi tagihan-tagihan yang dipersyaratkan dalam masing-masing Bahan Pembelajaran Utama (BPU) yang mereka ambil, dikarenakan mereka harus mengambil 2 BPU sekaligus dalam waktu yang sangat singkat. Untuk itu diperlukan optimalisasi dari peran pengawas sekolah dalam pendampingan pelaksanaan PKB KS/M binaannya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dilampirkan adalah sebagai berikut:

1. ketidakpahaman kepala sekolah/madrasah terhadap pentingnya pengembangan keprofesian berkelanjutan kepala sekolah (PKB KS/M) dalam rangka peningkatan karirnya
2. kesulitan dalam memenuhi tagihan-tagihan yang dipersyaratkan dalam Bahan Pembelajaran Utama (BPU) yang mereka ambil dikarenakan mereka harus mengambil 2 BPU sekaligus dalam waktu bersamaan. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman peserta pada saat menerima materi pelatihan dan juga dikarenakan masih belum optimalnya pendampingan yang dilakukan oleh pengawas pada saat OJL PKB KS/M.
3. kebijakan dari pemerintah daerah kabupaten berkenaan dengan mutasi/perpindahan kepala sekolah binaan dan pengawasnya, sehingga me-

nyulitkan pengawas sekolah dan kepala sekolah pada saat melakukan pendampingan OJL PKB KS/M.

4. Adanya perubahan kebijakan di tingkat pusat sehingga menyulitkan KS/M jenjang SD untuk melanjutkan PKB KS/M di tahun berikutnya.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah "Peningkah PKB KS/M sebagai suatu sistem pengembangan keprofesian berkelanjutan kepala Sekolah/Madrasah"

D. Tujuan Penulisan

Artikel ini diharapkan dapat memperluas pemahaman semua pihak terkait tentang prinsip, proses, dan pentingnya PKB KS/M, sebagai suatu sistem pengembangan keprofesian berkelanjutan kepala sekolah/madrasah yang bermanfaat untuk pengembangan karir kepala sekolah/madrasah

II. KAJIAN TEORI

A. Definisi PKB KS/M

Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional kepala sekolah/madrasah sehingga mampu memperbaiki kualitas manajemen dan kepemimpinan sekolah/madrasah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menempatkan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Kepala Sekolah/Madrasah sebagai salah satu komponen dalam sistem penjaminan dan peningkatan mutu kepala sekolah di Indonesia. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif.

B. Tujuan PKB KS/M

Secara umum tujuan PKB Kepala Sekolah/Madrasah adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kinerja profesional kepala sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didiknya.

Sedangkan secara khusus tujuan PKB Kepala Sekolah/Madrasah adalah untuk meningkatkan hal-hal sebagai berikut.

1. Kompetensi kepala sekolah/madrasah sejak diangkat menjadi kepala sekolah/ madrasah sampai akhir masa jabatan.
2. Kinerja kepala sekolah/madrasah yang bermuara pada meningkatnya kinerja sekolah secara keseluruhan.
3. Kepemimpinan kepala sekolah/madrasah dalam pemberdayaan sumber daya sekolah.
4. Kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah/madrasah dalam pembelajaran berkualitas.
5. Kepemimpinan manajerial kepala sekolah/madrasah dalam mencapai manajemen sekolah yang berkualitas.
6. Kepemimpinan kepala sekolah/madrasah dalam pelaksanaan supervisi akademik kepada guru.
7. Kepemimpinan kewirausahaan kepala sekolah/madrasah dalam hal etos kerja dan jiwa enterpreneurship.
8. Kemampuan kepala sekolah/madrasah dalam pengembangan sekolah melalui evaluasi diri sekolah (EDS).

C. Sasaran

Sasaran PKB KS/M di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014 adalah 360 kepala sekolah/madrasah jenjang SD/Madrasah dalam jabatan sejak diangkat sampai akhir masa jabatan kepala sekolah/madrasah untuk jenjang sekolah dasar negeri dan swasta, yaitu: SD/MI dan 72 pengawas sekolah/madrasah di 9 Kabupaten/Kota sasaran ProDEP

D. Manfaat PKB KS/M

1. Bagi Siswa

Siswa memperoleh pelayanan dan pengalaman belajar yang lebih efektif untuk meningkatkan potensi diri secara optimal melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter berbudaya bangsa Indonesia.

2. Bagi Guru

Guru mendapat pelayanan yang baik untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan potensinya dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik.

3. Bagi Kepala Sekolah/Madrasah

PKB memberikan jaminan terwujudnya sekolah/madrasah sebagai sebuah organisasi pembelajaran yang efektif dalam rangka meningkatkan kompetensi, motivasi, dedikasi, loyalitas, dan komitmen pengabdian kepala sekolah/madrasah dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada warga sekolah/madrasah.

4. Bagi Orang Tua/Masyarakat

PKB memberikan jaminan kepada orang tua/masyarakat bahwa masing-masing peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai kemampuan dan kebutuhan orang tua/masyarakat.

5. Bagi Pemerintah

Pemerintah mampu memetakan kualitas layanan pendidikan sebagai upaya pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja kepala sekolah/madrasah dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas.

E. Prinsip-Prinsip PKB Kepala Sekolah/Madrasah

1. Terencana (Intensional) PKB Kepala sekolah hendaknya merupakan aktivitas yang diniatkan, bukan terjadi secara kebetulan. PKB yang bersifat intensional ditandai dengan (1) terdapat rumusan tujuan yang jelas, (2) tujuan bermanfaat bagi individu, sekolah, dan sistem pendidikan pada umumnya, dan (3) adanya langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan.
2. Proses Berkelanjutan (On-going Process) PKB Kepala Sekolah/Madrasah harus berupa kegiatan yang berjalan secara terus-menerus sepanjang karir kepala sekolah. Kepala sekolah/ madrasah harus menjadi orang yang terus-menerus belajar (continuous learner). Sebagai wujud dari prinsip ini, setiap kepala sekolah harus selalu: (1) menilai dan menganalisis keefektifan kerjanya, (2) melakukan refleksi terhadap praktik-praktik kepemimpinan yang dilakukan, (3) bersikap adaptif terhadap perubahan, dan (4) terus-menerus mengeksplorasi alternatif dan peluang-peluang baru untuk melakukan perbaikan kerjanya.
3. Sistemik PKB kepala sekolah/madrasah harus merupakan bagian dari keseluruhan sistem peningkatan mutu kepala sekolah/madrasah dan mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Propinsi, maupun Pemerintah Pusat.
4. Fokus Pada Siswa dan Pembelajaran Setiap upaya yang dilakukan melalui PKB, Kepala sekolah/madrasah harus memiliki keterkaitan yang erat dengan kebutuhan akan peningkatan keberhasilan belajar siswa. Dengan kata lain, keefektifan PKB kepala sekolah/madrasah harus diukur dari dampaknya terhadap kinerja kepala sekolah/madrasah dalam konteks peningkatan keberhasilan siswa dalam belajar.
5. Menitikberatkan Pada Perubahan Individu dan Sekolah Sekolah tidak mungkin dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa meningkatkan kualitas individu-individu yang ada di dalamnya, terutama guru dan kepala sekolah. Namun demikian ada kalanya sekolah atau sistem harus berubah untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kualitas individu yang ada di dalamnya. Perubahan yang diharapkan terjadi melalui PKB Kepala Sekolah hendaknya menempatkan secara seimbang antara perubahan sekolah sebagai sistem dan transformasi profesional kepala sekolah secara individual.
6. Mengarah Pada Visi Sekolah Setiap perubahan yang diharapkan terjadi sebagai dampak dari PKB Kepala Sekolah/Madrasah biasanya berupa perubahan-perubahan kecil dan bersifat parsial, tidak teratur, dan berlangsung dalam waktu yang lama. Hal ini merupakan hal yang wajar karena perubahan besar tidak mungkin dilakukan sekaligus melalui sebuah PKB. Namun demikian perubahan-perubahan kecil itu harus tetap diarahkan kepada pencapaian visi sekolah. Prinsip "berfikir besar dan memulai dari yang kecil" merupakan penerapan dari prinsip ini. Perubahan yang ingin dicapai adalah perubahan yang dinamis dan berskala besar, akan tetapi dalam praktiknya, perubahan besar itu dilakukan melalui serangkaian langkah-langkah yang lebih kecil.
7. Melekat Pada Kegiatan Sehari-Hari PKB Kepala Sekolah hendaknya tidak dipisahkan dari kegiatan dan tanggung jawab kepala sekolah sehari-hari. PKB Kepala Sekolah harus melekat pada proses manajemen dan kepemimpinan sekolah sehari-hari, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi semua aktivitas manajemen. PKB kepala sekolah hendaknya dijadikan sebagai proses yang berlangsung alamiah dan terjadi secara rutin. Dalam melaksanakan PKB seorang kepala sekolah terkadang harus meninggalkan kegiatan sehari-hari untuk mempelajari hal yang baru dan pada waktu kembali ke tempat tugas kepala sekolah tersebut harus mengimplementasikan ilmu yang dipelajari untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah/madrasah.

F. Tahapan Pelaksanaan PKB KS/M

1. Perencanaan :

Pada tahap perencanaan, penilaian kinerja untuk kepala sekolah dilaksanakan oleh pengawas sekolah. Berdasarkan hasil penilaian kinerja tersebut

but dilakukan analisis kebutuhan PKB kepala sekolah. Kemudian hasil analisis ini didiskusikan oleh pengawas dan kepala sekolah untuk menentukan prioritas kebutuhan PKB. Hasil penentuan prioritas dari semua kepala sekolah binanaan seorang pengawas, kemudian direkap untuk pemetaan kebutuhan PKB kepala sekolah binaan. Hasil rekapitulasi ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan PKB kepala sekolah.

2. Pelaksanaan :

a. In-Service Learning 1

Berdasarkan rekap kebutuhan PKB yang dikirimkan oleh pengawas dari kabupaten kota, LPMP membuat perencanaan kegiatan In-service 1. Dalam merencanakan kegiatan tersebut LPMP melakukan kalkulasi jumlah kebutuhan masing-masing BPU serta fasilitatornya baik widyaiswara maupun pengawas yang dikirimkan ke LPMP untuk mendampingi kegiatan In-1 tersebut. LPMP menentukan jenis dan jumlah kelas berdasarkan kebutuhan BPU yang akan diambil peserta (kepala sekolah) dan fasilitator yang akan mengasuhnya. LPMP melakukan koordinasi dengan semua fasilitator terkait pelaksanaan kegiatan In-1 dan mengundang para peserta dari kabupaten/kota. Kemudian kegiatan in-1 ini dilaksanakan oleh LPMP selama lima hari dengan salah satu hasil kegiatan yang berupa rencana tindak lanjut (RTL).

b. On-the Job Learning (OJL)

Kepala sekolah yang telah selesai mengikuti kegiatan *In-service learning 1*, akan kembali ke sekolah masing-masing untuk melaksanakan atau mengimplementasikan hasil In-1 dengan berdasarkan rencana tindak lanjut yang sudah dibuat tersebut. Dalam melaksanakan OJL ini kepala sekolah didampingi oleh seorang mentor yaitu pengawas yang akan membimbing, memberi masukan, dan mendukung kegiatan OJL tahap demi tahap sesuai yang disarankan di dalam BPU yang diambilnya. Dalam OJL ini, kepala sekolah diharapkan untuk mengumpulkan semua dokumen yang dihasilkan dari semua tahap pelaksanaannya. Proses pelaksanaan dan dokumen yang dihasilkan akan menjadi bahan penilaian oleh pengawas untuk menentukan keberhasilan kepala sekolah dalam mencapai target kompetensi BPU yang diambil. Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pengawas pada saat OJL PKB KS/M akan dimonitor dan dievaluasi oleh LPMP Provinsi Kalimantan Barat.

c. In-Service Learning 2

Setelah kegiatan OJL berakhir, kepala sekolah akan mengikuti kegiatan *In-Service Learning 2* (In-2) yang diselenggarakan di LPMP tempat dilaksanakannya In-1. Pada kegiatan In-2 ini, kepala sekolah akan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan OJL, termasuk kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan (pengalaman best practice) dalam pelaksanaan PKB KS/M. Dalam kegiatan ini juga disampaikan rencana tindak lanjut terkait hasil OJL. Hasil pemaparan masing-masing kepala sekolah kemudian dikomentari oleh fasilitator baik widyaiswara, pengawas pendamping maupun kepala sekolah lain agar diperoleh masukan untuk perbaikan selanjutnya. Kegiatan *In-On-In* tersebut dimonitor dan dievaluasi oleh Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (Pusbang Tendik).

III. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi penulis dengan beberapa pengawas dan kepala sekolah di propinsi Kalimantan Barat, maka penulis mendapatkan temuan-temuan sebagai berikut :

1. Pentingnya PKB KS/M dalam rangka pengembangan karir KS

Kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagian besar belum memahami arti pentingnya PKB KS/M dalam rangka pengembangan karir mereka. PKB KS/M merupakan suatu sistem pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi kepala sekolah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Sistem Penilaian Kinerja Kepala Sekolah. Sebelum melaksanakan PKB, kepala sekolah harus dinilai kerjanya terlebih dahulu oleh pengawas sekolah, hasil dari penilaian kinerja kepala sekolah dijadikan dasar bagi pengawas untuk menyusun dan merencanakan PKB. Masih belum tahunya para pengawas sekolah, dan kepala sekolah tentang pentingnya PKB KS/M sebagai suatu sistem dalam pengembangan keprofesian kepala sekolah secara berkelanjutan (*on going* proses) yang melekat pada tugas dan pekerjaannya sehari-hari.

2. Yang masih menjadi kendala bagi kepala sekolah dalam melaksanakan PKB Kepala sekolah adalah kesulitan dalam memenuhi tagihan-tagihan ataupun tugas yang dipersyaratkan dalam Bahan Pembelajaran Utama (BPU) yang diambil. Kepala sekolah/madrasah baru bisa dikatakan kompeten apabila seluruh tagihan yang dipersyaratkan dalam 2 BPU yang diambil (BPU Prioritas 1 dan BPU Prioritas ke 2) dinyatakan lengkap, asli dan berkualitas oleh pengawas pendampingnya dan oleh tim penilai dari LPMP yang dilaporkannya pada saat *in-service learning 2*



Foto : Irfan

3. Kebijakan dari pemerintah daerah kabupaten berkenaan dengan mutasi/ perpindahan kepala sekolah binaan dan pengawasnya, juga merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan PKB KS di Kabupaten Melawi. Pada saat pelaksanaan OJL PKB KS, adanya perpindahan/mutasi beberapa kepala sekolah/pengawas pembinaannya, berakibat pada terganggunya pelaksanaan PKB KS/M, sehingga menyebabkan kepala sekolah/pengawas sekolah tersebut gagal dalam melaksanakan PKB KS/M
4. Kebijakan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya perubahan struktur organisasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan menjadi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, menyebabkan Kepala Sekolah/madrasah jenjang SD yang telah mengikuti PKB KS/M di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2014, untuk sementara waktu belum bisa melanjutkan PKB KS/M di tahun 2015.

B. Pembahasan

1. Pentingnya PKB KS/M dalam rangka pengembangan karir KS
PKB KS/M merupakan suatu sistem pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi kepala sekolah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Sistem penilaian Kinerja Kepala Sekolah. Sebelum melaksanakan PKB, kepala sekolah harus dinilai kinerjanya terlebih dahulu oleh pengawas sekolah, hasil dari penilaian kinerja kepala sekolah dijadikan dasar bagi pengawas untuk menyusun dan merencanakan PKB. Oleh karenanya diperlukan kerjasama antara LPMP, pemerintah Kabupaten/Kota dan Pengawas Sekolah dan kepala Sekolah untuk mensosialisasikan pentingnya PKB KS/M sebagai suatu sistem dalam pengembangan keprofesian kepala sekolah secara berkelanjutan (on going proses) yang melekat pada tugas dan pekerjaannya sehari-hari.
2. Kepala sekolah/madrasah baru bisa dikatakan kompeten apabila seluruh tagihan yang dipersyaratkan dalam 2 BPU yang diambil (BPU Prioritas I dan BPU Prioritas ke 2) dinyatakan lengkap, asli dan berkualitas oleh pengawas pendampingnya dan oleh tim penilai dari LPMP yang dilaporkannya pada saat *in-service learning 2*. Pada saat pelaksanaan On The Job learning Pengawas pendamping minimal 3 kali harus melakukan pendampingan kepada kepala sekolah binaannya agar kepala sekolah dapat menyelesaikan seluruh tagihan pada 2 BPU yang diambil secara lengkap dan berkualitas. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari hasil/laporan pelaksanaan PKB KS/M tahun 2014 yang dilaksanakan di 9 kabupaten kota di provinsi Kalimantan barat dari 360 orang kepala sekolah/madrasah yang mengikuti PKB KS/M hanya 285 kepala sekolah yang berhasil menyelesaikan seluruh tagihannya dan dinyatakan kompeten oleh pengawas dan asesor dari LPMP. Sisanya sebanyak 75 orang kepala sekolah dinyatakan belum kom-

peten karena tidak dapat memenuhi tagihan BPU. Oleh karenanya sangat diperlukan optimalisasi peran pengawas sebagai pendamping dan mentor pada saat pelaksanaan PKB KS/M.

3. Pemerintah dalam hal ini ProDEP melalui Pusat Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempersyaratkan Pemerintah Kabupaten/Kota hendaknya tidak melakukan mutasi atau perpindahan kepala sekolah maupun pengawas sekolah selama pelaksanaan PKB KS/M yaitu tahun 2014 s.d. 2016. Karena adanya perpindahan/mutasi beberapa kepala sekolah/pengawas pembinaannya, berakibat pada terganggunya proses pelaksanaan PKB KS/M, sehingga menyulitkan pengawas/kepala sekolah dalam melaksanakan pendampingan dan mentoring PKB KS/M. Berdasarkan data yang kami peroleh ada beberapa pengawas dan kepala sekolah yang gagal atau mengundurkan diri dari pelaksanaan PKB KS/M dikarenakan adanya mutasi pengawas dan kepala sekolah binaannya.
4. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan hendaknya terus melanjutkan program PKB KS/M jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dalam rangka pengembangan profesional kepala sekolah/madrasah di seluruh Indonesia dan di Provinsi Kalimantan Barat khususnya.

IV. PENUTUP

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Kepala Sekolah merupakan usaha peningkatan kompetensi dan kinerja kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Dengan demikian hasil akhir dari pengembangan keprofesian ini harus berdampak pada peningkatan kualitas belajar anak didik. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ini diawali dengan analisis kebutuhan pengembangan berdasarkan hasil penilaian kinerja kepala sekolah (PK-KS) yang diolah menjadi peta kompetensi. Peta kompetensi ini selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan tersebut. PKB kepala sekolah ini meliputi pengembangan diri, karya inovatif dan publikasi ilmiah. Pelaksanaan pengembangan keprofesian ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Pengembangan keprofesian ini hendaknya didukung oleh pihak-pihak terkait baik kementerian pendidikan dan kebudayaan, dinas pendidikan, lembaga penyelenggara diklat, organisasi profesi, dan pengawas sekolah. Keterlibatan pengawas diperlukan dalam memberikan pendampingan kepada kepala sekolah binaannya dalam melaksanakan PKB, demikian pula dengan peran aktif LPMP Provinsi Kalimantan Barat dan widyaiswara LPMP sangat diperlukan baik sebagai fasilitator maupun sebagai penjaminan mutu pelaksanaan PKB KS/M.

KEPUTUSAN BERBASIS DATA DALAM KONTEKS PENDIDIKAN

Oleh:

Suhendri, S.Pd, M.Sc (Widyaiswara LPMP Kalbar)

Sekolah merupakan suatu organisasi memiliki berbagai data, mulai dari data terkait guru, siswa dan data kependidikan lainnya. Sebagai seorang pemimpin di sekolah, seorang kepala sekolah dan para guru memiliki peran utama dalam membuat berbagai keputusan penting di institusi yang dipimpinnya.

Keputusan – keputusan yang dibuat oleh seorang kepala sekolah tentu akan berpengaruh dalam menjadikan seperti apa sekolah di masa depan. Boleh jadi suatu keputusan yang dibuat tanpa berlandaskan pada data pendukung tepat akan menyebabkan ketidaktepatan sasaran program kegiatan yang dilakukan oleh sekolah tersebut. sebagai contoh suatu sekolah yang berencana untuk membuat program peningkatan kompetensi guru melalui suatu pelatihan. Karena tidak adanya data tentang kompetensi atau materi apa yang diperlukan oleh para guru di sekolah tersebut maka pelaksanaan pelatihan tersebut memiliki potensi untuk tidak tepat sasaran artinya kegiatan yang dilakukan tidak akan sesuai kebutuhan dan tidak pula meningkatkan kompetensi yang mereka perlukan.

Kajian tentang pentingnya data dalam pengambilan keputusan menarik perhatian para praktisi dan peneliti pendidikan. Apa sebenarnya pengambilan keputusan berbasis data (*data driven decision making* atau DDDM), kenapa hal tersebut menjadi penting, dan faktor apa saja yang menjadi penghalang dan pendukung dalam pengambilan keputusan berbasis data dalam konteks pendidikan? Paragraph – paragraph berikut ini akan membahas semua hal tersebut.

Apa itu Data Driven Decision Making?

Data dalam konteks pendidikan dapat terkait dengan segala informasi yang ada di sekolah misalnya informasi yang terdapat dalam profil sekolah seperti identitas sekolah, lokasi, jumlah guru, siswa, kurikulum dan rombongan belajar serta berbagai fasilitas yang dimiliki oleh satu sekolah. Beberapa data lain yang mungkin tidak termuat dalam profil terkini sekolah misalnya hasil ujian atau test, baik lokal dan nasional, serta berbagai prestasi siswa dan guru juga merupakan sumber data yang ada di sekolah. Apa pun informasi yang ada di sekolah yang terkait dengan pendidikan adalah merupakan sumber data yang dapat digunakan dalam membuat suatu keputusan oleh kepala sekolah dan para guru. Tindakan pengambilan keputusan oleh kepala sekolah dan guru dalam satu sekolah yang berdasarkan pada berbagai sumber data terkait dikenal dengan istilah *data driven decision making* (DDDM).

DDDM sebenarnya bukan lah hal yang cukup baru dalam dunia pendidikan. Setidaknya sejak tahun 2002 telah ada upaya oleh institute ilmu sains Amerika untuk menjadikan hal ini menjadi suatu bidang disiplin ilmu sendiri. Upaya tersebut mendapat sambutan hangat ketika salah satu stakeholder pendidikan di sana yaitu Margareth Speiling pada tahun 2005 mengeluarkan pernyataan bahwa informasi adalah kunci dari perbaikan kinerja akuntabilitas sekolah. Lebih jauh lagi dia mengatakan bahwa data merupakan bagian penting dalam pengambilan suatu keputusan. DDDM ini merupakan suatu system yang terdiri atas proses analisa data sekolah, implementasi hasil analisis dan evaluasi implementasi (Schildkamp dan Kuiper, 2010). Selain itu DDDM merupakan tindakan dari kepala sekolah, guru dan staff di sekolah yang secara sistematis mengumpulkan menganalisa berbagai data (data demografi, administrasi, proses, data capaian kinerja siswa) dan menggunakan hasil analisa tersebut sebagai pedoman dalam menentukan kegiatan untuk memperbaiki atau meningkatkan keberhasilan siswa. Dari pernyataan – pernyataan tersebut maka dapat kita katakan bahwa pengambilan keputusan berbasis data adalah segala hal yang berhubungan dengan pengumpulan, penganalisaan, penggunaan data sebagai dasar pembuatan dan implementasi keputusan dan evaluasi dari implementasi keputusan tersebut dalam ruang lingkup pendidikan di sekolah dalam rangka meningkatkan memajukan organisasi sekolah yang tentunya akan menuju peningkatan prestasi siswa yang ada di sekolah tersebut.

Jenis – Jenis Data

Ada banyak data yang bisa ditemukan di sekolah. Pada sekolah yang telah memiliki profil sekolah yang telah tercetak biasanya kita akan menemukan identitas sekolah yang berisi informasi tentang identitas sekolah seperti nama dan lokasi sekolah serta deskripsi singkat tentang jumlah dan kualifikasi guru, siswa, fasilitas serta prestasi guru dan siswa dan data lainnya. Data ini disajikan secara singkat agar pihak lain seperti orang tua calon siswa di suatu sekolah dan pihak lain yang berkepentingan terhadap sekolah mendapat gambaran tentang

keadaan sekolah tersebut. Tentu tidak semua hal secara detail dideskripsikan di dalam profil tersebut, deskripsi profil singkat tersebut tentu berasal dari data mentah yang bisa jadi bersumber dari satu dokumen tertentu, seperti matrik atau tabel data sekolah yang masih belum terdeskripsikan.

Data dalam konteks pendidikan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Ikemoto dan Marsh (2007) menyebutkan jenis data tersebut seperti: Data Input yang mencakup data pengeluaran sekolah atau pun populasi demografis siswa. Berikutnya adalah data proses. Data ini meliputi data tentang dana operasional dan data tentang kualitas pengajaran. Selanjutnya, data outcome, ini merupakan data yang terkait dengan data lulusan / tingkat drop out dan hasil skor siswa. Yang terakhir adalah data tentang tingkat kepuasan layanan. Ini merupakan data yang terkait dengan opini para guru, orang tua, siswa atau masyarakat terkait dengan kepuasan layanan yang diberikan oleh pihak sekolah.

Selain itu Ikemoto dan Marsh (2007) juga menyebutkan bahwa data di sekolah dapat pula diklasifikasikan kedalam data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Sebagian dari data ini ada yang sifatnya sederhana dan ada pula yang sifatnya kompleks. Data yang sederhana dan kompleks ini dapat di bagi menjadi beberapa dimensi seperti data berdasarkan jangka waktu yaitu yang tidak berubah dan data yang baru yang sedang trend. Selain data ini, ada pula data yang dibedakan berdasarkan tipenya. Ada data yang sifatnya tunggal dan jamak, yang termasuk dalam jenis data ini adalah input, proses, outcome dan tingkat kepuasan layanan. Yang terakhir, data dibedakan berdasarkan sumbernya yaitu data berdasarkan satu sumber dan berbagai / multi sumber.

Selain pengelompokan tersebut diatas, data di sekolah dapat pula dibedakan berdasarkan sumber data. Schildkamp dan Kuiper (2009) membedakan data berdasarkan sumbernya. Beberapa dari data tersebut yang ada dalam konteks sekolah Indonesia seperti:

1. Data hasil evaluasi diri sekolah (EDS)

Evaluasi diri sekolah merupakan salah satu program yang saat ini pelaksanaannya diserahkan pada pihak sekolah. kepala sekolah, guru dan siswa diminta mengisi serangkaian instrument terkait tentang data sekolah, guru, siswa, sarana prasarana serta. Dari hasil isian instrument tersebut pada akhirnya akan diketahui kelemahan yang ada di suatu sekolah, terutama sekali kelemahan yang terkait dengan pemenuhan delapan standar nasional pendidikan. Dari data hasil EDS ini juga sekolah dapat mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh guru dalam proses pembelajaran dan bahkan sekolah dapat melihat dan menentukan rekomendasi program kegiatan dalam mengatasi kekurangan tersebut.

2. Data perpindahan siswa

Perpindahan siswa dari satu sekolah ke sekolah lain dalam satu wilayah atau antar wilayah merupakan hal yang biasa terjadi. Data profil diri siswa dan sekolah yang lama, termasuk prestasi dan hasil belajar peserta didik merupakan informasi yang diperlukan dan tersimpan di sekolah lama dan sekolah baru.

3. Data hasil ujian nasional

Ujian nasional merupakan evaluasi tahunan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa di Indonesia. Jawaban siswa dalam ujian nasional ini diolah secara komputerisasi oleh tim yang bertugas mengolahnya. Data hasil hasil ujian nasional ini selanjutnya digunakan untuk berbagai kepentingan oleh pemerintah misalnya untuk menilai sejauh mana keberhasilan program pendidikan yang telah dilaksanakan. Pihak sekolah juga dapat menggunakan data hasil ujian nasional siswa mereka untuk mengetahui kompetensi yang sulit dikuasai oleh siswa dan ini merupakan salah satu dasar dalam merencanakan program peningkatan sekolah, terutama guru di tahun berikutnya. Data ini biasanya dapat diperoleh di dinas pendidikan provinsi, kabupaten dan di sekolah – sekolah.

4. Data hasil ulangan/ test tengah dan akhir semester

Hasil ulangan harian atau pun ulangan tengah semester juga merupakan data yang dapat merepresentasikan sejauh mana siswa dan guru telah mencapai tujuan pembelajaran. Hasil ulangan tersebut baik berupa angka atau pun deskripsi kompetensi yang dicapai oleh peserta didik merupakan gambaran keberhasilan siswa dan guru. Capaian kompetensi yang telah diraih oleh siswa yang tergambar dari hasil ulangan tersebut biasanya dimiliki oleh para guru.

Kenapa Data dan Keputusan Berbasis Data Penting?

Ada berbagai keputusan yang harus dibuat oleh seorang kepala sekolah dalam mengelola sekolah ke arah yang baik. Keputusan – keputusan yang dibuat oleh sekolah ada kalanya dibuat secara bersama – sama oleh kepala sekolah, guru dan juga staf sekolah. Namun tidak menutup kemungkinan pula keputusan akhir yang harus dibuat ditentukan oleh kepala sekolah sendiri.

Keputusan yang dibuat oleh sekolah bisa jadi merupakan hal yang akan menentukan bagaimana proses pembelajaran dan kondisi sekolah tersebut di masa depan. Maka pengambilan keputusan merupakan hal penting yang harus dilakukan berdasarkan data – data, bukan hanya berdasarkan perasaan atau intuisi kepala sekolah dan guru saja, serta berorientasi pada tujuan yang akan dicapai sekolah. Keputusan yang dibuat oleh sekolah tanpa berlandaskan data pendukung akan berpotensi mengarahkan sekolah pada suatu keputusan yang menimbulkan masalah atau hasil yang tidak sesuai tujuan, visi dan misi sekolah tersebut. Schildkamp dan Ehren (2013) menyebutkan bahwa keputusan tanpa berlandaskan data – data yang benar tidak akan menyebabkan sekolah mencapai hasil yang positif atau sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Hal lain yang menyebabkan pengambilan keputusan berbasis data menjadi penting dikemukakan oleh Nancy B. Love (2009). Menurutnya data yang tersedia di sekolah merupakan panduan bagi kepala sekolah dalam membuat keputusan, mengatur dan menentukan prioritas tujuan yang akan dicapai serta memonitor kemajuan dari suatu program kerja. Lebih jauh lagi dia berpendapat bahwa adanya analisis terhadap data yang ada misalnya analisis terhadap kesenjangan antara tujuan pembelajaran dan kinerja siswa, akan mengarahkan sekolah dalam menghasilkan suatu tindakan yang efektif. Dengan analisis tersebut maka kepala sekolah mengetahui pada bagian mana dari sekolah yang memerlukan tindakan untuk diperbaiki. Dengan kata lain melalui analisis data yang ada di sekolah, seorang kepala sekolah dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya dan menentukan tindakan yang tepat untuk memperbaiki bagian yang lemah. Contoh kegiatan pengambilan keputusan berbasis data adalah penggunaan hasil evaluasi diri sekolah.

Gambar diatas adalah hasil dari data evaluasi diri sekolah, yaitu pada bagian rekap. Ini merupakan salah satu bagian dari sumber data yang terdapat dalam hasil evaluasi diri suatu sekolah. Hasil dari EDS tersebut memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam satu sekolah. Data tentang kelemahan yang terdapat dalam sekolah tersebut merupakan informasi penting yang diperlukan oleh pihak sekolah dalam rangka menentukan suatu keputusan terkait dengan langkah atau program kegiatan yang diperlukan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Misalnya, dari data diatas khususnya nomor 2 dapat disimpulkan bahwa para guru di sekolah tersebut masih lemah dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), maka berbekal informasi ini kepala sekolah dan guru di sekolah tersebut dapat merencanakan dan mengimplementasikan suatu kegiatan seperti pelatihan atau workshop pengembangan penyusunan RPP. Adanya tindakan yang tepat sasaran pada titik yang lemah tersebut merupakan tentu tidak akan bisa dilakukan jika tidak ada data yang mengarahkan para pembuat keputusan di sekolah.

Kenapa Sekolah Tidak Membuat Keputusan Berbasis Data?

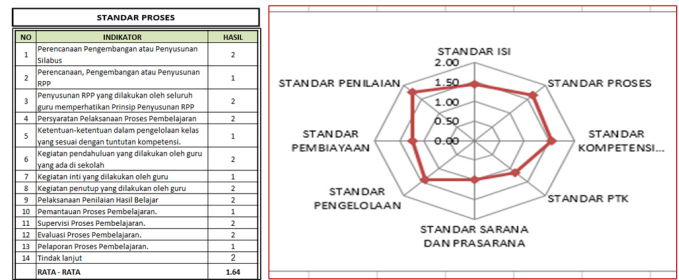
Seperti telah dikemukakan diatas bahwa terdapat berbagai data di sekolah yang dapat digunakan oleh kepala sekolah dalam membuat suatu keputusan atau program kegiatan bagi sekolah. Berbagai data tersebut merupakan bisa jadi merupakan potensi yang akan sangat bermanfaat jika himpun dan dianalisis dalam membuat keputusan – keputusan bagi kemajuan sekolah di masa depan. Namun demikian ternyata belum semua sekolah menggunakan berbagai data yang ada tersebut. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung sekolah dalam melakukan pengambilan keputusan berbasis data dibahas pada bagian ini.

1. Akses terhadap Data

Penulis seringkali terlibat dalam program seleksi calon kepala sekolah di beberapa daerah di Indonesia, yang terakhir adalah pada bulan Desember 2015 di Kalbar. Salah satu tugas yang harus dibuat oleh peserta diklat tersebut adalah membuat Rencana Kerja Sekolah (RKS) berdasarkan data hasil EDS. Hal yang mengejutkan saat mereka akan mengerjakan tugas mata diklat ini adalah ternyata tidak semua guru pernah melihat dan punya akses pada hasil EDS. Hal ini merupakan tanda bahwa akses terhadap hasil evaluasi tersebut belum sampai pada semua guru dan hanya terbatas pada kepala sekolah. Sebagian guru yang lain mendapat telah mengenal EDS dengan baik karena selama ini di sekolah mereka hasil EDS tersebut pengisian instrumentnya tidak hanya melibatkan kepala sekolah tapi juga semua warga sekolah yang terkait dan hasil EDS tersebut secara diberikan pada semua guru. Dari deskripsi ini maka dapat dikatakan bahwa adanya akses guru terhadap data EDS merupakan faktor yang akan mendukung pembuatan keputusan berbasis data dan sebaliknya bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap data tersebut tidak akan bisa membuat suatu rencana dan tindakan berbasis data.

2. Teknologi Literasi

Literasi masa kini tidak hanya didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan menulis, tapi juga kemampuan menggunakan teknologi yang mendukung



Rekap Data Evaluasi Diri Sekolah

kung pekerjaan dan keseharian kita. Ternyata belum semua guru kita mampu menggunakan komputer atau laptop. Seringkali dalam beberapa pelatihan ditemukan para guru yang memiliki laptop tapi ketika ada tugas untuk menggunakan laptop tersebut ternyata mereka mengalami kesulitan menggunakan-annya.

Data yang saat ini tersimpan di sekolah tidak hanya dalam bentuk dokumen atau berupa kertas tapi juga dalam bentuk file – file yang tersimpan dalam drive atau komputer. Hal ini jadi masalah sendiri bagi para guru yang belum bisa menggunakan komputer. Kurangnya literasi teknologi berakibat pada terbatasnya akses mereka pada data yang tersimpan dalam komputer. Bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan dalam menggunakan perangkat teknologi tersebut maka membuka, membaca dan menginterpretasikan data yang dalam bentuk file – file tentu akan lebih mudah dilakukan.

3. Sikap Guru terhadap Komputer dan Data

Hasil kajian beberapa peneliti menunjukan bahwa sikap negative guru terhadap teknologi (komputer) merupakan suatu hal yang menyebabkan guru tidak mau menggunakannya dalam mendukung pekerjaan mereka (Albirini, 2006). Selain kemampuan yang belum dimiliki sebagian guru dalam menggunakan komputer, sikap negative mereka terhadap komputer adalah hal lain yang jadi penghambat bagi mereka dalam menggunakan data berbasis teknologi di sekolah.

Disamping itu terdapat pula guru yang menganggap data kurang begitu penting dalam mendukung mereka membuat keputusan. Para guru seperti ini cenderung membuat keputusan berdasarkan intuisi (Slavin, 2002). Dalam hal seperti ini maka guru tersebut telah membuat suatu langkah yang berpotensi akan mengarahkan sekolah tersebut dalam jalan yang tidak mengarah pada tujuan yang tepat. Sebaliknya jika keputusan yang diambil berdasarkan data – data yang kemudian di analisa secara saintifik tentu akan menghasilkan suatu keputusan yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Kepala sekolah dan para guru berperan penting dalam menentukan kualitas dan masa depan sekolah. Mereka seringkali dihadapkan pada situasi untuk membuat keputusan – keputusan yang akan berpengaruh terhadap kemajuan dan keadaan sekolah di masa depan. Suatu keputusan yang baik adalah yang dibuat tidak hanya menggunakan perasaan atau hanya intuisi saja, tapi yang lebih penting adalah bagaimana proses membuat keputusan tersebut dilakukan dengan berlandaskan pada data – data yang ada di sekolah. Keputusan yang dibuat tanpa berlandaskan data yang tepat akan menjadikan sekolah melakukan tindakan yang tidak tepat sasaran dalam perbaikan dan pengembangan sekolah.

Berbagai sumber data yang tersedia di sekolah merupakan dasar yang perlu digunakan dalam membuat keputusan di sekolah. Sekolah (kepala sekolah, guru dan staf) sangat perlu menelaah, menentukan dan mengimplementasikan keputusan bersama agar tercipta rencana program kegiatan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi perbaikan dan pengembangan sekolah di masa depan. Semoga sekolah – sekolah kita dapat melakukan DDM.

Referensi

- Nancy B. Love. 2009. *Using Data to Improve Learning for All. A Collaborative Inquiry Approach*. <http://www.corwin.com/books/Book232203>
- Slavin, R. E. (2002). *Evidence-based education policies: transforming educational practice and research*. Educational Researcher
- Schildkamp, K., & Kuiper, W. (2010). *Data-informed curriculum reform: Which data, what purposes, and promoting and hindering factors*. *Teaching and Teacher Education*, 26(3), 482–496. <http://doi.org/10.1016/j.tate.2009.06.007>
- Slavin, R. E. (2003). *A reader's guide to scientifically based research*. *Educational Leadership*

HAL-HAL PENTING DAN HARUS DILESTARIKAN DIDUNIA PENDIDIKAN

Oleh : Wiwin Asriningrum, S.Pd

Pendidikan merupakan hak asasi manusia, yang dimiliki manusia sejak dilahirkan hingga dia meninggal dunia. Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Sebagian besar masyarakat sudah menyadari pentingnya pendidikan dalam menata masa depan yang lebih baik. Diperlukan karakter akademisi, pendidik dan generasi penerus bangsa yang mampu menumbuhkan budaya baik dalam pendidikan hingga mencapai kemajuan. Untuk itu, berikut adalah hal yang penting yang tidak boleh dihilangkan atau hilang karena adanya arus globalisasi sehingga karakter berikut ini perlu terus dilestarikan dan dikembangkan hingga menjadi suatu pembiasaan baik bagi setiap orang. Hal-hal tersebut adalah:

1. Disiplin

Disiplin adalah kepatuhan terhadap peraturan. Patuh berarti bersedia untuk menepati peraturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Disiplin juga merupakan sikap mental yang mengandung kerelaan memenuhi semua ketentuan, peraturan dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Untuk itu sangat penting diperhatikan agar tugas dan tanggung jawab dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ada dua jenis dorongan yang mempengaruhi disiplin, yaitu :



- Dorongan yang datang dari dalam diri manusia, yaitu pengetahuan, kesadaran dan kemauan untuk berbuat disiplin.
- Dorongan yang datang dari luar yaitu perintah, larangan, pengawasan, pujian, ancaman,

hukuman dan ganjaran.

Peningkatan disiplin atas dasar dorongan dari dalam diri manusia dapat terlaksana, kalau menyadari dan menerima disiplin itu sebagai hal yang wajar dalam kehidupan di manapun kita berada. Terwujudnya disiplin di sekolah secara nyata terlihat apabila :

- Seluruh warga sekolah dari kepala sekolah, guru, pegawai, dan siswa hadir dan pulang pada waktunya.
- Mengikuti keseluruhan program sekolah yang diperuntukkan baginya.
- Meningkatkan disiplin dirinya di dalam dan di luar sekolah.
- Memakai seragam sekolah menurut ketentuan yang berlaku.
- Mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menerima pelajaran bagi siswa, mengajar bagi guru, melaksanakan tugas-tugas bagi kepala sekolah dan pegawai.
- Mematuhi dan melaksanakan semua peraturan yang berlaku.

Disiplin bukan hanya simbol ditulis di dinding atau kalimat penyemangat saja, namun disiplin harus disertai dengan tekad dan perubahan tingkah laku. Disiplin juga dibutuhkan di berbagai kegiatan dalam hidup. Disiplin juga bukan hanya sebuah kata-kata tetapi juga merupakan tindakan nyata yang tidak hanya sebagai simbol semata.

2. Nasionalisme

Nasionalisme merupakan jiwa bangsa Indonesia yang akan terus melekat selama bangsa Indonesia masih ada. Nasionalisme Indonesia menunjukkan identitasnya pada derajat integrasi tertentu. Adanya nilai-nilai baru seharusnya tidak akan menggoncangkan nasionalisme itu sendiri selama pendukungnya yaitu bangsa Indonesia tetap mempunyai sense of belonging, artinya memiliki nilai-nilai baru yang disepakati bersama. Nasionalisme pada hakekatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat,

maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membedakan suku, agama, maupun ras. Adapun ciri-ciri nasionalisme adalah:

- Cinta tanah air, bangsa dan Negara tanpa membedakan suku, ras dan agama, serta mencintai budaya bangsa Indonesia
- Melaksanakan upacara bendera pada hari-hari bersejarah tertentu serta pelaksanaan upacara bendera pada hari senin
- Mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa yang berkepribadian Indonesia untuk selalu mempertahankan bangsa dan Negara kesatuan Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat
- Menjadikan Pancasila sebagai falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. 3K (Kejujuran, Ketekunan, Keteladanan)

• Kejujuran

Berperilaku Jujur menjadi barang langka sekarang ini, namun seharusnya tidak membuat kita pada kondisi tersebut. Kejujuran adalah mutlak dan harga mati untuk dilakukan. Jika kejujuran menjadi fondasi dalam melakukan segala hal maka senantiasa akan berbuah manis. Mengajarkan hal yang sepele dalam kejujuran merupakan akar untuk berbuat hal yang besar. Sebab terkadang orang lupa akan hal sepele untuk berlaku jujur yang imbasnya adalah melakukan hal besar dengan ketidakjujuran. Untuk itu tetap



pertahankanlah kejujuran karena dengan berlaku jujur maka segalanya akan menjadi lebih baik. Dalam dunia pendidikan mengajarkan anak berlaku jujur dalam mengerjakan ulangan merupakan fondasi

sebab anak diajarkan untuk mengerti kerja keras, percaya diri sendiri dan tidak mudah terpengaruh dengan orang lain.

Katakan TIDAK pada....MENYONTEK.....Apa itu nyontek? Nyontek adalah membawa catatan khusus untuk dapat disalin ketika ujian atau meniru pekerjaan orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (curang). Siswa sekolah yang kedapatan menyontek adalah siswa yang tidak percaya pada kemampuan diri sendiri. Ketidakpercayaan Diri (Percaya Diri) ini membuat siswa mengandalkan teman untuk menyontek ataupun membawa catatan kecil untuk dapat menjawab pertanyaan.

Menyontek bukan hal sepele ..Mengapa? Karena ketika menyontek dipelihara dari waktu-kewaktu maka akan menjadi bad habit atau kebiasaan buruk yang terus terbawa hingga dewasa sehingga dapat menganggap segala sesuatunya sepele dan bisa di dapat dari orang lain atau menggunakan cara apapun untuk bisa mendapatkan segala sesuatu. Hal ini tentu akan membahayakan masa depan seseorang.

• Ketekunan

Tekun merupakan kegiatan yang tidak menyerah, tidak mudah putus asa dan tidak takut mencoba melakukan sesuatu yang baik. Ketekunan akan menjadikan seseorang meraih sebuah kesuksesan. Dalam dunia pendidikan ketekunan menjadi semangat untuk terus berjuang dan mengabdikan diri pada pendidikan.

Semangat yang terus membara akan memberikan aura positif pada orang yang ada disekitar kita. Selalu membagi kebahagiaan dengan orang-orang agar mereka terus termotivasi dan terus tekun dalam melakukan sesuatu hingga dapat mencapai kesuksesan. Kesuksesan yang sejati adalah bagaimana kita bisa berbagi kebahagiaan dan memberikan semangat positif untuk orang disekitar kita yang menghadapi masalah. Membutuhkan keteku-

nan untuk meraih pendidikan yang lebih baik.

• Keteladanan

Teladan merupakan sesuatu yang menjadi contoh dan panutan baik untuk ditiru dan dijadikan acuan. Jika kita seorang guru, menjadi guru adalah sebuah pilihan hidup untuk mengabdikan diri dan berdedikasi dalam dunia pendidikan. Mendidik adalah sebuah seni dalam hidup sehingga dapat berbagi ilmu dan membuat orang lain tahu akan sesuatu, merupakan sebuah kepuasan bathin yang tak terbeli. Pepatah Jawa mengatakan guru adalah digugu lan ditiru bukan hanya sebuah jargon, slogan atau ungkapan mudah untuk diucapkan namun dalam pelaksanaannya dibutuhkan tanggung jawab mental sehingga predikat itu akan terus melekat baik pada diri seseorang. Digugu merupakan ungkapan untuk tetap dipercaya oleh orang dan terus dapat dipercaya. Sedangkan ditiru adalah keteladanan yang baik untuk dianut dan ditiru dengan segala hal baik yang dapat diberikan untuk memajukan dunia pendidikan. Menjadi teladan bukan hanya sikap dan cara berpikir tetapi semua aspek yang terlihat akan menjadi acuan bagi orang lain yang melihatnya. Maka keteladanan adalah sebuah tanggung jawab yang mutlak untuk dilakukan.

4. 3A (Asah, Asih, Asuh)

Asah, Asih, Asuh menurut Kamus Bahasa memiliki arti mendidik; mencintai; membina. Ketiga hal tersebut merupakan karakter unik yang selalu ada dalam dunia pendidikan Indonesia. Mengapa disebut unik? karena Asah, Asih, Asuh menjadi identitas tersendiri dalam pendidikan yang memberikan corak pendidikan untuk tidak hanya mendidik tetapi juga mampu mencintai serta membina.

Sebagai masyarakat yang madani perlu membuka diri untuk memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi. Karakter ini akan menghasilkan etos dan kemauan ilmiah di masyarakat religius sebagai cara untuk mengembangkan otonomi dan kedisiplinan dengan begitu tak bergantung kepada yang lain. Tanpa adanya budaya ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemauan ilmiah, sebuah komunitas akan bergantung dengan yang lain akibatnya akan mudah dieksploitasi, ditindas, dan dijajah. Mendidik, mencintai dan membina dapat memberikan warna dalam dunia pendidikan yang dapat menjadikan generasi penerus bangsa memiliki dedikasi tinggi dan madani.

5. Budaya 5 S di sekolah

Apa sih 5 (Lima) S itu? Senyum adalah ibadah paling murah untuk setiap orang, senyuman akan menjaga kesehatan dan selalu berpikir positif dalam menyikapi hidup. Salam. S yang kedua adalah salam. Mengucapkan salam kepada orang lain dengan keikhlasan, maka suasana menjadi cair serta rasa persaudaraan akan semakin dekat. Memberikan salam dengan mencium tangan dengan orang yang lebih tua juga merupakan ciri dan identitas bangsa Indonesia. Dalam dunia pendidikan bersalam dan mencium tangan merupakan tradisi baik bagi penerus bangsa yang merupakan restu dalam melakukan kebaikan. Sapa, menyapa seseorang yang masuk kedalam lingkungan sekolah menyebabkan orang yang datang akan merasa dihargai. Menyapa merupakan hal terbaik untuk menyambut tamu. Sopan, Setiap orang akan merasa bangga ketika mendapat predikat "Orang yang Sopan". Santun. S kelima. Orang akan kagum melihat orang yang memiliki sifat santun, sifat pemaaf ataupun kesungguhan hati untuk membalas kebaikan orang yang terkadang menyakiti dan mengecewakan. Mari budayakan 5S di sekolah serta dimanapun kita tinggal, sehingga predikat bangsa yang ramah terus akan tetap disandang oleh bangsa Indonesia.

6. Ramah Perilaku Lingkungan

Perilaku ramah lingkungan adalah tindakan peduli lingkungan hidup yang dilakukan berulang di kebiasaan. Perilaku Ramah Lingkungan yang dapat dilakukan di sekolah bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan serta juga selalu melakukan perilaku hemat air dan energi. Seperti hal berikut ini: mengelola sampah dengan bijak

dengan 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), hemat energi listrik, hemat air, menyirami tanaman, dan hal lain yang bermanfaat baik untuk lingkungan.

Cara Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah untuk menciptakan kebersihan di sekolah, sangat diperlukan dengan tindakan-tindakan yang berupa:

- Membuat tata tertib kebersihan dan buang sampah sembarangan
- Memberi contoh membuang sampah pada tempatnya
- Memberikan nasehat apabila ditemukan pelanggaran membuang sampah sembarangan,
- Memberikan reward kepada petugas piket yang rajin dan bersih dalam membersihkan kelasnya
- Membiasakan diri cuci tangan sebelum makan di kantin
- Piket Sebelum dan sesudah pulang sekolah
- Menjaga kebersihan ruangan kelas
- Membuang dan memilah sampah

Untuk membuat kebiasaan-kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan, perlu adanya kesadaran dan kebiasaan baik bagi siswa dan warga sekolah. Sehingga menjaga lingkungan merupakan hal biasa yang dilakukan dengan hati bukan sebuah perintah dan paksaan dari pihak manapun.

Sebagai Bangsa Indonesia yang memiliki berbagai suku budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam dan memiliki banyak warisan karakter - karakter yang sangat baik, tentunya kita sebagai warga Negara yang mencintai bangsanya harus lebih peduli untuk menumbuhkan karakter - karakter baik yang ada di Indonesia untuk menuju Kejayaan Bangsa Indonesia. Untuk itu agar terus memupuk hal baik dalam dunia pendidikan sehingga dapat melahirkan penerus-penerus bangsa yang memiliki karakter yang mampu menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat.



Biodata Penulis

Nama	: Wiwin Asriningrum, S.Pd
TTL	: Demak, 16 Juni 1976
Pendidikan Terakhir	: Sarjana Pendidikan
Agama	: Islam
Instansi Bekerja	: SMP Negeri 1 Sanggau
Alamat Instansi	: Jl. Kihajar Dewantara No 4 Sanggau Kapuas
Jabatan	: Guru Bidang Studi IPS
Hobby	: Menulis dan Jalan-jalan
No HP dan E-Mail	: 085346522760/asriningrumsuparko@yahoo.co.id

DIKLAT PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI K13 SMP DENGAN PENDEKATAN HOLISTIK (THE WHOLE SCHOOL TRAINING)

Oleh : Kusmoro, M.Pd*

ABSTRAK

Pelaksanaan K13 di Indonesia ini sebagai jawaban kongkrit terhadap respon perkembangan jaman. K13 dalam perjalanan waktu implemantasi ternyata banyak kerikil-kerikil tajam yang mesti diselesaikan secara komperhensip dengan pendampingan pendekatan holistik di tiap satuan pendidikan terhadap pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orangtua/komite sekolah, dan pemangku kepentingan sesuai kurikulum yang berlaku untuk menjadikan sama pemahamannya dan baik. Sasaran pendampingan K13 pada tahun 2015 adalah SMP yang sudah melaksanakan K13 selama 3 semester, 3 SMP percontohan sebagai model yang sudah melaksanakan selama 1 semester dan SMP yang melaksanakan K13 selama 3 semester secara mandiri. Pendampingan K13 dilakukan dengan pendekatan holistik ini melalui IN dan ON di sekolah cluster dan imbas yang hasilnya akan dilanjuti oleh guru/sekolah sendiri dan/atau melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), forum Komite Sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Tenaga Administrasi/Tata Usaha Sekolah, dan forum lainnya yang relevan. Selama kegiatan pendampingan ini dilakukan monitoring dan evaluasi dan diakhir kegiatan adanya pelaporan yang kongkrit.

Kata kunci : Pendampingan K13 SMP, pendekatan holistik, sekolah cluster dan imbas

A. Pendahuluan

Kurikulum 2013 (K13) sebagai kurikulum putra bangsa Indonesia sendiri yang merupakan sebagai jawaban kongkrit terhadap perkembangan jaman, dimana kurikulum pendidikan suatu negara mesti ramah terhadap tuntutan jaman. K13 ini sebagai penyempurnaan KTSP 2006 yang mengedepankan pada pencapaian komtensi tiap peserta didik. Dimana K13 ini dilaksanakan mulai secara terbatas dan bertahap pada tahun pelajaran 2013/2014.

Dimana pelaksanaan K13 pada tahun pelajaran 2013/2014 hingga 2014/2015 menunjukan respon yang beragam dari pelaku pendidikan (sekolah), pengguna pendidikan, dan otoritas pendidikan di daerah terutama terutama di Provinsi Kalimantan Barat seperti dituliskan dalam " Kerikil-kerikil tajam dari implementasi Kurikulum 2013 (Kusmoro, 2015) ", yang menunjukan adanya kendala yang bersifat konseptual maupun teknis. Kendala yang bersifat konseptual, diantaranya adalah masih rendahnya pemahaman peserta terhadap K13, seperti: rasional, landasan, pendekatan dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran dan penilaian hasil belajar khususnya pengembangan instrumen penilaian hasil belajar, dan mengolah nilai hingga memasukan pada rapor. Kendala yang bersifat teknis mengarah pada bagaimana mengaktualisasikan K13 ke dalam kegiatan pembelajaran. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi hasil belajar belum dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagaimana diatur di dalam Permendikbud. Beberapa faktor penyebabnya, selain yang bersifat konseptual dan teknis juga dikarenakan tidak cukupnya waktu (jam pelajaran) yang tersedia, sarana dan prasarana yang belum memadai.

Disamping hal tersebut diatas juga guru dan siswa yang belum siap dalam menerima dan melaksanakan pembelajaran menggunakan K13 serta beberapa kendala lain, seperti dari guru, masyarakat, biaya, kepala sekolah, dan birokrasi kurang sepenuhnya berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum yang belum terjadi perubahan paradigma atau penyesuaian pola pikir. Perubahan mindset para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan pemangku kepentingan (stake holder) masih belum bisa sepenuhnya. Terutama perubahan paradigma atau lebih tepatnya mindset para guru dalam proses pembelajaran belum berubah. Dimana proses pembelajaran, dari masih cenderung berpola pembelajaran ala bank, yaitu guru menulis di papan tulis dan murid mencatat di buku serta guru menerangkan sedangkan murid mendengarkan dan sedikit proses pembelajaran yang menuntut murid untuk melakukan pengamatan, bertanya, mengeksplorasi, mencoba, dan mengekspresikannya.

Masalah penghapusan jam TIK di SMP, penjurusan/peminatan di SMA/MA/SMK yang dimulai begitu murid masuk di kelas X menimbulkan persoalan manajerial baru ihwal persyaratan pemilihan jurusan/minat, pilihan peminatan di SMA/MA/SMK menjadi masalah di tiap satuan pendidikan terutama dalam pengaturan jadwal mengajar tiap guru, penyediaan ruang kelas, waktu belajar antara jam kelompok wajib, peminatan, dan lintas minat, penambahan jam pelajaran di semua jenjang pendidikan juga inkonsisten antara latar belakang penambahan dan penerjemahannya dalam struktur kurikulum, dan ketersediaan buku siswa dan buku guru.

Oleh karena itu dari pengalaman pelaksanaan K13 yang sifatnya terbatas tersebut maka pada tahun pelajaran 2014/2015, dilakukan persiapan dengan matang dengan memperbaiki yang menjadi masalah dan melengkapi yang belum ada dengan berhenti sementara dengan tujuan untuk menjadikan pelaksanaan K13 lebih baik. Dengan demikian sekolah-sekolah yang melaksanakan K13 pada tahun pelajaran 2014/2015 berhenti sementara dan melakukan serangkaian persiapan pelaksanaan K13 yang lebih mantap. Dimana selanjutnya pada tahun pelajaran 2015/2016 terutama untuk jenjang SMP pelaksanaan diperluas ke seluruh pada kelas VII dan VIII. Pada tahun pelajaran 2019/2020 semua sekolah, termasuk SMP baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia, harus sudah melaksanakan K13.

Kesiapan SMP untuk melaksanakan kurikulum diperoleh melalui berbagai macam cara, antara lain pelatihan pelaksanaan kurikulum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah maupun oleh sekolah, pembinaan oleh perguruan tinggi setempat, workshop dalam forum MGMP, dan belajar mandiri dengan membaca dokumen-dokumen kurikulum. Namun demikian persiapan tersebut masih banyak masalah karena kurang sepenuhnya dengan tersruktur dan berkelanjutan melibatkan semua kepentingan atau sumber daya yang ada di sekolah.

Dimana bahwa pelaksanaan kurikulum yang baik mestinya melibatkan semua pemangku kepentingan di setiap satuan pendidikan (SMP) dan berjalannya peran serta

yang optimal dari wakil kepala sekolah, guru TIK, pembina ekstrakurikuler, kepala TU, staf TU, kepala laboratorium dan laboran, kepala perpustakaan dan pustakawan, tenaga kebersihan, pemelihara lingkungan sekolah, pengelola kantin, dan Satpam serta Komite Sekolah sesuai tugas dan peran masing-masing. Sebagai contoh, pelaksanaan pembelajaran IPA yang bersifat memfasilitasi peserta didik menemukan pengetahuan dari berbagai sumber dengan pendekatan ilmiah memerlukan laboratorium IPA, akses internet, perpustakaan, dan lingkungan alam di dalam pagar sekolah. Dengan demikian kepala laboratorium, laboran, guru TIK, kepala perpustakaan, pustakawan, dan pemelihara lingkungan sekolah harus menjalankan tupoksi masing-masing secara sinergi agar berbagai keperluan pembelajaran siap ketika pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu dalam hal ini sinergi mereka bahkan mungkin perlu dimulai sejak penyusunan RKS dan RKAS dalam kerangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Oleh karenanya pelatihan pelaksanaan kurikulum harus menjangkau mereka semua secara terpadu.

Dalam pelaksanaan K13 tersebut mesti disiapkan secara matang dan melibatkan semua pemangku kepentingan di setiap satuan pendidikan terutama di SMP. Bagaimana caranya agar pendampingan K13 di SMP dapat berjalan lancar seperti diharapkan? Untuk hal tersebut diperlukan model pendampingan K13 yang dapat melibatkan semua pemangku kepentingan di setiap satuan pendidikan SMP. Salah satu model penguatan kurikulum yang menyertakan semua pemangku kepentingan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk menjadikan semua unsur sekolah memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum adalah pendampingan pelaksanaan kurikulum dengan metode pendekatan holistik (*The Whole-School Training*). Bagaimana model tersebut digunakan dalam kegiatan pendampingan K13 di SMP tahun 2015? Bagaimana prosedurnya?

B. Konsep Pelaksanaan Diklat Pendampingan Implementasi K13 dengan Pendekatan Holistik (*The Whole School Training*)

1. Konsep Diklat Pendampingan Implementasi K13 dengan Pendekatan Holistik dan Prinsip Pendampingan K13 dengan Pendekatan Holistik

A. Konsep Diklat Pendampingan K13 dengan Pendekatan Holistik

Pelaksanaan Diklat pendampingan K13 dengan pendekatan holistik di SMP adalah proses pemberian bantuan penguatan pelaksanaan K13 yang diberikan kepada semua pemangku kepentingan tiap satuan pendidikan SMP sebagai suatu sistem (pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orangtua/komite sekolah, dan pemangku kepentingan sesuai kurikulum yang berlaku) untuk menjadikan semua unsur sekolah memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum adalah pendampingan pelaksanaan kurikulum.

Dengan demikian pelaksanaan K13 di tiap satuan pendidikan dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Dimana sumbangan-sumbangan empris tahun sebelumnya dapat dinetralisir dari sistem penjaminan mutu pelaksanaan kurikulum yang tersistem ini. Dengan harapan dalam sistem ini dapat berjalan mempercepat ketercapaian kurikulum tanpa harus mengulangi kesalahan sebelumnya yang merupakan sebagai pengalaman yang menarik sebagai bahan pertimbangan.

B. Prinsip Pendampingan Implementasi K13 dengan Pendekatan Holistik

Prinsip pelaksanaan pendampingan K13 dengan pendekatan holistik di tiap satuan pendidikan terutama di SMP adalah sebagai berikut :

- 1) Menyeluruh, yaitu diikuti oleh semua pemangku kepentingan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sebagai peserta dengan materi semua komponen pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- 2) Kolegial, yaitu hubungan kesejawatan antara pemberi dan penerima pelatihan.
- 3) Profesional, yaitu narasumber memiliki kompetensi (penguasaan mengenai pelaksanaan K13) yang memadai dan memberikan pelatihan dengan baik.
- 4) Sikap percaya, yaitu yang menerima pelatihan memiliki sikap percaya kepada narasumber bahwa informasi, saran, dan contoh yang diberikan adalah yang sesuai dengan



gan K13 dan narasumber percaya bahwa para peserta pelatihan memiliki kemauan kuat untuk memahami dan melaksanakan K13 dengan baik.

- 5) Berdasarkan kebutuhan, yaitu materi pelatihan adalah materi yang masih belum dikuasai dan/atau memerlukan penguatan.
- 6) Berkelanjutan, yaitu bahwa pendampingan K13 dilanjutkan oleh guru/sekolah sendiri dan/atau melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), forum Komite Sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Tenaga Administrasi/Tata Usaha Sekolah, dan forum lainnya yang relevan.

2. Diklat Pendampingan Implementasi K13 dengan Pendekatan Holistik

a. Persiapan Pendampingan Implementasi K13

Dalam persiapan kegiatan Diklat pendampingan implementasi K13 misalnya untuk tahun 2015, dengan rincian kegiatan terdiri dari sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan/materi pendampingan kurikulum dan narasumber
Dalam penyiapan bahan/materi kegiatan Diklat dan pendampingan implementasi K13 ditetapkan berdasarkan standar bahan/materi pendampingan implementasi K13 yang mutakhir. Demikian juga untuk penetapan narasumber baik untuk pusat, provinsi, maupun Kab/Kota didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kapasitas yang mesti dimiliki tiap narasumber dari: mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, IPS, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Prakarya, PJOK, narasumber untuk laboran, narasumber untuk pengawas, narasumber untuk pustakawan, dan narasumber untuk Tata Usaha
- 2) Identifikasi sekolah sasaran (sekolah induk *cluster* dan sekolah imbas)
Sekolah sasaran pendampingan K13 pada tahun 2015 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 022/H/KR/2015 Tahun 2015. Untuk jenjang SMP sasaran Pendampingan K13 pada tahun 2015 adalah SMP yang sudah melaksanakan K13 selama 3 semester, 3 SMP percontohan sebagai model yang sudah melaksanakan selama 1 semester dan SMP yang melaksanakan K13 selama 3 semester secara mandiri. Dengan masing-masing kuota sudah ditetapkan berdasarkan SK Nomor 022/H/KR/2015 Tahun 2015. Sekolah sasaran dalam satu Kab/Kota dikelompokkan ke dalam cluster-cluster. Setiap cluster rata-rata terdiri atas 1 s.d 5 (lima) SMP dengan salah satu SMP sebagai induk cluster dan lainnya sebagai sekolah imbas. Sekolah yang tergabung dalam satu cluster adalah sekolah-sekolah yang berdekatan secara geografis dan/atau pendek waktu tempuhnya dalam mencapai sekolah induk.
- 3) ToT Penyebaran TPKK Pusat (Direktorat Pembinaan SMP)
ToT penyebaran Tim Persiapan Pengembang Kurikulum (TPPK) dipersiapkan oleh Direktorat Pembinaan SMP dengan memberikan Diklat penyebaran pada narasumber dari : mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, IPS, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Prakarya, PJOK, narasumber untuk laboran, narasumber untuk pengawas, narasumber untuk pustakawan, dan narasumber untuk Tata Usaha. Durasi penyebaran TPKK Pusat dan narasumber umum adalah 4 hari dengan 34 JP. Tujuan utama dari penyebaran narasumber pusat ini adalah menyiapkan narasumber Pusat yang akan bertugas sebagai narasumber pada pelatihan atau ToT TPK Provinsi.
- 4) ToT Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Provinsi
ToT TPK Provinsi dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMP dengan narasumber dari hasil ToT TPKK Pusat. Jumlah TPK Provinsi yang dilatih untuk setiap provinsi adalah 1 (satu) tim yang terdiri dari 11 orang, yaitu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, IPS, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Prakarya, PJOK @ 1 orang dan 2 (dua) orang pengawas (satu berlatar belakang mata pelajaran Bahasa Indonesia dan satu berlatar belakang mata pelajaran IPA). Selain peserta di atas, pelatihan TPK Provinsi juga diikuti oleh Kasikur yang menangani SMP dari tiap provinsi dan Kasikur yang menangani SMP dari tiap Kab/Kota.

Tujuan utama dari ToT ini adalah: a) menyiapkan narasumber Provinsi yang akan bertugas sebagai narasumber pada pelatihan TPK Kabupaten/Kota, dan b) merancang action plan pelaksanaan pelatihan TPK Kabupaten/Kota di setiap Kab/Kota. Dimana ToT TPK Provinsi dibiayai oleh dana pusat dan diselenggarakan selama 5 (lima) hari dengan durasi 46 jam pelatihan bagi peserta guru mata pelajaran dan pengawas. Sedangkan untuk peserta Kasikur yang menangani SMP dari Provinsi dan Kab/Kota, pelatihan berdurasi 3 (tiga) hari dengan 30 jam pelatihan.

- 5) ToT Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kab/Kota
ToT TPK Kab/Kota dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan dana dekonsentrasi. Narasumber TPK Kab/Kota berasal dari TPK Provinsi yang telah dilatih oleh Direktorat Pembinaan SMP. Jumlah TPK Kab/Kota yang dilatih untuk setiap Kab/Kota tergantung pada jumlah cluster pada Kab/Kota yang bersangkutan. Bila tersedia dana yang mencukupi, pada setiap 3 (tiga) atau 4 (empat) cluster perlu sekurang-kurangnya ada 1 (satu) TPK Kab/Kota. Setiap tim terdiri dari 11 orang, yaitu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, IPS, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Prakarya, PJOK @ 1 (satu) orang dan 2 (dua) orang pengawas (satu berlatar belakang mata pelajaran Bahasa Indonesia dan satu berlatar belakang mata pelajaran IPA). Tujuan utama dari ToT ini adalah: a) menyiapkan TPK Kab/Kota yang akan bertugas sebagai narasumber pada Pendampingan Kurikulum di sekolah-sekolah sasaran, dan b) merancang action plan pelaksanaan Pendampingan Kurikulum di setiap Kab/Kota. Pelatihan akan berlangsung selama 5 (lima) hari dengan durasi 46 jam pelatihan.

b. Pelaksanaan Pendampingan Implementasi K13

Pelaksanaan pendampingan implementasi K13 di SMP pada tahun 2015 dilakukan melalui pentahapan pelaksanaan pendampingan K13 pada Sekolah Induk Cluster dan Sekolah Imbas, yaitu dengan rinci sebagai berikut :

- 1) Pendampingan IN
Pendampingan selama kegiatan IN dilakukan di sekolah induk cluster 1 (satu)

kali selama 2 (dua) hari dengan durasi 18 jam pelatihan, untuk : a) kelompok guru mata pelajaran, b) kelompok Kepala/Waka Sekolah, c) kelompok Pengelola Perpustakaan, dan d) kelompok Pengelola Laboratorium. Dimana tiap kelompok kerja selama kegiatan IN mesti mempunyai produk yang dihasilkan, yaitu : a) kelompok Guru Mata Pelajaran berupa RPP lengkap dengan instrument penilaian dan media pembelajaran, kelompok Kepala Sekolah, berupa RTL gerakan kebudayaan karakter di sekolah dan RTL pemenuhan SNP, c) kelompok Pengelola Perpustakaan, berupa Perencanaan Perpustakaan Sekolah yang meliputi 7 (tujuh) aspek, antara lain: pembinaan koleksi, SDM, fasilitas, anggaran, bimbingan pemakai perpustakaan, dll.) dan d) kelompok pengelola laboratorium, minimal berupa perencanaan penataan dan pengadministrasian laboratorium

2) Pendampingan ON1 dan ON2

Pendampingan selama kegiatan ON dilakukan di sekolah imbas diperuntukan pada : (a) kelompok guru mata pelajaran, (b) kelompok Kepala Sekolah/Waka, (c) kelompok Pengelola Perpustakaan, (d) kelompok Pengelola Laboratorium, (e) kelompok KTU, dan (f) kelompok Komite Sekolah.

Dimana kegiatan pendampingan ON1 dan ON2 di setiap sekolah imbas masing-masing sekurang-kurangnya 2 (dua) kali program dengan pendekatan holistik tahun ini.

c. Monitoring, Evaluasi dan Laporan

Tujuan Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk: 1) memantau kemajuan program pendampingan kurikulum, 2) mengetahui tingkat keberhasilan program pendampingan kurikulum, dan 3) mengidentifikasi *lesson learned* (kendala, solusi, dan *best practice*) selama program pendampingan kurikulum. Adapun aspek yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi, yaitu meliputi: (1) Kesesuaian antara rancangan dan pelaksanaan kegiatan pendampingan kurikulum dalam hal waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, pelaksana, narasumber, sasaran, cakupan materi, mekanisme, dan output (ketercapaian tujuan); (2) Kendala/masalah yang dihadapi serta penyelesaian yang telah dan/atau akan dilaksanakan; (3) Hal-hal yang mempermudah/ mendukung terlaksananya pendampingan kurikulum; dan 4) *Lesson learned*.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMP, yang terdiri dari unsur pejabat, staf, konsultan, dan tim teknis Direktorat Pembinaan SMP; Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi (Tim Provinsi); serta Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota (Tim Kabupaten/Kota).

Sedangkan waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada saat kegiatan ToT TPK Provinsi dan saat pendampingan kurikulum di Induk Cluster dan/atau di sekolah sasaran pada cluster tersebut. Sejumlah sekolah sasaran ditetapkan sebagai sampel.

Setelah program pendampingan K13 sampai pada waktunya selesai maka kegiatan selanjutnya adalah pelaporan. Pelaporan dilakukan oleh sekolah induk cluster sebagai pertanggungjawaban dan Dinas Pendidikan Provinsi menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program pendampingan kurikulum secara keseluruhan di tingkat provinsi, yang mencakup laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan, serta menyampaikan laporan tersebut kepada Direktorat Pembinaan SMP selambat-lambatnya sebulan setelah kegiatan berakhir. Dimana laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara nasional disusun oleh Direktorat Pembinaan SMP berdasarkan laporan yang disusun oleh masing-masing petugas yang melaksanakan monitoring dan evaluasi di semua provinsi di Indonesia.

C. Penutup

Pelaksanaan K13 di SMP selama ini kecenderungannya banyak kerikil-kerikil tajamnya. Oleh karena itu di tahun 2015 ini pendampingan implementasi K13 didampingi dengan pendekatan yang holistik. Pendampingan K13 dengan pendekatan holistik di SMP ini fokusnya pada proses pemberian bantuan penguatan pelaksanaan K13 yang diberikan kepada semua pemangku kepentingan tiap satuan pendidikan sebagai suatu sistem terutama pada : pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orangtua/komite sekolah, dan pemangku kepentingan sesuai kurikulum yang berlaku agar untuk menjadikan semua unsur sekolah memiliki pemahaman yang sama dan baik mengenai konsep, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan dari kurikulum yang digunakan.

Selama pendampingan kegiatan terdiri dari ON dilakukan di sekolah imbas diperuntukan pada : (a) kelompok guru mata pelajaran, (b) kelompok Kepala Sekolah/Waka, (c) kelompok Pengelola Perpustakaan, (d) kelompok Pengelola Laboratorium, (e) kelompok KTU, dan (f) kelompok Komite Sekolah. Dimana kegiatan pendampingan ini terdiri dari ON1 dan ON2 di setiap sekolah imbas masing-masing sekurang-kurangnya dilakukan 2 (dua) kali. Kegiatan ini pendampingan ini akan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi serta pelaporan yang dilakukan dengan semestinya. Dengan demikian kegiatan pendampingan ini akan berjalan sesuai dengan diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Didik Suhardi. 2015, Panduan Pelaksanaan Pendampingan Kurikulum di Sekolah Menengah Pertama. Jakarta : Direktur Pembinaan SMP
- Kusmoro. 2015, Kerikil-Kerikil Tajam Dalam Implementasi Kurikulum 2013. Pontianak: Buletin Review LPMP Prov. Kalimantan Barat
- Permendikbud. No. 160 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta : Direktur Pembinaan SMP
- Permendikbud. No. 105 Tahun 2014, tentang Pendampingan pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Direktur Pembinaan SMP

*Penulis adalah Widyaiswara LPMP Provinsi Kalimantan Barat

OPTIMALISASI PERANAN PENGAWAS SEKOLAH OLEH PEMERINTAH DAERAH

Oleh : Drs.Poltak Lumban Gaol, MPd*)

Pendahuluan

Keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah sangat ditentukan oleh guru. Disamping penguasaan kompetensi yang memadai, guru juga harus memiliki komitmen tinggi, karena hal ini merupakan faktor pendukung untuk keberhasilan dalam mencapai target proses belajar mengajar. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan fungsional guru dan angka kreditnya dalam pasal 5 menyebutkan bahwa; tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Percepatan laju arus perubahan mengharuskan adanya peningkatan kualitas proses pembelajaran guna menghasilkan manusia-manusia yang memiliki keunggulan kompetitif, baik tingkat lokal maupun global. Oleh karena itu, guru dalam menjalankan tugasnya perlu ada pemantauan, pembinaan maupun pembimbingan, sebagai kendali terhadap penyelenggaraan proses belajar mengajar. Dalam konteks ini, kepala sekolah merupakan penanggungjawab terhadap semua komponen yang mendukung terselenggaranya pendidikan di sekolah terutama pada pengelolaan proses pembelajaran.

Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan melaksanakan fungsi kepemimpinan mengarahkan, memfasilitasi, memantau, memotivasi, menilai dan mengendalikan guru agar melaksanakan pembelajaran yang berkualitas yang muaranya kepada peningkatan mutu hasil belajar peserta didik. Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah internal maupun eksternal yang menghambat proses belajar mengajar di sekolahnya. Mortimer, J.Adler(1982) menegaskan bahwa "the quality of teaching and learning that goes in a school is largely determined by the quality of principals leadership" (mutu belajar mengajar yang terjadi di sekolah adalah ditentukan oleh sebagian besar kepemimpinan kepala sekolah) (dalam Permadi, 2009). Dengan demikian, kepala sekolah adalah tokoh sentral pemegang kendali seluruh pelaksanaan kegiatan-kegiatan maupun program yang akan menentukan keberhasilan pendidikan di sekolahnya.

Kinerja kepala sekolah menjadi salah satu unsur penting dalam upaya meningkatkan mutu sekolahnya. Agar dalam menjalankan tugasnya penuh dengan tanggungjawab, transparan serta akuntabel, maka kepala sekolah harus mendapat bimbingan dan pembinaan dari pengawas sekolah, sehingga dalam menjalankan tugasnya, kepala sekolah memiliki program melalui pedoman dan langkah-langkah yang strategis dalam mencapai tujuan dan target-target sekolah yang telah ditetapkan.

Pengawas sekolah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Pasal 1, ayat(2) menyebutkan bahwa: pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan, selanjutnya pada ayat(4) menyebutkan; kegiatan pengawasan sekolah adalah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan guru. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru Pasal 54 ayat (8) dan (9) menguraikan bahwa pengawas terdiri dari pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran

Tugas Pokok Pengawas Sekolah

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011; Nomor 6 Tahun 2011, pasal 3, menguraikan tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Tugas pokok pengawas satuan pendidikan adalah melakukan pengawasan manajerial terdiri dari pembinaan, pemantauan (standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik & tenaga kependidikan) dan penilaian kinerja sekolah pada satuan pendidikan yang men-

jadi binaannya. Sedangkan tugas pokok pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yaitu melaksanakan pengawasan akademik meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi lulusan) pada guru mata pelajaran di sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan. Pengawasan akademik adalah kegiatan pengawas sekolah membantu guru agar guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga diperoleh hasil belajar peserta didik yang lebih optimal.

Dari ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa: tugas pokok pengawas seko-



lah terdiri dari dua bagian, yaitu (a) melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial (b) membina kemampuan profesional guru dan kepala sekolah melalui kegiatan pelatihan/pembimbingan secara terencana dan berkesinambungan. Maka, pengawas sekolah melalui tugas pokok yang diembannya adalah memberikan bantuan kepada kepala sekolah dan staf sekolah agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah. Dan bantuan yang diberikan kepada guru adalah bantuan profesional guna terselenggaranya kegiatan proses belajar mengajar yang berkualitas.

Optimalisasi Peranan dan Fungsi Pengawas Sekolah

Jika dikaitkan dengan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011, Nomor 6 Tahun 2011, pasal 5, beban kerja pengawas sekolah adalah 37,5(tiga puluh tujuh setengah) jam/minggu, maka kehadiran pengawas sekolah di semua sekolah binaannya, sekurang-kurangnya 3 sampai 4 hari kerja/minggu,1(satu) hari kerja pengawas berada di kantor melakukan analisis terhadap hasil kegiatan kepengawasan, pelaporan maupun tindak lanjut.

Dalam buku kerja pengawas dikatakan bahwa pengawas sekolah memiliki peranan yang signifikan dan strategis dalam proses dan hasil pendidikan yang bermutu di sekolah. Disisi lain telah berkembang isu dan aktualisasi guru untuk mengoreksi kelemahan komitmen dan tanggungjawab pengawas sekolah terhadap tugas pokok yang diembannya. Danim (2002) mengatakan tentang komitmen pengawas terhadap tugas-tugas kepengawasan.

Pertama, sebagian memersepsi keputusan untuk memangku jabatan fungsional atau melakukan mutasi dari instansi sebelumnya ke posisi pengawas untuk memperpanjang masa kerja, tanpa menghilangkan komitmen mereka terhadap "profesi" kepengawasan.

Kedua, sebagian lagi memandang bahwa tugas dan fungsi kepengawasan yang harus dijalankan merupakan panggilan profesi, yang melekat pada dirinya, termasuk kapasitas sebagai PNS. Dalam menjalankan "profesinya" itu, pada umumnya mereka berpendapat bahwa dimensi eksternal, struktural-institusional, keterbatasan sumber daya teknis, dan fasilitatif seringkali menjadi kendala. Meskipun begitu kendala-kendala tersebut tidak mereduksi komitmen mereka untuk menjalankan tugas-tugas kepengawasan. Berkaitan dengan loyalitas, mereka berpendapat bahwa loyalitas pada atasan dan kepada status sebagai PNS lebih dominan daripada loyalitas kepada "profesi" kepengawasan. Loyalitas semacam itu melekat pada dirinya karena sudah mengakar sejak mereka diangkat menjadi PNS dan menduduki aneka jabatan sebelum diangkat sebagai pengawas.

Ketiga, sebagian lagi memandang kepengawasan identik dengan tugas-tugas institusional yang digariskan oleh atasan dan yang melekat pada dirinya selaku PNS. Mereka berpendapat, loyalitas pada atasan dan pada status sebagai PNS adalah mutlak, sedangkan loyalitas pada profesi merupakan hal yang implisit. Persepsi semacam ini mewarnai kinerja keseharian mereka yang cenderung lebih bermental sebagai tenaga administratif daripada sebagai fungsional.

Realita tentang masih belum berfungsinya peranan pengawas sekolah masih tetap menjadi perhatian. Masalah yang mendasar adalah optimalisasi kepengawasan tidak berkembang untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan sekolah – sekolah binaan. Sekolah dan guru belum merasakan dampak positif dari sentuhan professional pengawas sekolah. Paradigma yang berkembang (paling tidak kalangan guru) terhadap jabatan pengawas sekolah, tidak lebih sebagai tempat parkir (buangan) bagi orang-orang yang pernah menduduki ja-



Foto : www.tempo.co

batan tertentu ketika sudah mendekati usia pensiun. Berkembangnya pemahaman tersebut disebabkan faktor intensitas kehadiran dan aktivitas pengawas sekolah yang, hingga saat ini tergolong masih sangat rendah, dan bahkan tidak pernah (sebagian pengawas) hadir di sekolah-sekolah binaan. Hanya saat-saat tugas tertentu, pengawas sekolah mengunjungi sekolah binaannya sebagai bukti pertanggungjawaban profesi, namun masih semu, dangkal, dan tanpa program, yang pada akhirnya tidak memberikan apa-apa bagi peningkatan mutu sekolah.

Disadari, ada beberapa faktor yang mereduksi kinerja pengawas sekolah dan kepengawasan. Faktor penghambat yang menyebabkan tidak optimalnya peran-peran pengawas sekolah tidak bisa lepas dari faktor eksteren, maupun faktor intern pengawas itu sendiri. Berbagai pendapat dan hasil diskusi formal maupun non formal memberi kesimpulan agar mengambil tindakan memperbaiki kondisi kerja dan peningkatan kinerja guna mewujudkan peranan dan fungsi kepengawasan yang efektif dan efisien. Efektifitas kerja ditujukan pada upaya memberdayakan peranan yang dimiliki pengawas sekolah untuk selalu melakukan pembinaan, pemantauan maupun pelatihan terhadap guru dan kepala sekolah, sehingga penyelenggaraan pendidikan di jalur sekolah memenuhi harapan semua pihak. Untuk itu pemerintah daerah diharapkan melakukan reorientasi kebijakan terhadap peranan pengawas sekolah, sehingga optimalisasi peranan pengawas memberikan dampak positif terhadap kemajuan sekolah-sekolah binaannya.

Agar kegiatan proses belajar mengajar terselenggara dengan standar standar yang ditetapkan, pemerintah daerah perlu memberikan dorongan terhadap pengawas sekolah untuk menyesuaikan peranannya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, sehingga kegiatan pembinaan melalui program kerja yang berkesinambungan dapat meningkatkan profesional kepala sekolah dan guru, yang bermuara kepada kualitas lulusan yang kompetitif, baik tingkat lokal, maupun nasional, bahkan internasional. Deskripsi tentang peranan maupun fungsi-fungsi kepengawasan sekolah membutuhkan respon positif dari pemerintah daerah agar melalui peningkatan kinerja melalui optimalisasi peran dan fungsinya diarahkan untuk memiliki tanggung jawab dan komitmen terhadap tugas-tugas pokok pengawas sekolah.

Penutup

Pada dasarnya pendidikan adalah usaha mencerdaskan guna menyiapkan peserta didik agar mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di masa mendatang. Berbagai kalangan masyarakat memahami betapa besarnya peranan sekolah dalam membentuk insan-insan yang cerdas. Maka optimalisasi peranan pengawas sekolah harus menjadi perhatian pemerintah daerah, sehingga, sekolah sebagai sasaran pembinaan menunjukkan peningkatan mutu pengelolaan sekolah, terutama kualitas penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar. Amanat undang-undang tentang tugas pokoknya, bahwa pengawas sekolah memiliki peranan yang signifikan terhadap peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di jalur sekolah, namun pemberdayaan peran dan fungsi-fungsi tersebut belum optimal.

Untuk itu pemerintah daerah diharapkan memberi stimulasi terhadap upaya optimalisasi peran kepengawasan. Optimalisasi peran pengawas sekolah didorong untuk melakukan tugas pokok melalui aktualisasi lingkup kerja kepengawasan guna memenuhi 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam kerja untuk melakukan:

a) Penyusunan Program Pengawasan satuan Pendidikan

- 1) Setiap pengawas satuan pendidikan baik secara berkelompok maupun secara perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan. Program pengawasan terdiri atas (1) program pengawasan tahunan, (2) program pengawasan semester, dan (3) rencana kepengawasan manajerial

(RKM).

- 2) Program pengawasan tahunan pengawas satuan pendidikan disusun oleh kelompok pengawas satuan pendidikan di kabupaten/kota melalui diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan program tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
- 3) Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap pengawas sekolah pada setiap sekolah binaannya. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas program pengawasan penyusunan program semester oleh setiap pengawas satuan pendidikan ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
- 4) Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Penyusunan RKM ini diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu.
- 5) Program tahunan, program semester, dan RKM sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya yang diperlukan, penilaian dan instrumen pengawasan.

b) Melaksanakan Pembinaan

- 1) Kegiatan supervisi kegiatan manajerial meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan manajemen sekolah merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas satuan pendidikan dengan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah binaan.
- 2) Pelaksanaan pembinaan dengan menggunakan format dan instrumen yang ditentukan oleh dinas pendidikan di kabupaten/kota bersangkutan.

c) Melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan SNP

- 1) Kegiatan supervisi pemantauan meliputi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan SNP merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas satuan pendidikan dengan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah binaan.
- 2) Pelaksanaan pembinaan dengan menggunakan format dan instrumen yang ditentukan oleh dinas pendidikan di kabupaten/kota bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2009, Nomor 16 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 2011, Nomor 01/III/PB/2011; Nomor 6 Tahun 2011, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
- Kemdiknas. 2011, Buku Kerja Pengawas Sekolah, Jakarta : Pusat Pengembangan Tendik, Badan PSDM dan PMP Kemdiknas
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2010, Nomor 21 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
- Diknas. 2009, Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas Sekolah, Jakarta: Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Dadi Permadi. 2009, Kepemimpinan Mandiri Kepala Sekolah (Kiat Memimpin Yang Mengembangkan Partisipasi), Bandung: PT Sarana Panca Karya Nusa.
- Sudarwan Danim. 2002, Inovasi Pendidikan: Dalam Upaya Profesionalisme Tenaga Kependidikan, Bandung : CV Pustaka Setia.

*) Penulis adalah Pengawas SMP-SM-SMK Kab.Sanggau

HUBUNGAN ANTARA ILMU DAN KEBUDAYAAN

Oleh :Asep Sutisna *)

A. Latar Belakang

Tuhan menciptakan manusia merupakan makhluk yang paling sempurna, apabila dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain ciptaannya. Sebab manusia dibekali dengan akal dan nalar (*mind and Reason*) manusia dapat menciptakan segala sesuatu yang diinginkannya. Kemampuan menalar yang dimiliki manusia menyebabkan manusia mampu mengembangkan Ilmu pengetahuan yang merupakan rahasia kekuasaan-kekuasaannya. Berbekal Ilmu pengetahuan ini manusia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang indah dan mana yang jelek. Secara terus menerus manusia dipaksa mengambil pilihan mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana tindakan yang baik mana tindakan yang buruk. Dan didalam melakukan pilihan ini manusia dapat berbudaya yang didasari oleh Ilmu pengetahuan.

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat mengembangkan kebudayaan sedangkan binatang juga mempunyai pengetahuan, namun pengetahuan ini terbatas pada kelangsungan hidupnya (*survival*). Seekor kera tahu mana buah jambu yang enak. Seekor anak tikus tahu mana kucing yang ganas. Anak tikus tersebut tentu saja diajari induknya untuk sampai pada pengetahuan bahwa kucing itu berbahaya.

Sejauh ini hampir semua kemampuan pemikiran manusia didominasi oleh pendekatan filsafat. Pengetahuan manusia yang dihasilkan melalui proses berpikir selalu digunakannya untuk menyingkap tabir ketidaktahuan dan mencari solusi masalah kehidupan tidak terlepas dari lingkungan kebudayaannya. Akan tetapi, sebelum sampai pada pembicaraan ilmu dan kebudayaan. Ilmu Pengetahuan ini mampu dikembangkan manusia disebabkan dua hal utama, yaitu pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatarbelakangi informasi tersebut. Kedua, yang menyebabkan manusia mampu mengembangkan Ilmu pengetahuannya dengan cepat dan mantap adalah kemampuan berpikir menurut alur kerangka berpikir tertentu (Penalaran).

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan artikel ini adalah ingin mengetahui masalah-masalah tentang :

1. Pengertian Ilmu dan Kebudayaan !
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebudayaan !
3. Hubungan antara Ilmu dan Kebudayaan !
4. Bagaimana setiap individu (Guru IPS) memahami mata pelajaran sebagai bagian yang saling berhubungan dan membentuk satu pemahaman yang utuh.

C. Apa itu Ilmu dan Kebudayaan ?

1. Pengertian Ilmu

Seperti diketahui Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan ilmu dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Ciri-ciri keilmuan ini didasarkan pada jawaban yang diberikan ilmu terhadap ketiga pertanyaan pokok yaitu :

- Apakah yang ingin kita ketahui ?
- Bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan ?
- Dan apakah nilai pengetahuan tersebut bagi kita ?

Kunci pembukaan itu adalah bagaimana mereka menjawab ketiga masalah pokok tersebut yang merupakan titik tolak dalam pengembangan pemikiran selanjutnya.

Ilmu merupakan salah satu dari buah pemikiran manusia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini . *Ontologi* membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau, dengan perkataan lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang “ada”. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan mengenai objek tersebut ? untuk menjawab pertanyaan itu maka kita berpaling kepada epistemologi : yakni teori pengetahuan. Akhirnya dalam menjawab pertanyaan ketiga tentang nilai kegunaan nilai pengetahuan tersebut maka kita berpaling kepada aksiologi: yakni teori tentang nilai. Setiap bentuk buah pemikiran manusia dapat dikembalikan pada dasar-dasar ontologi, epistemologi dan aksiologi dari pemikiran yang bersangkutan. Analisis kefalsafahan ditinjau dari tiga landasan ini akan membawa kita kepada hakekat buah pemikiran tersebut. Demikian juga kita akan mempelajari ilmu ditinjau dari titik tolak yang sama untuk mendapatkan gambaran yang sedalam-dalamnya.

Ilmu membatasi diri hanya kepada kejadian-kejadian yang bersifat empiris. Obyek penelaahan ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh pancaindera manusia. Dalam batas-batas tersebut maka ilmu mempelajari objek empiris seperti batu-batuan, binatang, tumbuh-tumbuhan, hewan atau manusia itu sendiri . Ilmu mempelajari berbagai gejala dan peristiwa yang menurut anggapannya mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Berdasarkan objek yang ditelaahnya, maka ilmu dapat disebut sebagai suatu pengetahuan empiris, dimana objek-objek yang berbeda diluar jangkauan manusia tidak termasuk kedalam bidang penelaahan keilmuan tersebut.

Untuk mendapat pengetahuan ilmu membuat beberapa asumsi mengenai objek-objek empiris. Asumsi ini perlu , sebab pernyataan asumsi inilah yang memberi arah dan landasan bagi kegiatan penelaahan kita . Sebuah pengetahuan baru dianggap benar selama kita bisa menerima asumsi yang dikemukakannya. Semua

teori keilmuan mempunyai asumsi-asumsi ini, baik yang dinyatakan secara tersurat maupun tersirat . Contoh Sebuah perusahaan Sandal dalam rangka penelitian mengenai pemasaran sandalnya mengiriskan dua regu peneliti kesuatu daerah yang sama . Fakta yang ditemukan oleh kedua regu ini adalah bahwa tak seorangpun menggunakan sandal. Namun berdasarkan fakta yang sama ini kedua regu peneliti itu sampai pada kesimpulan yang berbeda. Regu pertama menyimpulkan untuk tidak membangun pabrik sandal didaerah itukarena tidak akan ada pembelinya.



Sedangkan regu kedua justru sebaliknya dimana mereka berkesimpulan bahwa semua orang akan berbondong-bondong membeli sandal.

Apakah yang menyebabkan perbedaan penarikan kesimpulan yang bertentangan ini ? sebabnya terletak dalam asumsi yang melandasi kedua penarikan kesimpulan tersebut. Regu pertama mempunyai asumsi bahwa kenyataan itu tak bisa diubah: biar apapun usaha yang dijalankan orang-orang itu tetap takkan mau memakai sandal. Regu kedua mempunyai asumsi yang bertentangan. Menurut anggapan-nya, kenyataan bahwa orang-orang itu tidak memakai sandal bukanlah suatu yang tidak bisa diubah: dengan beberapa perlakuan yang tepat kita bisa mengubah kebudayaan tidak bersandal menjadi kebudayaan bersandal. Hal ini menunjukkan bahwa kedua asumsi yang berbeda kita sampai pada kesimpulan yang berbeda pula. Lalu kesimpulan mana yang akan dipilih ? Dalam keadaan seperti ini maka kita akan memilih kesimpulan yang mempunyai asumsi yang dapat kita terima. Kalau kita beranggapan bahwa biar dengan cara apapun juga orang yang bertelanjang kaki tidak bisa dipaksa memakai sandal maka kita memilih kesimpulan pertama. Demikian pula sebaliknya.

Ilmu menganggap bahwa obyek-obyek empiris yang menjadi bidang penelaahannya mempunyai sifat kergaman, memperlihatkan sifat berulang dan semuanya jalin menjalin secara teratur. Suatu peristiwa tidaklah terjadi secara kebetulan namun tiap peristiwa mempunyai pola tetap yang teratur. Bahwa hujan turun diawali dengan awan tebal dan langit mendung, hal ini bukanlah merupakan suatu kebetulan tetapi memang polanya sudah demikian. Kejadian ini akan terulang dengan pola yang sama. Alam merupakan suatu sistem yang teratur yang tunduk kepada hukum-hukum tertentu.

2. Pengertian Kebudayaan

Menurut Koentjaraningrat (1980) kata “Kebudayaan” berasal dari kata Sanskerta *budhaya* , yaitu bentuk jamak dari *budhi* yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan “hal-hal yang bersangkutan dengan akal”. Sedangkan kata “budaya” merupakan perkembangan majemuk dari kata “budi daya” yang berarti “daya dari budi” yang berupa cipta, rasa, dan karsa, dengan kebudayaan yang berarti hasil cipta, rasa, dan karsa.

Kebudayaan adalah seluruh hasil usaha manusia, baik berupa benda ataupun hanya berupa buah pikiran dan alam penghidupan oleh R. Soekmono.

Kebudayaan ataupun yang disebut peradaban, mengandung pengertian yang luas, meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat (kebiasaan), dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat (Taylor, 1897). Sedangkan menurut Ki Hadjar Dewantara yang disebut kebudayaan adalah Buah budi manusia dalam hidup bermasyarakat. Bahkan mengemukakan Konsep TRIKON :

- Kontinuitas
- Konvergensi
- Konsentrisitas

Dalam era globalisasi sekarang ini perlu diusahakan terjadinya akulturasi, bukan sekedar asimilasi, dalam perpaduan budaya. Dalam hal ini Konsep Trikon sangat diperlukan.

Mempelajari pengertian kebudayaan bukan suatu kegiatan yang mudah, mengingat banyaknya batasan konsep dari berbagai literatur, baik yang berwujud ataupun yang abstrak yang secara jelas menunjukkan jalan hidup bagi kelompok orang (masyarakat). Kebudayaan sebagai konsep umum tentu terlalu ‘besar’ untuk dipahami. Para sarjana antropologi mengkaji sampai ke unsur-unsur, dan atau, sampai ke unsur terkecil, ke hal khusus. Unsur-unsur yang ada di setiap kebudayaan disebut *cultural universal*. Artinya ada pada setiap kebudayaan. C. Kluckhohn dalam bukunya *Universal Categories of Culture* (1953) membahas kerangka-kerangka kebudayaan yang kemudian dijadikan kerangka umum. Berdasarkan itu pulalah, Koentjaraningrat (200: 203-204) memaparkan 7 unsur kebudayaan, yaitu:

- a. Bahasa
- b. Sistem pengetahuan
- c. Organisasi sosial
- d. Sistem peralatan hidup dan teknologi

- e. Sistem mata pencaharian hidup
- f. Sistem religi
- g. Kesenian

Menganalisis konsep kebudayaan perlu dilakukan dengan pendekatan dimensi wujud dan isi dari wujud kebudayaan.

- Menurut dimensi wujudnya kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu
- Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dsb.
- Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat,
- Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia

Walaupun demikian, menurut Kluckhohn (1951) hampir semua antropolog Amerika setuju dengan dalil proposisi yang diajukan oleh Herkovits dalam bukunya yang berjudul *Man and His works* tentang teori kebudayaan yaitu:

- a. kebudayaan dapat dipelajari
- b. kebudayaan berasal atau bersumber dari segi biologis, lingkungan, psikologis, dan komponen sejarah eksistensi manusia.
- c. kebudayaan mempunyai struktur
- d. kebudayaan dapat dipecah-pecah ke dalam berbagai aspek
- e. kebudayaan bersifat dinamis
- f. kebudayaan mempunyai variabel
- g. kebudayaan memperlihatkan keteraturan yang dapat dianalisis dengan metode ilmiah
- h. kebudayaan merupakan alat bagi seseorang (individu) untuk mengatur keadaan totalnya dan menambah arti kesan kreatif

Pengertian kebudayaan yang dikemukakan oleh E.B. Taylor maupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Herkovits masih bersifat luas sehingga pengkajian kebudayaan sangat bervariasi. Menurut Kroeber dan Kluckhohn (1950) kebudayaan, definisinya adalah kebudayaan terdiri atas berbagai pola, bertingkah laku, mantap, pikiran, perasaan dan reaksi yang diperoleh dan terutama diturunkan oleh simbol-simbol yang menyusun pencapaiannya secara tersendiri dari kelompok-kelompok manusia, termasuk di dalamnya perwujudan benda-benda materi; pusat esensi kebudayaan terdiri atas tradisi cita-cita atau paham, dan terutama keterikatan terhadap nilai-nilai. Kebudayaan atau culture adalah keseluruhan pemikiran dan benda yang dibuat atau diciptakan oleh manusia dalam perkembangan sejarahnya. Ruth Benedict melihat kebudayaan sebagai pola pikir dan berbuat yang terlihat dalam kehidupan sekelompok manusia dan yang membedakannya dengan kelompok lain.

Kebudayaan sifatnya bermacam-macam, akan tetapi oleh karena semuanya adalah buah adab (keluhuran budi), maka semua kebudayaan selalu bersifat tertib, indah berfaedah, luhur, memberi rasa damai, senang, bahagia, dan sebagainya. Sifat kebudayaan menjadi tanda dan ukuran tentang rendah-tingginya keadaban dari masing-masing bangsa (Dewantara; 1994).

3. Faktor -Faktor Perubahan Kebudayaan

faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan menurut Soejono Soekanto adalah

- a. Faktor – faktor yang mendorong jalannya proses perubahan :
 - Kontak dengan bangsa lain
 - System pendidikan yang maju
 - Sikap menghargai karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju
 - Toleransi terhadap perubahan-perubahan menyimpang
 - System lapisan masyarakat yang terbuka
 - Penduduk yang heterogen
 - Ketidak puasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu
 - Orientasi kemuka
 - Nilai meningkatkan taraf hidup
- b. Faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan
 - Kurangnya hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain
 - Perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat
 - Sikap masyarakat yang tradisional
 - Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau *vested interest*
 - Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan
 - Prasangka terhadap hal-hal yang baru/asing
 - Hambatan ideologis
 - Kebiasaan
 - Nilai pasrah
- c. Peristiwa-peristiwa perubahan Kebudayaan :
 - *Cultural Lag* adalah perbedaan antara taraf kemajuan berbagai bagian dalam kebudayaan suatu masyarakat.
 - *Cultural Survival*. Istilah ini ada sangkut pautnya dengan cultural Lag, karena mengandung pengertian adanya suatu cara tradisional yang tak mengalami perubahan sejak dahulu sampai sekarang. Cultural survival adalah konsep yang lain, dalam arti bahwa konsep ini dipakai untuk menggambarkan suatu praktik yang telah kehilangan fungsi pentingnya seratus persen, yang tetap hidup dan berlaku semata-mata hanya di atas landasan adat istiadat semata-mata. Jadi pengertian lag dapat dipergunakan paling sedikit dalam dua arti, yaitu:

- Suatu jangka waktu antara terjadinya penemuan baru dan diterimanya penemuan baru tadi,
- Adanya perubahan dalam pikiran manusia dari alam pikiran tradisional ke alam pikiran modern.
- *Cultural Conflict* (Pertentangan Kebudayaan). Pertentangan Kebudayaan ini muncul sebagai suatu akibat relatifnya kebudayaan. Hal ini terjadi akibat konflik langsung antar kebudayaan. Faktor-faktor yang menimbulkan konflik kebudayaan adalah keyakinan - keyakinan yang berbeda sehubungan dengan berbagai masalah aktivitas berbudaya. Konflik ini dapat terjadi diantara anggota-anggota kebudayaan yang satu dengan anggota-anggota kebudayaan yang lain.
- *Cultural Shock* (Guncangan Kebudayaan). *Cultural Shock* pertama kali dikemukakan oleh Kalervo Oberg (1958) untuk menyatakan apa yang disebutnya sebagai suatu penyakit jabatan dari orang-orang yang tiba-tiba dipindahkan ke dalam suatu kebudayaan yang berbeda dari kebudayaannya sendiri, semacam penyakit mental yang tak disadari oleh korbannya. Hal ini akibat kecemasan karena orang itu kehilangan atau tak melihat lagi semua tanda dan lambang pergaulan sosial yang sudah dikenalnya dengan baik. Ada empat tahap yang DAPAT membentuk *Cultural Shock* :
 1. Tahap Inkubasi; kadang-kadang disebut tahap bulan madu, sebagai suatu pengalaman baru yang menarik.
 2. Tahap Krisis ; ditandai dengan suatu perasaan dendam, pada saat inilah terjadi korban Cultural Shock.
 3. Tahap kesembuhan; korban mampu melampaui tahap kedua, hidup dengan damai.
 4. Tahap penyesuaian diri; sekarang orang tersebut sudah membanggakan sesuatu yang dilihat dan dirasakannya dalam kondisi yang baru itu, rasa cemas dalam dirinya sudah berlalu.
- d. Penyesuaian diri antar budaya dipengaruhi oleh berbagai faktor :
 - 1) Intern : Menurut Brislin (1981) ialah faktor :
 - Watak (*Traits*)
 - Kecakapan (*Skill*)
 - Sikap (*attitude*)

Menurut Allport yang dimaksud sikap disini adalah kesiagaan mental atau saraf yang terbina melalui pengalaman yang memberikan pengarahan atau pengaruh terhadap bagaimana seseorang menanggapi segala macam obyek atau situasi yang dihadapinya. Contoh : sikap terus terang, berprasangka baik atau buruk, curiga, optimis, pesimis, ekstrim, moderat, toleran, skeptis dan sebagainya.

- 2) Faktor Ekstern yang berpengaruh terhadap Penyesuaian diri antar budaya adalah :
 - Besar kecilnya perbedaan antara kebudayaan tempat asalnya dengan kebudayaan lingkungan yang dimasukinya.
 - Pekerjaan yang dilakukannya, yaitu apakah pekerjaan yang dilakukannya itu dapat ditolerir dengan latar belakang pendidikannya atau pekerjaan sebelumnya.
 - Suasana lingkungan tempat ia bekerja, suasana lingkungan yang terbuka akan mempermudah seseorang untuk menyesuaikan diri bila dibandingkan dengan suasana lingkungan yang tertutup.

D.HUBUNGAN ANTARA ILMU DAN KEBUDAYAAN

Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan dan pengetahuan merupakan unsur dari kebudayaan. Kebudayaan disini merupakan seperangkat sistem nilai, tata hidup dan sarana manusia dalam kehidupannya. Ilmu dan kebudayaan berada dalam posisi yang saling tergantung dan saling mempengaruhi. Pada satu pihak pengembangan ilmu dalam suatu masyarakat tergantung dari kondisi kebudayaannya. Sedangkan di pihak lain, pengembangan ilmu akan mempengaruhi jalannya kebudayaan. Ilmu terpadu secara intim dengan keseluruhan struktur sosial dan tradisi kebudayaan, kata Talcot Parsons, mereka saling mendukung satu sama lain : dalam beberapa tipe masyarakat ilmu dapat berkembang dengan pesat, demikian pula sebaliknya, masyarakat tersebut tak dapat berfungsi dengan wajar tanpa didukung perkembangan yang sehat dari ilmu dan penerapannya.

Dalam rangka pengembangan kebudayaan ilmu mempunyai peranan ganda. Pertama, ilmu merupakan sumber nilai yang mendukung terselenggaranya pengembangan kebudayaan. Kedua, ilmu merupakan sumber nilai yang mengisi bentuk watak. Pada kenyataannya kedua fungsi ini terpadu satu sama lain dan sukar dibedakan.

Pengkajian pengembangan kebudayaan kita tidak dapat dilepaskan dari pengembangan ilmu. Dalam kurun dewasa ini yang dikenal sebagai kurun ilmu dan teknologi, kebudayaan kita pun tak terlepas dari pengaruhnya, dan mau tak mau harus ikut memperhitungkan faktor ini. Sayangnya yang lebih dominan pengaruhnya terhadap kehidupan kita adalah teknologinya yang merupakan produk dari kegiatan ilmiah. Sedangkan hakikat keilmuan itu sendiri yang merupakan sumber nilai yang konstruktif bagi pengembangan kebudayaan pengaruhnya dapat dikatakan minim sekali.

Untuk itu pengkajian akan difokuskan kepada usaha untuk meningkatkan peranan ilmu sebagai sumber nilai yang mendukung pengembangan kebudayaan. Dalam hal ini maka pertama sekali akan dikaji hakekat ilmu dan nilai-nilai yang dikandungnya serta pengaruhnya terhadap pengembangan kebudayaan.

1. Ilmu sebagai suatu cara berpikir

Ilmu merupakan suatu cara berpikir dalam menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang dapat diandalkan. Berpikir bukan satu-satunya cara dalam mendapatkan pengetahuan, demikian juga ilmu bukan satu-satunya produk dari kegiatan berpikir. Ilmu merupakan produk dari proses berpikir menurut langkah-langkah tertentu yang secara umum dapat disebut sebagai berpikir ilmiah.

Berpikir ilmiah merupakan kegiatan berpikir yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut pada hakekatnya mencakup dua kriteria utama yakni, pertama, berpikir ilmiah harus mempunyai alur jalan pikiran yang logis dan, kedua, pernyataan yang bersifat logis tersebut harus didukung oleh fakta empiris. Persyaratan pertama mengharuskan alur jalan pikiran kita untuk konsisten dengan pengetahuan ilmiah yang telah ada sedangkan persyaratan kedua mengharuskan kita untuk menerima pernyataan yang didukung oleh fakta sebagai pernyataan yang benar secara ilmiah. Pernyataan yang telah teruji kebenarannya ini kemudian memperkaya khasanah pengetahuan ilmiah yang disusun secara sistematis dan kumulatif. Kebenaran ilmiah ini tidaklah bersifat mutlak sebab mungkin saja pernyataan yang sekarang logis kemudian akan bertentangan dengan pengetahuan ilmiah baru atau pernyataan yang sekarang didukung oleh fakta ternyata kemudian ditentang oleh penemuan baru. Kebenaran ilmiah terbuka bagi koreksi dan penyempurnaan.

Dari hakikat berpikir ilmiah tersebut maka kita dapat menyimpulkan beberapa karakteristik dari ilmu. Adapun karakteristik tersebut adalah :

- Pertama, bahwa ilmu mempercayai rasio sebagai alat untuk mendapat pengetahuan yang benar;
- Kedua adanya alur jalan pikiran yang logis yang konsisten dengan pengetahuan yang telah ada;
- Ketiga, pengujian secara empiris sebagai kriteria kebenaran obyektif;
- Keempat, mekanisme yang terbuka terhadap koreksi.

Dengan demikian maka manfaat nilai yang dapat ditarik dari karakteristik ilmu ialah sifat rasional, logis, obyektif dan terbuka. Disamping itu sifat kritis merupakan karakteristik yang mendasari keempat sifat tersebut.

2. Ilmu sebagai azas Moral

Ilmu merupakan kegiatan berpikir untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, atau secara lebih sederhana, ilmu bertujuan untuk mendapatkan kebenaran. Kriteria kebenaran dalam ilmu adalah jelas sebagaimana yang dicerminkan oleh karakteristik berpikir. Kriteria kebenaran ini pada hakikatnya bersifat otonom dan terbebas dari struktur kekuasaan diluar bidang keilmuan. Artinya dalam menetapkan suatu pernyataan apakah itu benar atau tidak maka seorang ilmuwan akan mendasarkan penarikannya kesimpulan kepada argumentasi yang terkandung dalam pernyataan itu dan bukan kepada pengaruh yang berbentuk kekuasaan dari kelembagaan yang mengeluarkan pernyataan itu. Hal ini sering menempatkan kaum ilmuwan dalam posisi yang bertentangan dengan pihak yang berkuasa yang mungkin mempunyai kriteria kebenaran yang lain. Kriteria ilmuwan dan politik dalam membuat pernyataan adalah berbeda seperti yang dinyatakan ahli fisika *Szilard*: jika seorang ilmuwan mengatakan sesuatu maka rekan-rekannya pertama sekali akan bertanya apakah yang dinyatakannya itu mengandung kebenaran atau tidak. Sebaliknya jika seorang politikus mengatakan sesuatu maka rekan-rekannya pertama sekali akan bertanya "Mengapa ia menyatakan hal itu ? dan baru kemudian, mereka mempertanyakan apakah pernyataan itu mengandung kebenaran.

Disamping itu kebenaran bagi kaum ilmuwan mempunyai kegunaan khusus yakni kegunaan yang universal bagi umat manusia dalam meningkatkan martabat kemanusiaannya. Secara nasional maka ilmuwan tidak mengabdikan golongan, kelompok-kelompok lainnya. Secara internasional kaum ilmuwan tidak mengabdikan ras, ideologi dan faktor-faktor pembatas lainnya.

Dua karakteristik ini merupakan azas moral bagi kaum ilmuwan yakni meninggikan kebenaran dan pengabdian secara universal. Tentu saja dalam kenyataannya pelaksanaan azas moral ini tidak mudah sebab sejak tahap perkembangan ilmu yang sangat awal kegiatan ilmiah ini dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dari luar. Hal ini, menurut *Bachtari Rifai*, lebih menonjol lagi di negara-negara yang sedang berkembang, karena sebagian besar kegiatan keilmuan merupakan kegiatan aparaturnya.

3. Kerah Peningkatan Peranan Keilmuan

Mesti disadari bahwa keadaan masyarakat kita sekarang masih jauh dari tahap masyarakat yang berorientasi kepada ilmu. Bahkan dalam masyarakat telah terdipunkan ilmu masih merupakan koleksi teori-teori yang bersifat akademik yang sama sekali tidak fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Memperhatikan keadaan seperti ini maka diperlukan langkah-langkah yang sistemik dan sistemik untuk meningkatkan peranan dan kegiatan keilmuan yang pada pokoknya mengandung beberapa pemikiran seperti dibawah ini :

- Pertama, ilmu merupakan bagian dari kebudayaan dan oleh sebab itu langkah-langkah kearah peningkatan peranan dan kegiatan keilmuan harus memperhatikan situasi kebudayaan masyarakat kita. Hakikat ilmu itu sendiri adalah universal namun peranannya dalam kehidupan tidaklah terlepas dari kebudayaan secara keseluruhan. Langkah-langkah yang gagabah dalam mempromosikan ilmu, bukan saja akan berakhir dengan kegagalan, namun lebih penting lagi akan menimbulkan perasaan antipati terhadap segenap yang berkonotasi keilmuan. Untuk itu harus ditempuh pendekatan yang bersifat edukatif dan persuasif dengan menghindari konflik-konflik yang tidak perlu. Re-intepretasi dari nilai-nilai yang ada harus merupakan titik tolak dalam pengajuan argumen-

tasi mengenai keilmuan.

- Kedua, ilmu merupakan salah satu cara dalam menemukan kebenaran. Disamping ilmu masih terdapat cara-cara lain yang sah sesuai dengan lingkup pendekatan dan permasalahannya masing-masing. Azas ini harus digaris bawahi agar usaha mempromosikan ilmu tidak menjurus kepada timbulnya gejala yang disebut *scientisme*; suatu gejala yang disebut *Gerald Holton*, sebagai "kecanduan terhadap ilmu dengan kecenderungan untuk membagi semua pemikiran kepada dua golongan yakni ilmu dan omong kosong". Pendewaan terhadap akal sebagai satu-satunya sumber kebenaran harus dihindarkan.
- Ketiga, asumsi dasar dari semua kegiatan dalam menemukan kebenaran adalah rasa percaya terhadap metode yang dipergunakan dalam kegiatan tersebut. Pertanyaan ini berlaku pula bagi kaum ilmuwan. Mengapa mereka mempergunakan metode ilmiah dalam menemukan kebenaran ? jawabannya tentu saja ialah karena mereka percaya kepada metode ilmiah sebagai cara menemukan kebenaran yang dapat diandalkan. Demikian juga halnya dengan mereka yang mempergunakan cara-cara lain dalam menemukan kebenaran. Dalam masyarakat kita maka percaya kepada cara berpikir seseorang dilandasi dengan kepercayaan terhadap pribadi orang tersebut. Oleh sebab itu maka salah satu langkah yang penting dalam meningkatkan peranan keilmuan dalam masyarakat kita adalah dengan jalan meningkatkan integritas ilmuwan dalam lembaga keilmuan. Dalam hal ini maka modus operasinya adalah melaksanakan dengan konsekuen kaedah moral dan keilmuan.
- Keempat, pendidikan keilmuan harus sekaligus dikaitkan dengan pendidikan moral. Makin pandai seseorang dalam bidang keilmuan maka harus makin luhur landasan moralnya. Harus digaris bawahi bahwa etika dalam kegiatan keilmuan merupakan kaidah imperatif dengan pelanggaran mempunyai akibat yang serius. Kebudayaan "nyontek" hasil pemikiran orang lain dan "membajak" hasil karya orang lain, yang sekarang ini merajalela dalam bidang pendidikan dan penciptaan, tidaklah bersifat mendidik dan harus segera dihilangkan. Undang-undang Hak cipta dan tradisi keilmuan yang sehat harus segera dikembangkan.
- Kelima, pengembangan bidang keilmuan harus disertai dengan pengembangan dalam bidang filsafat terutama yang menyangkut keilmuan. Pengembangan yang seimbang antara ilmu dan filsafat akan bersifat saling menunjang dan saling mengontrol terutama terhadap landasan epistemologi (metode) dan aksiologi (nilai) keilmuan. Filsafat ilmu seyogyanya diberikan di pendidikan tinggi untuk lebih mengenalkan mahasiswa kepada ilmu sebagai suatu kegiatan berpikir dalam menemukan kebenaran. Filsafat ilmu ini mencakup terutama hakikat metode ilmiah dan sarana-sarana berpikir ilmiah yakni bahasa, logika, matematika dan statistika dalam kegiatan ilmu. Pembahasan dilakukan secara sistematis dan terpadu ditinjau dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dengan tujuan akhir untuk mengetahui hakikat ilmu dan peranan bahasa, logika, matematika dan statistika dalam kegiatan ilmu.
- Keenam, kegiatan ilmiah haruslah bersifat otonom yang terbebas dari kekangan struktur kekuasaan. Pengendalian kegiatan keilmuan seperti yang pernah dilakukan pemerintah NAZI dengan menyensor semua disertasi doktor atau pengarahan pemerintah Uni Soviet terhadap kegiatan keilmuan yang menimbulkan *Lysenko-isme* akan merugikan ilmu itu sendiri dan harus dihindarkan. Ilmu tidak dapat berkembang tanpa kontrol kaum ilmuwan sendiri, kata *Bernard Barber*, dan otonomi ini diberikan terhadap ilmu dalam dunia modern. Untuk itu kebebasan seminar akademik yang didukung oleh tradisi keilmuan yang sehat harus dijunjung tinggi.

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas jelaslah bahwa hubungan antar Ilmu dengan Kebudayaan saling ketergantungan sebab Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan dan pengetahuan merupakan unsur dari kebudayaan. Jadi jelas bahwa ilmu merupakan bagian dari kebudayaan dan oleh sebab itu langkah-langkah kearah peningkatan peranan dan kegiatan keilmuan harus memperhatikan situasi kebudayaan masyarakat kita. Hakikat ilmu itu sendiri adalah universal namun peranannya dalam kehidupan tidaklah terlepas dari kebudayaan secara keseluruhan.

Asumsi dasar dari semua kegiatan dalam menemukan kebenaran adalah rasa percaya terhadap metode yang dipergunakan dalam kegiatan tersebut. Pendidikan keilmuan harus sekaligus dikaitkan dengan pendidikan moral. Kegiatan ilmiah haruslah bersifat otonom yang terbebas dari kekangan struktur kekuasaan.

DAFTAR FUSTAKA

- Bakker; (1984). Filsafat kebudayaan: sebuah Pengantar, Penerbit Kanisius dan BPK Gunung Mulia, Yogyakarta
- R. Soekmono; (1986) Pengantar Sejarah Kebudayaan, Penerbit Kanisius Yogyakarta
- Koentjoroningrat (1986), Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan, PT. Gramedia Jakarta.
- M. Munandar Sulaeman, (1998), Ilmu Budaya Dasar: Suatu Pengantar, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.
- Suriasumantri, Jujun S (2006), Ilmu dalam Perspektif, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Suriasumantri, Jujun S (2007), Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- <http://grelovejogja.wordpress.com/2007/04/17/fenomena-konsep-konsep-kebudayaan-Indonesia/>.

*) Penulis adalah Widayaiswara LPMP Provinsi Kalimantan Barat

PERAN, DAN TANGGUNG JAWAB IMPLEMENTASI KURIKULUM PADA BERBAGAI LEVEL

Oleh :Suhendri,S .Pd,M. Sc *

Kurikulum merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga penyelenggara pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan tertentu tersebut sebuah kurikulum disusun secara terencana dan memuat gambaran seperti apa kompetensi yang akan dimiliki oleh para siswa atau masyarakat di masa depan. Tujuan yang terdapat dalam suatu kurikulum tidak terlepas dari pengaruh dan kepentingan dan situasi pemerintahan, dan sosial masyarakat. Sehingga perubahan kurikulum dalam satu periode tertentu merupakan hal yang akan terus terjadi mengikuti perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa Kurikulum merupakan satu bagian dinamis dalam dunia pendidikan yang selalu mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu.

Di Indonesia, titik awal dari keberadaan kurikulum di mulai dari adanya suatu rencana pengajaran yang pada tahun 1947. Ini merupakan kurikulum yang digunakan pada masa awal kemerdekaan Indonesia sehingga masih terasa pengaruh dari kurikulum yang selama ini dikendalikan oleh kepentingan Belanda dan Jepang. Selanjutnya kita juga mengenal istilah rencana pengajaran terurai pada tahun 1952. Pada masa ini proses pengajaran telah dilengkapi dengan silabus dan setiap guru diarahkan untuk mengajar satu mata pelajaran tertentu. Kemudian muncul kurikulum Rencana Pendidikan Dasar yang dimulai pada tahun 1964. Pada era kurikulum ini pendidikan diarahkan untuk mengembangkan daya cipta, rasa, karsa, karya dan moral peserta didik.

Empat tahun kemudian dikeluarkan kurikulum baru yaitu Kurikulum 1968. Ini merupakan pengganti dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini membawa misi untuk membentuk manusia Indonesia berjiwa Pancasila. Kurikulum 1968 ini merupakan suatu kurikulum yang lahir pada masa pergantian pemerintahan dari orde lama ke orde baru sehingga kepentingan politik ikut mewarnai kehadiran kurikulum ini. Lalu kita kenal pula Kurikulum 1973 atau yang dikenal dengan nama Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP). Kurikulum ini mempunyai misi untuk lebih memberdayakan peran sekolah dalam pembangunan nasional dengan memberikan kesempatan yang luas pada peserta didik untuk berpartisipasi mempraktekan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di bangku sekolah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kurikulum ini berakhir yaitu dengan diluncurkannya Kurikulum 1975.

Dalam kurikulum ini telah dikenal istilah satuan pelajaran yang merupakan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh guru di dalam kelas. Isi dan tujuan pengajaran dibuat secara rinci dalam suatu prosedur pengembangan sistem instruksional atau yang dikenal dengan nama PPSI. Pada masa – masa berikutnya masih terus terjadi perkembangan – perkembangan kurikulum di Indonesia yaitu dengan munculnya Kurikulum 1984, Kurikulum 1997, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Tahun 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan yang terakhir adalah Kurikulum 2013. Setiap kurikulum tersebut memiliki misi dan isi tersendiri yang merupakan pengembangan atau pun pergantian dari Kurikulum sebelumnya.

Karena harus ada kurikulum?

Pergantian kurikulum atau pembaharuan kurikulum sering kali menimbulkan perdebatan. Ketika Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dikeluarkan pada tahun 2004, kita mendengar ada pihak yang ragu bahkan tidak setuju dan ada pula yang menyambut kehadiran kurikulum baru tersebut dengan sikap optimis. Sebagian pihak yang tidak setuju dengan kehadiran kurikulum tersebut mengistilahkan KBK sebagai sebuah kurikulum berbasis kebingungan. Sekitar dua tahun kemudian terjadi pengembangan KBK. Beberapa bagian di KBK disempurnakan dan nama KBK diganti dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Tak jauh beda dengan kurikulum sebelumnya kehadiran KTSP juga menuai berbagai kritik dari berbagai pihak yang kontra dengan kehadiran kurikulum yang merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Beberapa respon kurang bagus terhadap kehadiran kurikulum ini adalah ada sebagian orang yang menganggap sebagai KTSP sebagai kurikulum tidak siap pakai. Yang terakhir adalah ketika Kurikulum 2013 atau K13 diluncurkan pada sekitar tahun 2012 yang lalu. Kritikan dan penolakan terhadap kehadiran K13 ini datang dari berbagai pihak. Terlepas dari ada tidaknya kekurangan di dalam kurikulum – kurikulum tersebut diatas, perubahan kurikulum dari waktu ke waktu merupakan suatu hal yang wajar dan harus dilakukan. Ada beberapa alasan kenapa suatu kurikulum mengalami perubahan.

Perkembangan ilmu pengetahuan

Dari waktu ke waktu terjadi perubahan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ilmuwan dan para ahli yang bergerak melakukan berbagai penelitian

dan pengembangan ilmu yang telah ada sehingga tercipta lah suatu konsep dan temuan baru yang belum ada sebelumnya. Contoh nyata dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sosial kemasyarakatan yang ada di sekitar kita adalah perubahan jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Sebelum era reformasi tahun 1997, jumlah provinsi di Indonesia



hanya berjumlah 27, namun dalam era reformasi terjadi berbagai tuntutan masyarakat untuk memekarkan wilayah sehingga terbentuklah provinsi – provinsi dan wilayah baru lainnya. Tentu akan sangat tidak relevan jika saat ini seorang guru pengetahuan sosial masih mengatakan bahwa jumlah provinsi di Indonesia masih 27, sedangkan faktanya sekarang kita memiliki 35 provinsi. Begitu pula ketika seorang guru menjelaskan bagaimana system demokrasi yang ada dinegara kita. Akan sangat tidak relevan jika saat ini kita mengatakan bahwa presiden di republic ini dipilih oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seperti pada masa lalu, sedangkan faktanya saat ini presiden dipilih secara langsung oleh rakyat tanpa melalui perwakilan. Apa yang disampaikan oleh seorang guru pada siswanya tentu lah mengikuti perubahan dan fakta terbaru yang relevan dengan kondisi aktual dan faktual dari bidang studi yang diajarkannya.

Perkembangan teknologi

Pada masa lalu mungkin orang tidak membayangkan teknologi akan berkembang sangat pesat dan maju seperti saat ini. Komputer, laptop, dan smartphone saat ini dengan sangat mudah kita temui di sekitar kita. Teknologi tersebut kini tidak hanya dimiliki oleh kalangan tertentu saja tapi sudah menyebar di berbagai kalangan. Kehadiran teknologi tersebut secara massif ikut memberi perubahan dalam dunia pendidikan.

Materi dan strategi mengajar merupakan bagian dari kurikulum. Proses belajar mengajar kini tidak hanya sebatas menggunakan papan tulis dan teks tercetak saja. Sekolah – sekolah kini banyak yang telah dilengkapi dengan fasilitas seperti komputer, *projector*, dan *internet*. Menggunakan laptop dan *smartphone* yang terhubung ke dunia maya juga merupakan hal yang banyak guru dan siswa masa kini.

Kehadiran teknologi tersebut kini tidak hanya sebatas untuk berkomunikasi tapi juga telah dimanfaatkan dalam bidang pendidikan. Para guru kini lebih mudah mengajar dengan menayangkan materi pelajaran melalui teks, objek dan audio video berbasis komputer. Sebagai contoh pada masa lalu untuk menjelaskan bagaimana bentuk dan pergerakan tata surya kita mungkin hanya dilakukan melalui penjelasan secara verbal. Namun kini para guru cukup memberi penjelasan singkat kemudian mengarahkan siswa untuk mengamati tayangan atau simulasi interaktif yang terkait dengan tersebut dan kemudian melakukan tanya jawab dari hasil pengamatan yang telah dilakukan siswa. Dengan pedagogi atau cara mengajar tertentu dan dengan didukung oleh teknologi maka kegiatan pembelajaran di dalam kelas dapat lebih memberdayakan siswa menjadi lebih aktif. Ini merupakan suatu peran dari teknologi dalam implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran di sekolah.

Antisipasi kebutuhan kompetensi masa depan

Hal lain yang menjadikan suatu kurikulum perlu mengalami perubahan adalah tuntutan kompetensi masa depan. Pada masa lalu mungkin seorang siswa mungkin hanya dengan bekal kemampuan membaca dan menulis maka seseorang sudah dapat dikatakan memiliki kompetensi yang cukup untuk bertahan dalam persaingan dalam kehidupan nyata. Seiring dengan berjalannya waktu terjadi perubahan – perubahan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Kompetensi dalam membaca dan menulis saat ini hanya merupakan bagian dari beberapa kompetensi lain yang harus dimiliki siswa kita dalam menghadapi persaingan dalam kehidupan. Terbukanya interaksi global dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, perdagangan, sosial budaya dan lainnya menuntut seseorang untuk tidak hanya sekedar mampu berkomunikasi dengan pihak luar tapi juga memiliki sikap dan perilaku yang baik dan dapat bekerja sama baik itu antar individu dan kelompok. Ini berarti bahwa di masa depan tidak hanya sekedar literasi dalam membaca menulis dan menguasai materi yang diajarkan di pendidikan formal, lebih dari itu sangat penting untuk menjadi individu yang berkarakter dan memiliki kemampuan berkomunikasi, interaksi, dan berkolaborasi dalam suatu lingkungan masyarakat lokal dan global.

Kurikulum memiliki peranan strategis dalam mendesain dan mempersiapkan generasi kita untuk memiliki kompetensi yang mereka perlukan di masa depan. Untuk itu perlu adanya perubahan dalam proses belajar mengajar di



Foto : nasional.tempo.co

sekolah dari pola pengajaran yang didominasi oleh guru menjadi suatu proses pembelajaran yang lebih bersipat mengarahkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh para siswa. Salah satu cara melakukan pembelajaran yang memberdayakan siswa ini adalah dengan menggunakan pendekatan saintifik. Dengan pendekatan ini siswa diarahkan untuk melakukan berbagai kegiatan pengamatan, belajar melakukan tanya jawab, menggali informasi yang mendalam, menarik kesimpulan dari serangkaian fakta yang ditemukan dan belajar berani tampil mempresentasikan hasil kerja dan ide – ide yang mereka miliki. Selain itu dalam pembelajaran siswa dibiasakan untuk berkolaborasi dalam kelompok untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang diberikan pada mereka. Dengan pola pembelajaran yang lebih menekankan siswa untuk langsung melakukan maka diharapkan mereka akan lebih mengerti serta dapat mendapat pengalaman dalam mempraktekan ilmu yang mereka pelajari, melatih mereka untuk berkolaborasi dalam kelompok dan mengemukakan ide – ide mereka dihadapan orang lain.

Perubahan dalam pendekatan mengajar dalam kurikulum ini merupakan upaya mempersiapkan siswa kita agar kompetensi – kompetensi seperti yang disebutkan diatas yang mereka perlukan di masa depan dapat mereka miliki dan itu semua merupakan modal bagi mereka dalam berkompetisi dalam persaingan global.

Tugas dan Kepentingan pemerintah

Suatu pemerintahan yang sedang berkuasa memiliki peran dan kekuatan dalam membuat dan mengimplementasikan sebuah kurikulum. Salah satu tugas yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pembangunan dalam bidang pendidikan. Terkait dengan kurikulum, pemerintah dapat mengkaji dan mengevaluasi isi dari kurikulum yang sedang digunakan. Jika isi dari kurikulum kurang sesuai lagi dengan berbagai perubahan ilmu pengetahuan, teknologi dan kepentingan masa depan maka pemerintah dapat melakukan revisi agar kurikulum tersebut menjadi lebih relevan. Ini semua merupakan tanda masih berfungsi dan berperannya pemerintah dalam perubahan kurikulum. Selain itu salah satu ukuran keberhasilan dalam pembangunan suatu negara juga akan diukur oleh kegiatan dan keberhasilan apa saja yang telah dilakukan oleh suatu pemerintahan di dalam bidang pendidikan. Maka biasanya akan kita lihat adanya ketika ada suatu ada pergantian suatu pemerintahan maka ada ada revisi dalam isi dan implementasi sebuah kurikulum.

Level Kurikulum

Terdapat beberapa level dalam pengembangan kurikulum yang melibatkan beberapa pihak tertentu. Level tersebut dibagi dalam supra, makro, meso, dan mikro. Yang pertama adalah Level Supra. Ini merupakan level pengembangan kurikulum yang melibatkan beberapa negara dalam suatu wilayah tertentu. Contoh dari pengembangan kurikulum pada level ini adalah

indikator kompetensi berbahasa yang dibuat oleh para ahli dan lembaga pendidikan bahasa terkemuka dari berbagai negara yang digunakan di Eropa. Level selanjutnya adalah level Makro. Ini merupakan level pengembangan kurikulum pada satu negara. Sebagai contoh adalah adanya Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Dasar (KD) dan silabus yang dibuat oleh negara dalam hal ini pemerintah pusat. Jadi level makro ini terkait dengan pembuatan kurikulum dalam skala nasional yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Level yang ketiga yaitu Level Meso. Meskipun kurikulum pada level nasional telah dibuat oleh pemerintah pusat, namun sekolah memiliki kesempatan untuk mengembangkan kurikulum tersebut sesuai dengan kondisi sekolah.

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Kurikulum 2013, terdapat Dokumen 1 dan Dokumen 2 yang dikembangkan oleh tim pengembang kurikulum sekolah. Ini merupakan contoh dari peran sekolah dalam mengembangkan kurikulum pada tingkat sekolah dengan mengacu pada kerangka kurikulum yang dibuat pada level makro. Berikutnya adalah Level Mikro. Level ini terfokus pada peran guru dalam peran guru dalam mengimplementasikan kurikulum, artinya ini terkait dengan proses pembelajaran di dalam kelas. Beberapa hal lain yang terkait langsung dengan implementasi kurikulum pada level ini adalah berbagai sumber belajar dan buku yang digunakan di dalam kelas. Yang terakhir adalah Level Nano. Kurikulum pada level ini merupakan pengembangan kurikulum pada tiap individu siswa. Semua hal yang telah dipelajari oleh siswa di sekolah menuntut mereka untuk mengaplikasikan dan mengembangkan sendiri kompetensi dalam kehidupan nyata mereka. Pengalaman – pengalaman belajar dari tiap siswa juga merupakan bagian dari level nano.

Dari apa yang telah dikemukakan diatas, kita ketahui bahwa dari masa ke masa kurikulum selalu mengalami perubahan dan ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Yang diperlukan adalah kesiapan semua pihak dalam menghadapi perubahan tersebut. Setiap pihak punya peran masing – masing dalam mensukseskan implementasi kurikulum tersebut. Pada level makro, negara berperan dalam membuat desain besar dari suatu kurikulum yang akan digunakan secara nasional, sekolah bertanggung jawab dalam mengembangkan kurikulum yang dibuat pada level nasional dan yang juga penting adalah peran guru dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut dalam proses pembelajaran di kelas. Suatu kurikulum nasional tidak akan berhasil diimplementasikan jika para guru tidak melaksanakannya di dalam kelas – kelas mereka. Dari pelaksanaan kurikulum di kelas tersebut para siswa akan mendapat berbagai kompetensi yang akan mereka gunakan dan kembangkan sendiri di dalam kehidupan nyata mereka diluar sekolah. Moga semua pihak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam implementasi kurikulum nasional kita.

*J) Penulis: Widyaiswara LPMP Provinsi Kalbar

(OPINI) YANG TERSISA DARI TEMU ILMIAH PEMIMPIN SEKOLAH DAN GURU PERBATASAN MALAYSIA DAN INDONESIA TAHUN 2015

Di pagi hari terakhir yang cerah
Kami membawa rombongan cikgu Malaysia
Untuk berkunjung ke Konsulat mereka
Katanya melapor apa yang didapat di Kalimantan Barat Indonesia

Salam sehat sejiwa selalu dikumandangkan
Membuat Kepala Konsulat terheran-heran
Apa saja yang menjadi panutan di bidang pendidikan
Selain peningkatan mutu pendidikan juga saling berbagi pengalaman

Hasil yang diharapkan dari kedua belah pihak
Adanya kerjasama yang baik antara Kalimantan Barat dan Sarawak
Dalam mengelola lembaga pendidikan yang lebih meningkat
Terima kasih kepada Konsulat yang terlibat

Sebagai negara yang saling bertetangga
Aspek historis di dua negara selalu dijaga
Telah lama Indonesia Malaysia mengembangkan kerjasama
Kualitas profesional dan kemampuan akademik meningkat sudah

Sekembalinya dari Konsulat Malaysia telah dilaporkan
Kami menuju ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNTAN
Di sini banyak informasi yang diberikan
Sangat berkaitan dengan dunia pendidikan

Banyak program pendidikan yang diinformasikan
Kepada pihak Jabatan Pendidikan Sarawak beserta rombongan
Sebagai bekal bagi pemimpin dan guru untuk perbandingan
Untuk mengembangkan kemitraan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNTAN
Banyak jurusan mata pelajaran yang diajarkan
Menyiapkan guru yang berkualitas serta berwawasan
Menjadikan pendidik yang profesional dalam segala bidang

Selesai sudah informasi yang diberikan
Selanjutnya diberikan suguhan santap siang
Makanan yang menjadi kegemaran
Bakso enak ala Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Terima kasih kami yang tak terhingga diucapkan
Kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Segala upaya dan pikiran serta tenaga sudah dikerahkan
Semoga informasi dan gambaran menjadi acuan

Perjalanan satu hari kami lanjutkan
Tak lupa singgah ke Musium selalu diutamakan
Disitu petugas ramah memberikan pelayanan
Masih banyak khasanah yang tak sempat dipaparkan

Waktu semakin cepat berjalan
Kami singgah ke Pasar Sudirman
Mau belanja sebagai buah tangan
Untuk keluarga dan handai taulan

Selamat jalan dan selamat berpisah
Kepada rombongan Cikgu Temu Ilmiah
Tunggu kami tahun depan di Sarawak Malaysia
'Tuk memajukan pendidikan di lain kisah

Pontianak, 15 Desember 2015
(Abdul Haer, S.Pd)

GALERI FOTO



Kegiatan Temu Ilmiah Kepala Sekolah Dan Guru Daerah Perbatasan
(Academic Forum For Principals And Teachers
Of The Border Region)



Bimbingan Teknis Bagi Operator Tempat Uji Kompetensi Guru Online Tahun
2015 yang dihadiri oleh Kepala Seksi Evaluasi PPPPTK BMTI Bandung



Kegiatan In House Training bagi seluruh staff di LPMP Provinsi
Kalimantan Barat



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Abdul Muis Tanjung Hulu
Pontianak Timur Kalimantan Barat 78327
Telp. (0561) 742110 - Fax (0561) 746618
Laman : <http://www.lpmp-kalbar.net>
E-mail : mailbox@lpmp-kalbar.net